

MILIK
PERPUSTAKAAN
ITN MALANG

**TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)**

**PENYIMPANGAN IMPLEMENTASI PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA KARANGSONG, KABUPATEN INDRAMAYU**



**Disusun Oleh :
RIA INDRIA SARI
NIM : 00.24.072**

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2007**

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)

PENYIMPANGAN IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA KARANGSONG, KABUPATEN INDRAMAYU

Disusun Oleh :

Nama : RIA INDRIA SARI
NIM : 00.24.072

Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jenjang Strata satu (S1)

Di

Jurusan Teknik Planologi
Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang

Dinyatakan Lulus Dan Diterima untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar sarjana teknik
Pada hari : Maret 2007

Anggota Penguji

Penguji I

(Ir. HUTOMO MUSTAJID)

Penguji II

(FANITACA, ST)

Penguji III

(ARIEF SETIAWAN, ST), MT

Menyetujui,

Pembimbing I

(Ir. Wara Indira R, MTP)

Pembimbing II

(Mira Setiyawati, ST)

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang

(Ir. Agustina Nurul H, MTP)

Ketua Jurusan
Teknik Planologi
FTSP-ITN, Malang

(Ir. Agung Witjaksono, MTP)

Penyimpangan Implementasi Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu

ABSTRAKSI

Penelitian ini berawal dari adanya isu utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah adanya kenyataan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan upaya pengembangan masyarakat yang merujuk pada kemampuan orang serta keterbatasan sumberdaya, teknologi dan kemampuan organisasi penopangnya di sisi yang lain.

Penelitian ini berdasarkan pada tinjauan teori serta tinjauan wilayah studi dari berbagai aspek penting berkaitan dengan konsep pemberdayaan yang diwujudkan melalui adanya program-program turunan yang telah dilaksanakan.

Adanya dugaan terjadinya indikasi penyimpangan dalam implementasi konsep pemberdayaan adalah alasan utama mengapa proses pemberdayaan masyarakat menjadi penting. Penelitian ini dilakukan mengikuti kaedah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dibuktikan secara kuantitatif dengan metode korelasi serta korelasi berganda.

Dari keseluruhan proses penelitian yang dilakukan, output dari analisa kuantitatif mampu membuktikan bahwa variabel kelembagaan dan otonomi masyarakat menjadi factor kunci yang terkait dengan penyimpangan serta diperkuat oleh temuan-temuan penting hasil analisa kualitatif yang menunjukkan arahan terjadinya indikasi penyimpangan.

Kata Kunci : penyimpangan implementasi konsep,
pemberdayaan masyarakat

Implementation Deviation of Coastal Community Empowerment Concept Karangsong Village, Indramayu Regency

ABSTRACT

The research begin with presence of main issue in the continous development is the need of the community that related with the community development that refer to people ability and resources, technology and organization limitation as the support in other side,

This research based on the theory consideration and study consideration of empowerment concept trough its derivative programme that has been implemented.

The presence of deviation indication guess in the implementation of empowerment concept is the main reason why the community empowerment process become important. This research is done follow qualitative research norm by using qualitative descriptive method and proven quantitatively with correlation method and multiple regression.

From overall research processes that were done, quantitative analysis output able to prove that that the institution variable and community otonom become the key factors that related with the deviation, that is supported by importants findings of qualitative analysis that showed the presence of deviation indication.

Keywords : deviation of concept implementation,
community empowerment

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul *“Penyimpangan Implementasi Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu”* yang merupakan syarat untuk menyelesaikan tahap pendidikan sarjana di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang. Setelah mengalami proses yang cukup lama, penulis merasa bahwa hasil penelitian ini merupakan sesuatu yang penting untuk mengukur kemampuan dalam menyerap ilmu yang telah didapat baik secara langsung melalui kuliah maupun pengalaman lain yang berhubungan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social dan mandiri.

Dengan melihat kondisi ini, maka akan dapat langsung dibayangkan bahwa aspek atau unsur yang melingkupi proses pemberdayaan yang terjadi di masyarakat begitu kompleks. Pemilahan faktor atau variabel yang akan dicermati dalam penelitian ini pun juga masih mengalami beberapa kesulitan. Karena begitu banyaknya aspek yang memang banyak terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat ini. Hingga akhirnya dapat diletakkan landasan yang menyangkut peran masyarakat serta program pemberdayaan turunan yang diprakarsai oleh LSM sebagai

yang dicermati. Dimana tujuan utamanya adalah untuk melihat dan mengetahui tentang factor-faktor yang terkait dengan penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan yang ada di masyarakat.

Penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat merupakan komponen penting dari suatu pembentukan ruang yang ingin dilihat keberadaannya terkait dengan proses implementasi konsep pemberdayaan yang terjadi di masyarakat. Sehingga pendiskripsian akan hal tersebut secara gamblang akan memudahkan masyarakat dalam menganalisis kegiatan pemberdayaan yang ada dalam melakukan interaksi sosio-ekonomi dan social-budaya. Dan dengan terus mengakomodir perbedaan tersebut, maka penyimpangan bisa seminimal mungkin untuk dikurangi.

Laporan ini tentunya tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : Ibu Woro Indira R selaku pembimbing I yang tidak pernah bosan membesarkan hati dan mendorong agar tetap optimis menyelesaikan penelitian ini bagaimanapun kondisinya, Ibu Mira Setiyawati selaku dosen pembimbing II atas kepercayaannya pada waktu yang cukup singkat ini, Bapak Teguh Kuncoro atas tempaan ilmunya selama dalam masa bimbingan serta dukungan moril tak ternilai dari teman-teman angkatan 2000 yang tetap selalu “ada” .

Akhirnya dengan tetap merasa dan harus merasa kurang serta selalu dipenuhi oleh kesalahan, penulis yakin bahwa masih banyak kekurangan pada penyusunan laporan ini, sehingga kritik maupun masukan sangat membantu sekali guna membuat penelitian ini semakin baik. Penulis juga berharap semoga hasil penelitian ini selanjutnya agar dapat ditindak lanjuti dan memberikan masukan yang penting bagi semua. Amien.

Malang, Maret 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	
Abstraksi	
Abstract	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xiii
Daftar Diagram.....	xvi
Daftar Gambar	xvii
Daftar Peta.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Definisi Judul Penelitian.....	5
1.4.1. Penyimpangan.....	5
1.4.2. Implementasi Konsep	5
1.4.3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.....	6
1.4.4. Desa	7
1.5. Lingkup Studi	8
1.5.1. Ruang Lingkup Lokasi.....	8
1.5.2. Ruang Lingkup Materi.....	9
1.6. Tinjauan Pustaka	12
1.6.1. Definisi-Definisi Pemberdayaan Oleh Para Ahli.....	13

1.6.2.	Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	18
1.6.3.	Sasaran Pemberdayaan Masyarakat.....	19
1.6.4.	Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	20
1.6.5.	Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	22
1.6.6.	Tahap-Tahap Pemberdayaan	23
1.6.7.	Upaya-Upaya Pemberdayaan Masyarakat	28
1.6.8.	Proses Sosial dan Interaksi Sosial.....	29
1.6.9.	Stratifikasi sosial.....	35
1.6.10.	Karakter Masyarakat Nelayan	36
1.6.11.	Pengertian Lembaga Kemasyarakatan.....	38
1.6.12.	Lingkungan Fisik	39
1.6.13.	Sistem Nilai Budaya dan Sikap	40
1.7.	Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran.....	42
1.7.1.	Perumusan Variabel Penelitian.....	42
1.7.2.	Indikasi Penyimpangan Implementasi Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	45
1.8.	Hipotesis	55
1.9.	Metode Penelitian	56
1.9.1.	Metode Pengumpulan Data (Investigasi).....	56
1.9.1.1.	Survey Primer	56
1.9.1.2.	Survey Sekunder.....	59
1.9.2.	Populasi Penelitian.....	60
1.9.3.	Teknik Penentuan Sampel	61
1.9.3.1.	Teknik Sampling.....	61
1.9.3.2.	Ukuran Sampling	62
1.9.4.	Pendekatan Analisa.....	63
1.9.4.1.	Metode Deskriptif Kualitatif.....	63
1.9.4.2.	Metode Frekwensi Distribusi Relative	65
1.9.4.3.	Metode Analisa Kuantitatif.....	66

1.10. Sistematika Pembahasan.....	71
-----------------------------------	----

BAB II GAMBARAN UMUM DESA KARANGSONG KECAMATAN

INDRAMAYU	73
2.1. Kebijakan Pemerintah Desa Karangsong No. 27 / 45 / 2019 / KepDes /IV / 2002 tentang Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Karangsong	73
2.1.1. Isu-Isu Pembangunan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Karangsong	73
2.1.2. Visi Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Karangsong..	74
2.2. Gambaran Umum Desa Karangsong	74
2.2.1. Kondisi Fisik Dasar	74
2.2.1.1. Letak Administrasi Desa Karangsong	74
2.2.1.2. Kondisi Topografi / Kemiringan Tanah	75
2.2.1.3. Kondisi Jenis Tanah.....	75
2.2.1.4. Kondisi Hidrologi	75
2.2.1.5. Kondisi Vegetasi Hutan Mangrove	76
2.2.1.6. Kondisi Klimatologi	76
2.2.2. Kondisi Fisik Binaan	77
2.2.2.1. Pola Pengguhaan Lahan.....	77
2.2.2.2. Karakteristik Tempat Tinggal Masyarakat	77
2.2.3. Aspek Sosial Budaya Masyarakat Desa Karangsong	77
2.2.3.1. Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan penduduk	79
2.2.3.2. Penduduk Menurut Komposisi Jenis Kelamin	79
2.2.3.3. Penduduk Menurut Agama	79
2.2.3.4. Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	80
2.2.3.5. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	82
2.2.3.6. Hubungan Sosial Masyarakat Desa Karangsong	83
2.2.3.7. Kegiatan Sosial Masyarakat Desa Karangsong	85

2.2.3.8. Kehidupan Budaya Masyarakat Desa Karangsong.....	86
2.2.4. Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Karangsong.....	87
2.2.4.1. Pendapatan Masyarakat Nelayan Rata-rata Tiap Bulan	88
2.2.4.2. Pengeluaran Masyarakat Nelayan Rata-rata Tiap Bulan	89
2.2.5. Aspek Kelembagaan Masyarakat	90
2.3. Profil Wetlands International Indonesia Programme.....	90
2.3.1. Struktur Organisasi dan Pelayanan Program	
Wetlands International	91
2.3.2. Jenis dan Mekanisme Pengambilan Keputusan	92
2.4. Konsep Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Oleh	
Wetlands International	93
2.4.1. Karakteristik Partisipan	103
2.4.2. Tujuan Konsep Kegiatan Pemberdayaan Wetlands	
International	104
2.4.3. Bentuk Bantuan / Program Wetlands International	104
2.4.4. Strategi Konsep Kegiatan Pemberdayaan	
Wetlands International	105
2.4.5. Asas dan Prinsip Konsep Kegiatan Pemberdayaan Wetlands	
International	106
2.4.6. Kemampuan Manajerial.....	106
2.4.7. Tingkat Kinerja.....	107
2.4.8. Penguasaan Materi.....	107
2.4.9. Otonomi Masyarakat	108
BAB III PEMBAHASAN ANALISA	109
3.1. Deskripsi Hasil Penelitian.....	109
3.1.1. Karakteristik Partisipan (X1).....	109
3.1.1.1. Jenis Kelamin Responden.....	109
3.1.1.2. Status Perkawinan Responden.....	110

3.1.1.3. Tingkat Pendapatan Responden.....	
3.1.1.4. Mata Pencaharian Responden.....	
3.1.1.5. Usia Responden	
3.1.1.6. Pendidikan Terakhir Responden.....	115
3.1.2. Integrasi Orientasi Tujuan (X2).....	116
3.1.2.1. Keefektifan Tahapan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat.....	116
3.1.2.2. Nilai Kepentingan Target yang Ada Pada Setiap Tahapan.....	118
3.1.2.3. Nilai Kepentingan Bantuan Dana / Insentif.....	119
3.1.2.4. Nilai Kepentingan Pembentukan Kelompok-Kelompok Masyarakat.....	120
3.1.2.5. Nilai Keefektifan Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Responden	121
3.1.3. Kesesuaian Bantuan Program (X3)	122
3.1.3.1. Kesesuaian Bantuan Program Pemberdayaan	122
3.1.3.2. Keberadaan Penetapan Skala Prioritas Penanganan Kebutuhan Masyarakat	124
3.1.3.3. Nilai Kepentingan Penentuan Skala Prioritas.....	125
3.1.4. Kelengkapan Strategi Pemberdayaan (X4).....	127
3.1.4.1. Keefektifan Strategi Persuasif	127
3.1.4.2. Keefektifan Strategi Edukatif	128
3.1.4.3. Keefektifan Strategi Fasilitatif.....	129
3.1.4.4. Tingkat Pemahaman Terhadap Strategi Program Pemberdayaan.....	130
3.1.5. Kelengkapan Asas dan Prinsip (X5).....	131
3.1.5.1. Pencerminan Asas Persamaan Hak dan Kewajiban	131
3.1.5.2. Pencerminan Asas Kemitraan.....	133
2.1.5.3. Pencerminan Prinsip Transparansi	134

3.1.5.4. Kesesuaian Program Pemberdayaan dengan Prinsip Keberlanjutan.....	135
3.1.6. Kelembagaan Masyarakat (X6)	136
3.1.3.1. Keefektifan Kelompok Masyarakat	136
3.1.6.2. Kemampuan Kelompok Masyarakat Dalam Melakukan Sosial Kontrol	138
3.1.7. Tingkat Kinerja LSM (X7)	139
3.1.7.1. Peran LSM	139
3.1.7.2. Kemampuan LSM Sebagai Pendamping	140
3.1.8. Kemampuan Manajerial LSM (X8).....	141
3.1.9. Penguasaan Materi (X9)	143
3.1.10. Otonomi Masyarakat (X10)	144
3.1.10.1. Kemampuan Masyarakat Mengakses Informasi Menyangkut Berbagai Aspek Pembangunan.....	144
3.1.10.2. Kemampuan Masyarakat Mengembangkan Modal Usaha, Mengakses Sumber Dana Lain, Melakukan Analisis Biaya Usaha Serta Mengembangkan Pemasaran Hasil Produksinya.....	145
3.1.11. Indikasi Penyimpangan Dari Tujuan Program Pemberdayaan (Y1)	147
3.1.12. Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Bantuan (Y2).....	148
3.1.13. Indikasi Penyimpangan Dari Kelengkapan Strategi Konsep Pemberdayaan (Y3)	149
3.1.14. Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Asas (Y4)	150
3.1.15. Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Prinsip (Y5).....	151
3.1.16. Indikasi Penyimpangan Dari Kelembagaan (Y6)	152
3.1.17. Indikasi Penyimpangan Dari Peran Fasilitator / Agen Pembaharu (Y7).....	153
3.1.18. Indikasi Penyimpangan Dari Penguasaan Materi (Y8).....	154

3.1.19. Indikasi Penyimpangan Dari Otonomi Masyarakat (Y9)	155
3.2. Analisa Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat	156
3.3. Analisa Potensi Sosial Budaya Masyarakat.....	157
3.4. Analisa Bentuk Konsep Program Pemberdayaan Masyarakat.....	158
3.5. Analisis Data	159
3.5.1. Hasil Analisa Korelasi	159
3.5.2. Hasil Analisa Regresi Berganda	162
BAB IV PENUTUP.....	176
4.1. Kesimpulan	176
4.1.1. Hasil Analisa.....	176
4.1.2. Faktor-Faktor yang Terkait Dengan Penyimpangan Implementasi Konsep Pemberdayaan Masyarakat	179
4.2. Rekomendasi	181
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kerangka Teori Variabel Pemberdayaan Masyarakat	43
Tabel 1.2	Design Penelitian	48
Tabel 1.3.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pada Subsektor Perikanan / Kenelayan Tahun 2005	60
Tabel 2.1	Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Umur Desa Karangsong Tahun 2005.....	79
Tabel 2.2	Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Karangsong Tahun 2005.....	81
Tabel 2.3	Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Karangsong Tahun 2005.....	82
Tabel 2.4	Kondisi Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendapatan (Nelayan)	88
Tabel 2.5	Pendapatan Rata-rata Per bulan Masyarakat Desa Karangsong	89
Tabel 2.6	Pengeluaran Rata-rata Per bulan Masyarakat Desa Karangsong.....	89
Tabel 2.7	Jenis dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Wetlands International.....	92
Tabel 2.8	Karakteristik Responden	103
Tabel 3.1	Hasil Penelitian Jenis Kelamin Responden	109
Tabel 3.2	Hasil Penelitian Status Perkawinan Responden	110
Tabel 3.3	Hasil Penelitian Tingkat Pendapatan Responden	111
Tabel 3.4	Hasil Penelitian Mata Pencaharian Responden	113
Tabel 3.5	Hasil Penelitian Usia Responden.....	114
Tabel 3.6	Hasil Penelitian Pendidikan Terakhir Responden	115
Tabel 3.7	Hasil Penelitian Keefektifan Tahapan Program Bagi Responden ...	116
Tabel 3.8	Nilai Kepentingan Target yang Ada Pada Setiap Tahapan	

	Bagi Responden	118
Tabel 3.9	Nilai Kepentingan Bantuan Dana / Insentif Bagi Responden	119
Tabel 3.10	Nilai Kepentingan Pembentukan Kelompok-Kelompok Masyarakat Bagi Responden	120
Tabel 3.11	Nilai Keefektifan Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Responden	121
Tabel 3.12	Kesesuaian Bantuan Program Pemberdayaan Bagi Responden	122
Tabel 3.13	Keberadaan Penetapan Skala Prioritas Penanganan Kebutuhan Masyarakat Bagi Responden.....	124
Tabel 3.14	Nilai Kepentingan Penentuan Skala Prioritas Penanganan Bagi Responden	125
Tabel 3.15	Nilai Keefektifan Strategi Persuasif Bagi Responden	127
Tabel 3.16	Nilai Keefektifan Strategi Edukatif Bagi Responden.....	128
Tabel 3.17	Nilai Keefektifan Strategi Fasilitatif Bagi Responden	129
Tabel 2.18	Tingkat Pemahaman Terhadap Strategi Program Pemberdayaan ...	130
Tabel 3.19	Pencerminan Asas Persamaan Hak dan Kewajiban Bagi Responden	131
Tabel 3.20	Pencerminan Asas Kemitraan Bagi Responden	133
Tabel 3.21	Pencerminan Prinsip Transparansi Bagi Responden	134
Tabel 3.22	Kesesuaian Program Pemberdayaan dengan Prinsip Keberlanjutan	135
Tabel 3.23	Keefektifan Kelompok Masyarakat Bagi Responden.....	136
Tabel 3.24	Kemampuan Kelompok Masyarakat Dalam Melakukan Sosial Kontrol	138
Tabel 3.25	Kemampuan Peran LSM Bagi Responden	139
Tabel 3.26	Kemampuan LSM Sebagai Pendamping Bagi Responden.....	140
Tabel 3.27	Kemampuan Manajerial LSM	141
Tabel 3.28	Penguasaan Materi LSM	143
Tabel 3.29	Kemampuan Masyarakat Mengakses Informasi.....	144
Tabel 3.30	Kemampuan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Ekonomi	145

Tabel 3.31	Indikasi Penyimpangan Dari Tujuan Program Pemberdayaan.....	147
Tabel 3.32	Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Bantuan Pemberdayaan	148
Tabel 3.33	Indikasi Penyimpangan Dari Kelengkapan Strategi Konsep Pemberdayaan.....	149
Tabel 3.34	Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Asas	150
Tabel 3.35	Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Prinsip	151
Tabel 3.36	Indikasi Penyimpangan Dari Kelembagaan	152
Tabel 3.37	Indikasi Penyimpangan Dari Peran Fasilitator / Agen Pembaharu	153
Tabel 3.38	Indikasi Penyimpangan Dari Penguasaan Materi	154
Tabel 3.39	Indikasi Penyimpangan Dari Otonomi Masyarakat.....	155
Tabel 3.31.	Hasil Analisa Korelasi	160
Tabel 3.32.	Hasil Analisis Regresi Berganda	162
Tabel 4.1	Keterkaitan Variabel dengan Penyimpangan	180

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Hasil Penelitian Jenis Kelamin Responden	110
Grafik 3.2	Hasil Penelitian Status Perkawinan Responden	111
Grafik 3.3	Hasil Penelitian Tingkat Pendapatan Responden	112
Grafik 3.4	Hasil Penelitian Mata Pencaharian Responden	114
Grafik 3.5	Hasil Penelitian Usia Responden.....	115
Grafik 3.6	Hasil Penelitian Pendidikan Terakhir Responden	116
Grafik 3.7	Hasil Penelitian Keefektifan Tahapan Program Bagi Responden	.117
Grafik 3.8	Nilai Kepentingan Target yang Ada Pada Setiap Tahapan Bagi Responden.....	119
Grafik 3.9	Nilai Kepentingan Bantuan Dana / Insentif Bagi Responden	120
Grafik 3.10	Nilai Kepentingan Pembentukan Kelompok-Kelompok Masyarakat Bagi Responden	121
Grafik 3.11	Nilai Keefektifan Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Responden	122
Grafik 3.12	Kesesuaian Bantuan Program Pemberdayaan Bagi Responden	123
Grafik 3.13	Keberadaan Penetapan Skala Prioritas Penanganan Kebutuhan Masyarakat Bagi Responden.....	125
Grafik 3.14	Nilai Kepentingan Penetapan Skala Prioritas Penanganan Bagi Responden	126
Grafik 3.15	Nilai Keefektifan Strategi Persuasif Bagi Responden	127
Grafik 3.16	Nilai Keefektifan Strategi Edukatif Bagi Responden.....	128
Grafik 3.17	Nilai Keefektifan Strategi Fasilitatif Bagi Responden	130
Grafik 3.18	Tingkat Pemahaman Terhadap Strategi Program Pemberdayaan ...	131
Grafik 3.19	Pencerminan Asas Persamaan Hak dan Kewajiban Bagi Responden	132
Grafik 3.20	Pencerminan Asas Kemitraan Bagi Responden	133

Grafik 3.21	Pencerminan Prinsip Transparansi Bagi Responden	135
Grafik 3.22	Kesesuaian Program Pemberdayaan dengan Prinsip Keberlanjutan	136
Grafik 3.23	Keefektifan Kelompok Masyarakat Bagi Responden.....	137
Grafik 3.24	Kemampuan Kelompok Masyarakat Dalam Melakukan Sosial Kontrol	139
Grafik 3.25	Kemampuan Peran LSM Bagi Responden	140
Grafik 3.26	Kemampuan LSM Sebagai Pendamping Bagi Responden.....	141
Grafik 3.27	Tingkat Kinerja LSM.....	142
Grafik 3.28	Penguasaan Materi LSM	143
Grafik 3.29	Kemampuan Masyarakat Mengakses Informasi.....	145
Grafik 3.30	Kemampuan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Ekonomi	146
Grafik 3.31	Indikasi Penyimpangan Dari Tujuan Konsep Pemberdayaan	147
Grafik 3.32	Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Bantuan Pemberdayaan.....	148
Grafik 3.33	Indikasi Penyimpangan Dari Kelengkapan Strategi Konsep Pemberdayaan.....	149
Grafik 3.34	Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Asas	150
Grafik 3.35	Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Prinsip.....	151
Grafik 3.36	Indikasi Penyimpangan Dari Kelembagaan	152
Grafik 3.37	Indikasi Penyimpangan Dari Peran Fasilitator / Agen Pembaharu	153
Grafik 3.38	Indikasi Penyimpangan Dari Penguasaan Materi.....	154
Grafik 3.39	Indikasi Penyimpangan Dari Otonomi Masyarakat.....	156
Grafik 3.31	Penerimaan & Penolakan Ho pada X1	163
Grafik 3.32	Penerimaan & Penolakan Ho pada X1	164
Grafik 3.33	Penerimaan & Penolakan Ho pada X1	164
Grafik 3.34	Penerimaan & Penolakan Ho pada X1	165
Grafik 3.35	Penerimaan & Penolakan Ho pada X1	166

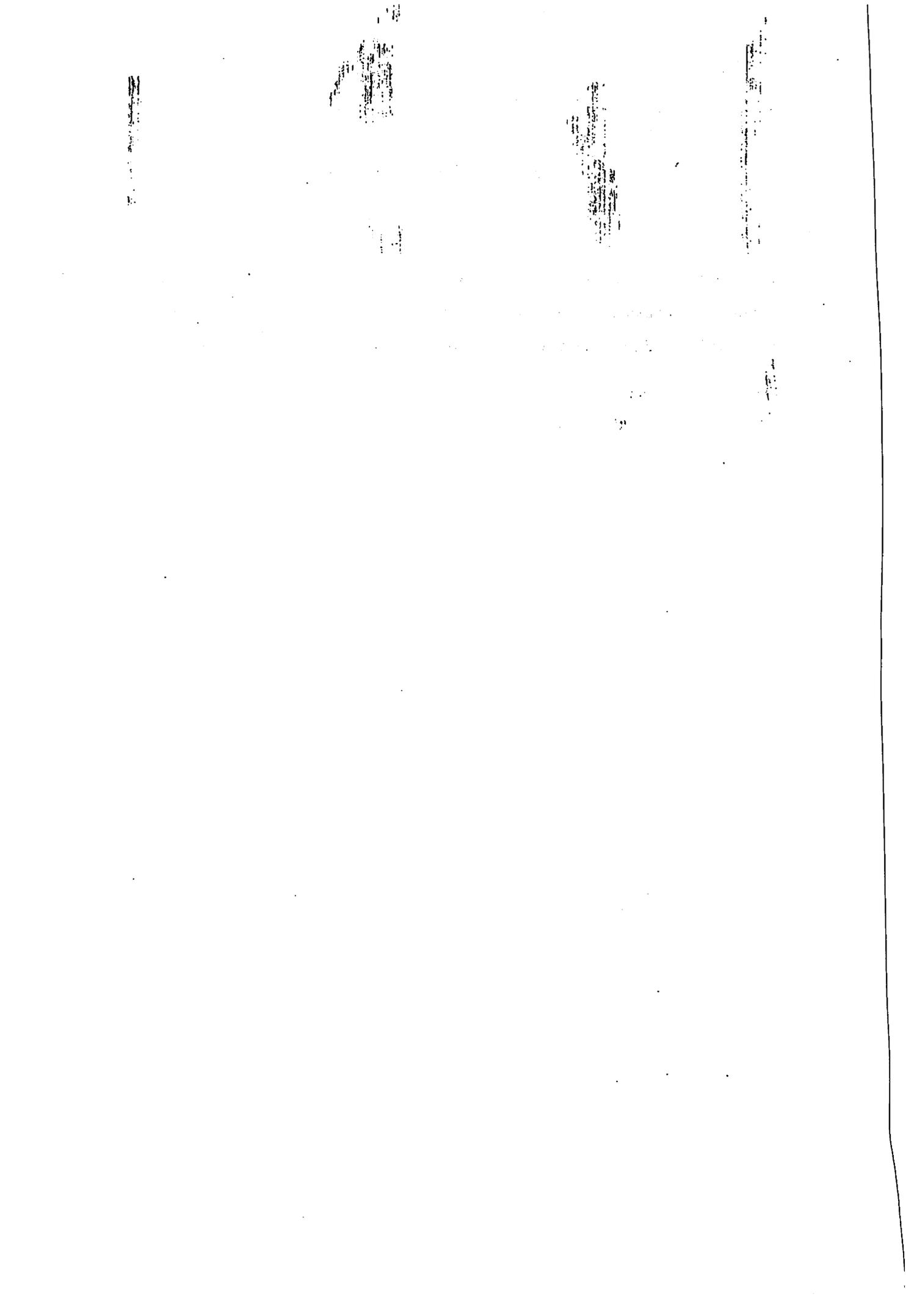
Grafik 3.36	Penerimaan & Penolakan H_0 pada X_1	166
Grafik 3.37	Penerimaan & Penolakan H_0 pada X_1	167
Grafik 3.38	Penerimaan & Penolakan H_0 pada X_1	168
Grafik 3.39	Penerimaan & Penolakan H_0 pada X_1	168
Grafik 3.40	Penerimaan & Penolakan H_0 pada X_1	169

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Hubungan Manusia-Lingkungan dan Perubahan	34
Diagram 1.2	Kaitan Antara Nilai, Sikap dan Tingkah Laku	41
Diagram 1.3	Rancangan uji regresi	67
Diagram 2.1	Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Karangsong Tahun 2005	82
Diagram 2.2	Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Karangsong Tahun 2005	83
Diagram 2.3	Struktur Organisasi Dan Pelayanan Program Wetlands International	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tegakan-tegakan mangrove	76
Gambar 2.2	Salah satu fasilitas peribadatan yang ada	80
Gambar 2.3	Aktifitas Petambak Desa Karangsong.....	81



DAFTAR PETA

Peta 1.1	Batas Administrasi Kabupaten Indramayu	10
Peta 1.2	Orientasi Wilayah Studi	11
Peta 2.1	Penggunaan Lahan Desa Karangsong.....	78
Peta 2.2	Pusat-Pusat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangsong	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah memikirkan secara faktual pertentangan antara dua kutub yakni ; adanya kenyataan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan di satu sisi, serta keterbatasan sumberdaya, teknologi dan kemampuan organisasi sebagai penopangnya di sisi yang lain

Secara konseptual pemberdayaan sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya saja sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan. Selain itu, dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan, serta dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹ Menurut Sennet dan Cabb (1972) dan Conway (1979) menyatakan bahwa ketidak berhasilan dalam pemberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti : ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional²

Permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat nelayan tidak terlepas dari masalah yang menyangkut kondisi sosial, ekonomi, fisik serta aspek lainnya yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat nelayan yakni dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan serta pendapatan masyarakat nelayan. Sedangkan di sisi lain tujuan-tujuan

¹ Suharto Edi, Ph.D.: *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), Hal 58

² Ibid, Hal 61

pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. Untuk ukuran tinggi rendahnya keterlibatan masyarakat tidak hanya diukur dengan kemauan masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan tetapi juga dengan ada tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan yang akan dibangun serta ada tidaknya kemauan masyarakat untuk ikut mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada.

Pendekatan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yakni alasan-alasan yang mengacu pada masyarakat. Masyarakat berhak untuk ikut terlibat dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan mereka dan alasan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Jika masyarakat benar-benar diberi kesempatan, untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan diperkirakan akan berlangsung lebih efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat dapat membangkitkan semangat kemandirian dan kerja sama di antara masyarakat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan swadaya masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai suatu kegiatan kolektif, pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa aktor, seperti masyarakat setempat, lembaga donor serta instansi terkait yang saling bekerjasama mulai dari perancangan, pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program tersebut. Memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program pemberdayaan.

Dalam hal ini, peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan wilayah pesisir sangat besar. Selain itu, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, dibuat suatu upaya pemberdayaan masyarakat yang didasari keinginan untuk memberdayakan masyarakat pesisir agar mampu mengelola wilayahnya sendiri secara lestari dan berkelanjutan. Melalui upaya ini diharapkan dapat dirumuskan suatu model pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat nelayan khususnya. Sekalipun jauh dari kesempurnaan tapi paling tidak dapat menjadi semacam asumsi dasar yang perlu dipertimbangkan oleh

pihak manapun dalam upaya mengembangkan masyarakat nelayan yang tidak hanya sekedar meningkatkan pendapatan saja melainkan juga meningkatkan kemampuan masyarakat secara mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, tanpa harus mengalami eksploitasi dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, asumsi dasar yang melandasi kebijaksanaan pengembangan masyarakat nelayan selama ini perlu ditinjau kembali. Satu hal yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah perlunya identifikasi tentang respon nelayan terhadap lingkungan dan perubahan sosial yang terjadi. Oleh sebab itu, terasa penting untuk mengerti pola adaptasi nelayan terhadap perubahan lingkungan, baik secara fisik maupun sosial agar intervensi-intervensi yang dilakukan akan lebih cocok dengan kebutuhan hidup masyarakat nelayan itu sendiri.

Hingga saat ini pun masih banyak masyarakat di Desa Karangsong yang kesulitan mengembangkan usaha mata pencahariannya karena kesulitan modal . Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber pembiayaan dan ketiadaan jaminan. Kelompok-kelompok yang seharusnya menjembatani antara anggota dan lembaga keuangan pun masih belum mempunyai kekuatan untuk mewujudkan hal tersebut,serta ketergantungan masyarakat terhadap pengijon / rentenir sebelum maupun setelah dilaksanakannya program pemberdayaan yang mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan pada implementasi program pemberdayaan.

Menyadari hal tersebut, maka upaya pelibatan masyarakat atau dengan kata lain proses pemberdayaan masyarakat menjadi penting. Ada beberapa alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam program pembangunan mempunyai sifat yang sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan atau proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan atau proyek jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. Dengan

demikian, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat perlu dikaji dan dikembangkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyimpangan dalam implementasinya.

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :

- Tidak berimbangnya antara tingkat pendapatan dan pengeluaran masyarakat karena berkurangnya produktivitas perairan budidaya maupun perairan alam.
- Tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi pada sumberdaya alam namun belum dapat memanfaatkan secara optimal.
- Rendahnya partisipasi masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia di Desa Karangsong
- Adanya dugaan bentuk-bentuk penyimpangan dalam program pemberdayaan masyarakat yang menunjukkan tidak adanya perubahan yang cukup signifikan sebelum dan sesudah adanya program pemberdayaan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka rumusan masalah dalam studi ini adalah :

1. Bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat di Desa Karangsong?
2. Apa saja bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan konsep pemberdayaan masyarakat di Desa Karangsong?
3. Faktor-faktor apa yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan konsep pemberdayaan masyarakat di Desa Karangsong?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.

Sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dalam studi ini adalah :

1. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat nelayan Desa Karangsong.
2. Mengidentifikasi konsep pemberdayaan masyarakat Desa Karangsong.

3. Mengidentifikasi bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan konsep pemberdayaan masyarakat di Desa Karangsong.
4. Mengetahui faktor-faktor yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan konsep pemberdayaan masyarakat di Desa Karangsong

1.4. Definisi Judul Penelitian

Judul dari penelitian ini adalah "Faktor-Faktor yang Terkait Dengan Penyimpangan Implementasi Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu". Perumusan definisi dari konsep-konsep penyusun kajian dimaksudkan untuk memberi koridor secara teoritis maupun operasionalisasi penelitian mengenai apa yang menjadi perhatian utama dari penelitian. Dimana pada hakekatnya suatu konsep adalah mendiskripsikan essensi dari sejumlah mengenai sesuatu,³ maka konsep-konsep yang perlu dijelaskan rumusan definisinya antara lain "Penyimpangan", "Implementasi Konsep", "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir" dan "Desa".

1.4.1. Penyimpangan

Penyimpangan berasal dari kata dasar '*simpang*', dan mempunyai pengertian proses; cara; perbuatan yang '*menyimpang*' atau menyimpangkan. '*Menyimpang*' sendiri bermakna membelok atau menempuh jalan lain/jalan simpangan.⁴ Dengan demikian penyimpangan dapat dimengerti sebagai cara-cara/proses-proses kegiatan/perbuatan/aktifitas di luar, atau tidak sesuai, dengan cara/jalan yang sudah ada atau ditetapkan.

1.4.2. Implementasi Konsep

Implementasi konsep dalam penelitian ini dimengerti sebagai penerapan atau pelaksanaan dari abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau

³ Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan II, 2005), hal. 7.

⁴ *Ibid.*, hal. 841.

individu tertentu. Karakteristik kejadian atau keadaan dalam hal ini adalah keadaan perikehidupan masyarakat pesisir bermukim.

Pengertian 'implementasi konsep' di atas merupakan hasil rumusan dari kata 'implementasi' dan 'konsep' sebagaimana berikut.

A. Implementasi

Implementasi adalah kata benda serapan dari bahasa Inggris '*implementation*', yang artinya pelaksanaan ; penerapan.⁵

B. Konsep

Konsep adalah rancangan; buram surat; ide ataupun pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.⁶

Menyangkut konsep sebagai abstraksi dari fakta, Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi juga menjelaskan bahwa konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.⁷

1.4.3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir merupakan kata kunci penelitian yang tersusun atas konsep 'pemberdayaan', 'masyarakat', dan 'pesisir'. Definisi dari masing-masing konsep tersebut adalah sebagai berikut.

A. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal pada kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.⁸

⁵ Ibid., hal. 327.

⁶ Ibid., hal. 456.

⁷ Masri Singarimbun & Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, -- Rev. ed.-, 1989), hal. 34.

⁸ Ambar Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta ; Gava Media, 2004), Hal.77

B. Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir adalah sejumlah manusia yang mendiami daerah di tepi laut yang mempunyai ciri-ciri ataupun karakter khusus berdasarkan keterikatan mereka dengan kebudayaan yang mereka anggap sama. Pengertian ini didapatkan dengan menjabarkan masing-masing konsep penyusunnya, yakni masyarakat dan pesisir.

1. Masyarakat, adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁹
2. Pesisir, mempunyai pengertian tanah datar berpasir di pantai (di tepi laut).¹⁰ Pengertian pesisir di sini merujuk pada suatu ruang atau wilayah, yang secara teoritis dimengerti sebagai wilayah peralihan antara daratan dan lautan.¹¹

Pemberdayaan masyarakat pesisir dengan demikian dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada sejumlah manusia yang mendiami daerah di tepi laut yang mempunyai ciri-ciri ataupun karakter khusus berdasarkan keterikatan mereka dengan kebudayaan yang mereka anggap sama. Secara sederhana, pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan suatu proses peningkatan atau transfer sumberdaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir.

1.4.4. Desa

Koentjaraningrat dalam bukunya "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia" (2004: 331) memberi gambaran tentang desa sebagai berikut:

"Desa sebagai tempat kediaman yang tetap pada masyarakat orang Jawa, di daerah pedalaman, adalah suatu wilayah yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan tingkat daerah paling rendah. Secara administratif desa langsung berada di bawah kekuasaan pemerintah kecamatan dan terdiri dari *dukuh-dukuh*. Tiap-tiap wilayah bagian desa ini diketuai oleh seorang Kepala *Dukuh*. Disini dijumpai sejumlah perumahan penduduk beserta tanah-tanah

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Hal. 564.

¹⁰ Ibid, Hal. 678.

¹¹ Dahuri, Rokhmin et. al., Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), Hal. 6.

pekarangannya yang satu sama lain dipisah-pisahkan dengan pagar-pegar bambu atau tumbuh-tumbuhan. Ada di antara rumah-rumah itu yang dilengkapi dengan lumbung padi, kadang-kadang ternak dan perigi, yang dibangun di dekat-dekat rumah atau di halaman pekarangannya. Kemudian sebuah dukuh dan dukuh lainnya, dihubungkan dengan jalan-jalan desa, yang luasnya sering tidak lebih dari dua meter. ... Adapun kuburan desa berada di lingkungan wilayah salah sebuah dukuh,”

Sedangkan Bintarto¹², menjelaskan bahwa desa adalah sesuatu hasil perpaduan antara kegiatan-kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud di muka bumi yang ditimbulkan unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural.

” Penyimpangan Implementasi Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu” yang menjadi judul penelitian ini secara operasional definisinya adalah “Cara/proses-proses kegiatan/aktifitas di luar, atau yang tidak sesuai dengan ketetapan penerapan atau pelaksanaan proses peningkatan atau transfer sumberdaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu”.

1.5. Lingkup Studi

Lingkup studi meliputi lingkup materi dan lingkup lokasi studi, untuk memberikan batasan yang jelas.

1.5.1. Ruang Lingkup Lokasi

Lokasi studi adalah Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu. Batas-batas administrasi Desa Karangsong adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Pabean Udik
- Sebelah Selatan : Desa Lemah Mekar dan Desa Singajaya
- Sebelah Timur : Desa Singajaya dan Laut Jawa
- Sebelah Barat : Desa Margadadi

Penentuan lokasi penelitian ini dilatari oleh karena Desa Karangsong merupakan salah satu wilayah pesisir di Kecamatan Indramayu yang sudah dan dalam penanganan program-program intervensi pemberdayaan dari pihak-pihak

¹² Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 13.

luar, yang mana memungkinkan terjadinya perbaikan kemampuan masyarakat Desa Karangsong. Gambaran wilayah studi dapat dilihat pada peta 1.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Indramayu, dan Peta 1.2 Peta Orientasi Wilayah Studi.

1.5.2. Ruang Lingkup Materi

Sebagaimana definisi operasional di atas, materi penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal/keadaan-keadaan/peristiwa-peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya penyimpangan implementasi konsep program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu.

Dasar acuannya adalah kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang sudah atau sedang berlangsung, kemudian digunakan untuk mengevaluasi implementasi dari konsep pemberdayaannya secara utuh. Dalam hal ini focus dan lokus amatan adalah program/proyek yang diprakarsai oleh Wetlands International Indonesia Programme, sehingga penelitian hanya dibatasi pada aktifitas Wetlands International selaku agen pembaharu/fasilitator dan masyarakat Desa Karangsong saja sebagai partisipan program pemberdayaan. Parameter amatan yang dievaluasi terdiri dari beberapa variabel pemberdayaan, antara lain :

- 1) Dalam mengidentifikasi karakteristik masyarakat nelayan di Desa Karangsong, variabel yang diamati adalah *karakteristik partisipan* yang terdiri dari beberapa sub variabel meliputi ; sosial ekonomi masyarakat nelayan dan sosial budaya masyarakat nelayan.
- 2) Dalam mengidentifikasi bentuk konsep pemberdayaan yang ada, variabel yang diamati adalah *integrasi orientasi dari tujuan pemberdayaan, kesesuaian bantuan program, kelengkapan strategi program, kelengkapan asas dan prinsip program serta kelembagaannya*.
- 3) Dalam mengidentifikasi dugaan bentuk-bentuk penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan maka ada penambahan variabel amatan yakni ; *otonomi masyarakat, kemampuan manajerial, tingkat kinerja, dan penguasaan materi*.

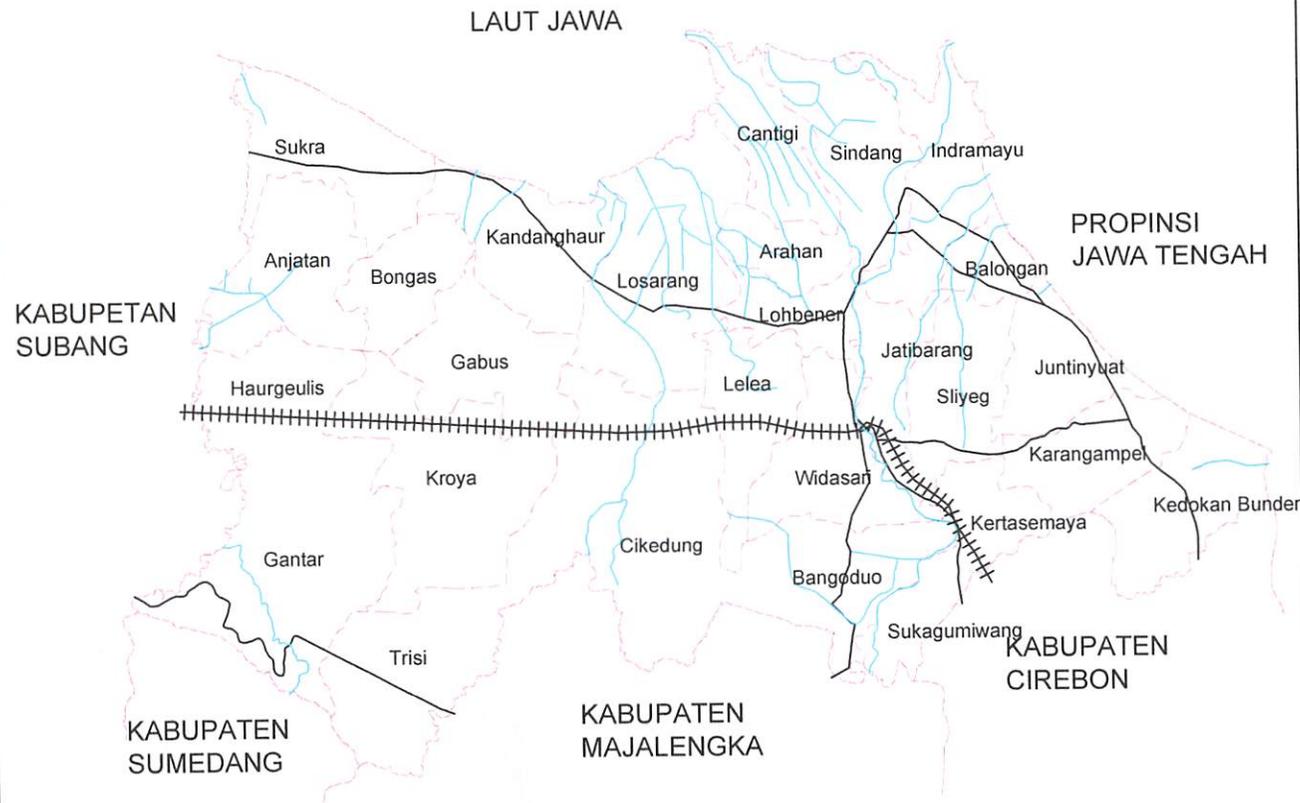
JUDUL PETA :

BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN INDRAMAYU

NO PETA : 1.1

LEGENDA :

-  : Jalan
-  : Sungai
-  : Rel Kereta Api
-  : Batas Kabupaten
-  : Batas Kecamatan



SUMBER PETA : **Peta RBI 1 : 25.000 Tahun 2000**

SKALA PETA :



STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR
DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU



TUGAS AKHIR
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2007

KABUPATEN INDRAMAYU

JUDUL PETA :

ORIENTASI WILAYAH STUDI

NO PETA : 1.2

LEGENDA :

-  : Jalan
-  : Sungai
-  : Daerah Pesisir
-  : Batas Desa
-  : Wilayah Studi



SUMBER PETA : **BPN**

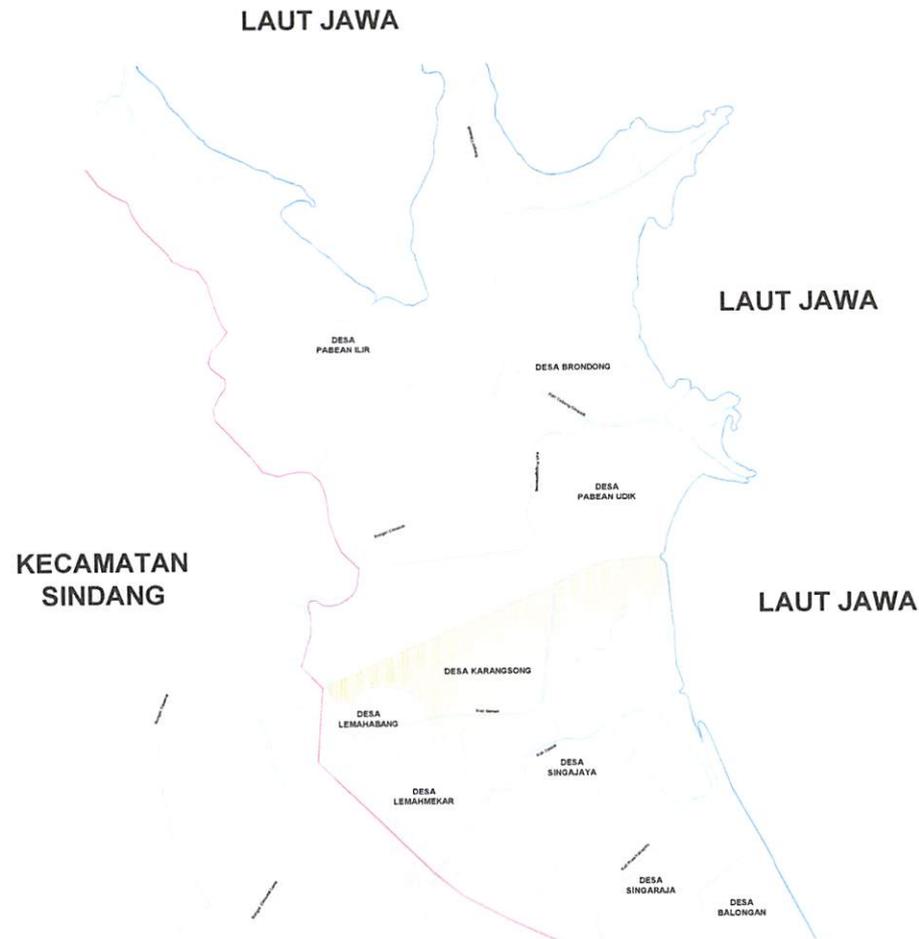
SKALA PETA :



STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR
DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU



TUGAS AKHIR
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2006



KECAMATAN INDRAMAYU

Dari 10 variabel pemberdayaan yang akan dianalisa untuk menguji kebenaran adanya dugaan penyimpangan dan diuji sebagai factor yang terkait dengan penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan, bilamana salah satu atau lebih dari maupun keseluruhan dari variabel pemberdayaan terbukti signifikan menyimpang, maka sudah dianggap sebagai bentuk penyimpangan.

Untuk penjabaran lebih jelas mengenai variabel-variabel penelitian dalam studi ini, akan dibahas dalam sub bab tersendiri di bawah.

1.6. Tinjauan Pustaka

Empowerment, yang dalam bahasa Indonesia berarti “pemberdayaan” adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat, utamanya Eropa.¹³

Pada umumnya perencanaan kota dan lingkungan masyarakat kerap dilihat sekedar sebagai konsumen yang pasif. Memang mereka diberi tempat untuk aktifitas kehidupan, kinerja, rekreasi, belanja dan bermukim, tetapi kurang diberi peluang untuk ikut dalam proses penentuan kebijaksanaan dan perencanaannya.¹⁴

Oleh karena itu di dalam proses perencanaan masyarakat perlu ikut serta di dalamnya, supaya masyarakat dapat berperan aktif di dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa sudut pandang¹⁵

“Pertama, penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang ; kedua, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah ; ketiga, perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.”

¹³ Ringkasan Hasil Lokakarya Pada Seminar Nasional Perumahan dan Pemukiman Menyongsong Abad 21 (Jakarta: Kantor Menpera: 27-28 Oktober 1997), Hal. 6.

¹⁴ Budiharjo, Eko, Tata Ruang dan Pola Perkembangan Indonesia (Malang: Jurnal PWK, Juli 1992), Hal. 29.

¹⁵ Sumodiningrat, Gunawan., Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 1999), Hal.

Di dalam pemberdayaan terdapat empat hal yang patut digarisbawahi dalam penerapan suatu konsep pemberdayaan.¹⁶

- Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*); dasar asumsinya setiap masyarakat pasti mempunyai potensi betapapun kecilnya; karena bila tidak akan punah.
- Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Berbagai upaya harus dilakukan untuk mengubah potensi menjadi “peluang”.
- Memerankan masyarakat tidak sebagai obyek pembangunan. Dalam kaitannya, “memberdayakan” berarti juga melindungi, mencegah eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, mencegah persaingan tidak seimbang.
- Memberdayakan tidak hanya mengandung arti ekonomi tetapi juga sosial-kultur. Memberdayakan tidak hanya menjangkau upaya peningkatan ekonomi, kesehatan dan pendidikan, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya.

Pemberdayaan masyarakat menjadi semacam pemicu kesekian kalinya bagian timbulnya gairah memformalkan peran serta masyarakat di segala aspek pembangunan tersebut dalam proses teknis dan prosedur administratif pembangunan yang konstitusional legal. Termasuk dalam penataan ruang.

1.6.1. Definisi-Definisi Pemberdayaan Oleh Para Ahli

A. Robert Dahl¹⁷

Pemberdayaan disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Kekuatan menyangkut kemampuan pelaku mempengaruhi pelaku ke-2 untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pelaku yang ke-2 tersebut.

B. Hulme and Turner¹⁸

Pemberdayaan mendorong terjadinya proses perubahan sosial yang memungkinkan orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif

¹⁶ Prasetyo, Hadi., Reorientasi Perspektif Pembangunan Daerah Otonomi, Mata Kuliah Umum, Teknik Planologi, ITN Malang

¹⁷ Onny S.Prijono dan A.M.W.Pranarka, op.cit, Hal.62

¹⁸ Ibid Hal. 63

*C. Pearse and Steifel*¹⁹

Menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan dan peningkatan kemandirian merupakan bentuk pemberdayaan partisipatif.

*D. Paul*²⁰

Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil.

*E. Borrini and Shatty*²¹

Pemberdayaan dari perspektif lingkungan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan.

*F. Kassam*²²

Sebagai suatu kesatuan, melek huruf memberikan akses terhadap pengetahuan tertulis. Melek huruf diinterpretasikan sebagai sumber pemberdayaan rakyat.

*G. Ginandjar Kartasmita*²³

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian tentu sudah punah. Pemberdayaan adalah untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: CIDES, Cet. I, 1996), Hal. 144-145.

kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

*H. John Friedmann*²⁴

Konsep empowerment (pemberdayaan) yang diprakarsai oleh Friedmann muncul karena adanya dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dan harapan, menurut Friedmann bukanlah merupakan alat ukur dari hasil kerja ilmu-ilmu sosial, melainkan lebih merupakan cermin dari nilai-nilai normatif dan moral. Kegagalan dan harapan akan terasa sangat nyata pada tingkat individu dan masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, yang dirasakan hanyalah gejala dari kegagalan dan harapan. Sebagai titik fokusnya, adalah lokalitas sebab “civil society” menurut Friedmann akan terasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal. Namun Friedmann juga mengingatkan bahwa sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar civil society diabaikan. Oleh karena itu menurut Friedmann, pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar secara nasional maupun internasional.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah nilai kolektif dari pemberdayaan individu. Mengkaji pentingnya rumah tangga sebagai sumber utama pemberdayaan. Rumah tangga disini diartikan sebagai sekelompok penduduk yang hidup di bawah satu atap, makan dari panci yang sama dan bersama-sama terlibat dalam proses pembuatan keputusan sehari-hari. Menurut Friedmann, rumah tangga menempatkan 3 macam kekuatan yaitu sosial, politik dan psikologis. Kekuatan sosial menyangkut akses terhadap

²⁴ John Friedmann, op.cit, Hal. 32-33

dasar-dasar produksi tertentu suatu rumah tangga , misalnya informasi, pengetahuan dan ketrampilan, partisipasi dalam organisasi sosial dan sumber-sumber keuangan.

Kekuatan politik meliputi akses setiap anggota keluarga terhadap proses pembuatan keputusan terutama keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Kekuatan psikologis digambarkan sebagai rasa potensi individu yang menunjukkan perilaku percaya diri. Para pendukung pembangunan alternatif mementingkan pemberdayaan rumah tangga dengan masing-masing anggotanya melalui ketiga kekuatan tersebut, tetapi yang patut mendapat perhatian utama adalah mendukung pemberdayaan sosial supaya mereka dapat juga berpartisipasi dalam tindakan-tindakan politik dan sosial yang relevan.

Friedmann mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai berikut²⁵ :

- ♦ Syarat minimal dalam sebuah rumah tangga adanya konsumsi pribadi berupa ; makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain.
- ♦ Pelayanan-pelayanan secara kolektif yang bersifat mendasar disediakan oleh dan untuk komunitas secara luas (air minum segar, kebersihan, penerangan, angkutan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan).
- ♦ Partisipasi masyarakat di dalam membuat keputusan yang berpengaruh pada mereka.
- ♦ Kepuasan terhadap tingkat kebutuhan dasar yang pasti di dalam kerangka hak asasi manusia secara luas.
- ♦ Pekerjaan adalah sebagai alat dan tujuan di dalam strategi mendapatkan kebutuhan dasar.

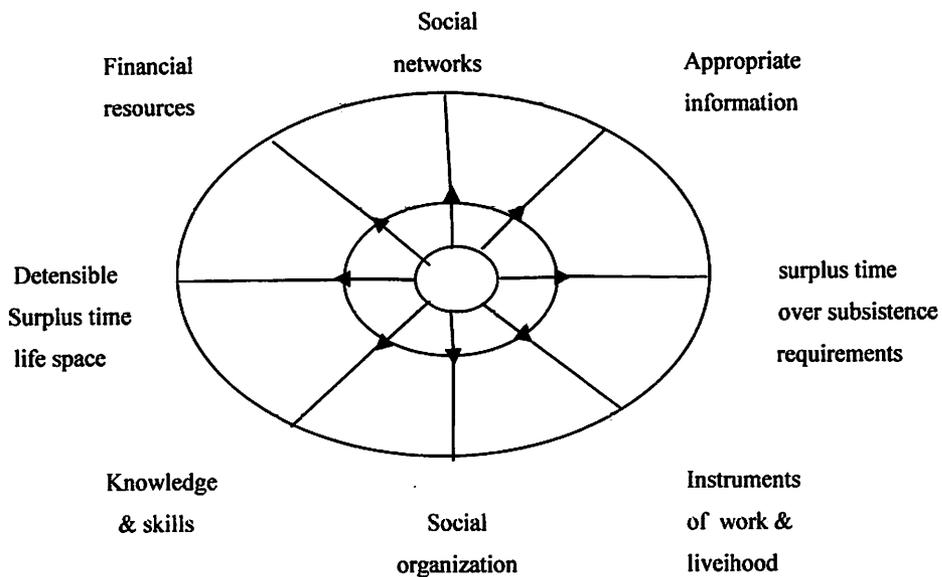
Selain pendekatan pemenuhan kebutuhan, Friedmann juga menggunakan model yang berlainan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar secara politik yaitu model kemiskinan merupakan pengingkaran pemberdayaan.

Munculnya model ini didasari asumsi :

“...Bahwa rumah tangga miskin kurang (tidak punya peranan) di dalam kekuatan sosial untuk memperbaiki kondisi mereka...”

²⁵ Ibid, Hal. 67-69.

Poin ini juga menempatkan ekonomi rumah tangga pada pusat kekuatan sosial yang dapat diukur dan diperbandingkan (Gambar 1.1)



Kemiskinan merupakan pengingkaran pemberdayaan meliputi:²⁶

1. Ruang hidup yang dapat dipertahankan.
2. Waktu yang lebih
3. Pengetahuan dan keahlian
4. Informasi yang tepat
5. Organisasi sosial
6. Jaringan sosial
7. Sarana kerja dan mata pencaharian
8. Sumber-sumber keuangan

I. Ife (1995:61-64)

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah.²⁷ Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk

²⁶ Onny S.Priono dan A.M.W.Pranarka, op.cit, Hal. 62

²⁷ Suharto Edi, Ph.D.: Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), Hal 59-60

individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

1.6.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan tersebut masyarakat harus menjalani proses belajar. Dengan proses belajar tersebut akan diperoleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu. Dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai, untuk mengantarkan kemandirian mereka. Apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan suatu visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik, masyarakat yang ideal.²⁸ Sebagaimana dikemukakan oleh Montagu dan Matson dalam Suprijatna²⁹ dalam *The Dehumanization of Man*, yang mengusulkan konsep *The Good Community and Competency* yang meliputi :

1. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan pribadi, adanya kelompok juga kelompok primer.

²⁸ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta : Gava Media, cetakan pertama, 2004), Hal. 80-81

²⁹ Suprijatna, Tjahya, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), Hal. 64-65

2. Komunitas memiliki otonomi yaitu kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab.
3. Memiliki viabilitas yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri.
4. Distribusi kekuasaan merata sehingga setiap orang berkesempatan riil, bebas memiliki dan menyatakan kehendaknya.
5. Kesempatan setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk kepentingan bersama.
6. Komunitas memberi makna kepada anggota.
7. adanya heterogenitas dan beda pendapat.
8. Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang berkepentingan.
9. Adanya konflik dan *managing conflict*.

1.6.3. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat³⁰

Pada awalnya upaya memberdayakan masyarakat pasti dihadapkan pada suatu kondisi masyarakat atau bagian dari masyarakat yang masih dalam posisi dan kondisi yang lemah. Mungkin terjadi masyarakat secara keseluruhan yang berada pada wilayah tertentu sama sekali belum berdaya. Dengan demikian orientasi pemberdayaan memang secara tegas menunjuk suatu target group masyarakat itu sendiri. Di sisi lain sangat mungkin terjadi bahwa sasaran yang perlu diberdayakan hanyalah merupakan bagian dari suatu masyarakat saja, yaitu khususnya pihak yang belum memiliki daya.

Perlu dipikirkan lagi siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran pemberdayaan. Schumacher memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan "kail jauh lebih tepat daripada memberikan ikan", dengan cara konsep pemberdayaan harus mengerti dengan benar kebutuhan masyarakatnya agar dapat tepat sasaran.

³⁰ Ambar Teguh Sulistiyani, op. Cit., Hal.90

Di samping itu NGO merupakan agen yang mendapat posisi penting, karena dipandang lebih bersifat entrepreneur, berpengalaman dan inovatif dibanding pemerintah. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya seiring dengan konsep *good governance*. Konsep ini mengetengahkan ada tiga pilar yang harus diketemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras.

1.6.4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan dapat dilakukan secara individual meskipun pada gilirannya strategi inipun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting); mikro, mezzo dan makro.³¹

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, management conflict adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

³¹ Suharto Edi, Ph.D.: *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), Hal 66-67

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu : pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan (Suharto, 1997 : 218-219) :³²

1. Pemungkinan ; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan ; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan ; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan ; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan ; melihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dubois dan Miley (1992:211) memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat :

³² Ibid

1. Membangun relasi pertolongan yang ; (a) merefleksikan respon empati, (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self-determination), (c) menghargai perbedaan dan keunikan individu, (d) menekankan kerjasama (klien partnership)
2. Membangun komunikasi yang : (a) menghormati martabat dan harga diri klien, (b) mempertimbangkan keragaman individu, (c) berfokus pada klien, (d) menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang : (a) memperkuat partisipasi klien dalam setiap aspek proses pemecahan masalah, (b) menghargai hak-hak klien, (c) merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui : (a) ketaatan terhadap kode etik profesi, (b) keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset dan perumusan kebijakan, (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik, (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

1.6.5. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut beberapa penulis, seperti Solomon (1976), Rappoport (1981,1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift dan Levin (1987), Weick, Rapp, Sullivan dan Kisthardt (1989), terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial (Suharto, 1997;216-217)

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.

5. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri; tujuan, cara, dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

1.5.6. Tahap-Tahap Pemberdayaan³³

Adapun tahap-tahap dalam proses pemberdayaan adalah sebagai berikut :

1. *Pemberdayaan Individu*

Pemberdayaan individu yang dimaksud adalah pemberdayaan keluarga dan setiap anggota keluarga. Asumsi yang dibangun adalah apabila setiap anggota keluarga dibangkitkan keberdayaannya, maka unit-unit keluarga berdaya ini akan membangun suatu jaringan keberdayaan yang lebih luas lagi. Jaringan yang lebih luas ini akan membentuk apa yang dinamakan sebagai keberdayaan sosial. Keluarga, didalam konsep pemberdayaan ini didudukkan sebagai produser sekaligus sebagai consumer

³³ *Gender dan Kesejahteraan Perempuan: Pendekatan Berbasis Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan*. Jember: Jurnal PWK, Vol.9, No.1/Januari 1998, Hal 13-15

Langkah-langkah untuk membangun keberdayaan individu adalah :

- **Pemberdayaan Waktu**
Diartikan sebagai usaha mengurangi pemborosan waktu yang dihabiskan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (air bersih, kesehatan dan transportasi).
- **Pemberdayaan Psikologis**
Pembangunan keyakinan diri bahwa para individu yang nantinya dipilih untuk menerima program pemberdayaan adalah individu-individu yang mampu menularkan atau menarik individu-individu lain yang belum beruntung untuk bergabung ke dalam kegiatan usahanya.
- **Pemberdayaan Usaha Ekonomi**
Melalui suatu proses yang mengarah pada terbentuknya jaringan usaha antar anggota keluarga, antar tetangga, antar kelompok masyarakat kemudian terkait pada ekonomi pasar (baik formal maupun informal).

2. *Pemberdayaan Institusi*

Institusi yang dimaksud di sini adalah hubungan antar individu, atau antar kelompok dalam masyarakat. Pada hakekatnya individu dengan individu lainnya diikat oleh suatu ikatan yang disebut keluarga. Begitu seterusnya sampai pada tingkatan yang lebih tinggi. Tantangan utama dalam pemberdayaan institusi adalah bagaimana memberdayakan sumber waktu, ketrampilan dan modal yang dimiliki oleh keluarga-keluarga miskin di pedesaan ke dalam domain-domain politik, ekonomi dan sosio kultural. Penguatan institusi akan dilakukan secara bertahap mengikuti lintasan spiral mulai dari penguatan antar individu, antar kelompok, terus naik pada domain sosial-ekonomi-politik yang lebih luas lagi, sampai pada domain ekonomi meso dan makro. Sangat disadari, bahwa dalam perjalanannya nanti lintasan spiral ini akan banyak menghadapi paradoks dan dialektika antara (a) Syarat-syarat ekonomi rasional melawan nilai-nilai sosio kultural (moral), (b) Ekonomi formal melawan ekonomi informal, (c) Akumulasi kapital melawan ekonomi subsistensi, (d) Ruang kehidupan biologi sosial melawan ruang kegiatan ekonomi.

Langkah-langkah untuk membangun keberdayaan institusi adalah :

- Memperkuat ikatan antar individu, antar keluarga yang bertetangga dekat dan antar kelompok keluarga melalui penciptaan ketergantungan yang rasional antara kegiatan usaha ekonomi dan nilai-nilai sosio kultural yang di dalam masyarakat.
- Penguatan institusi melalui penciptaan ketergantungan yang rasional antara kegiatan usaha ekonomi dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat
- Dimaksudkan agar kegiatan usaha ekonomi yang dikembangkan dapat berlanjut antar keturunan atau antar generasi.

3. Pemberdayaan Politik

Pada hakekatnya, pemberdayaan politik disini dimaksudkan sebagai lawan dari pengabaian politik. Pada praktek ekonomi yang terjadi saat ini telah ditemukan adanya pengabaian politik dan ekonomi oleh “urban-metropolitan economy” dan “multinational economy” terhadap para miskin di pedesaan. Pengabaian ekonomi dan politik nampak pada tidak dimasukkannya para miskin dipedesaan ke dalam proses dan struktur akumulasi kapital dari “multinational” maupun “national corporation”. Pengabaian ekonomi dan politik juga nampak pada pengusuran-pengusuran sumber daya tanah yang dimiliki oleh para miskin di pedesaan oleh sektor-sektor perkotaan atau “multinational” maupun “national corporation”.

Konsep pemberdayaan politik yang ditawarkan disini merupakan konsep-konsep perlawanan terhadap fenomena-fenomena yang dilukiskan di atas. Beberapa konsep dasar yang dapat diusulkan untuk membangun keberdayaan politik para miskin di pedesaan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemberdayaan politik yang dituju disini adalah terbentuknya mobilisasi dan kesaling-terkaitan antara kekuatan negara (state power), kekuatan ekonomi (economic power), dan kekuatan sosial (social power) sampai pada tingkat pedesaan.
- Dalam peta kesaling-terkaitan antara kekuatan-kekuatan tersebut dapat ditunjukkan letak inti (core) masing-masing kekuatan tersebut. Pada negara,

inti kekuatan terletak pada lembaga-lembaga formal pemerintahan dan perangkat-perangkat hukum yang dimiliki. Pada kekuatan sosial (civil society), inti kekuatan terletak pada instansi keluarga melebar ke institusi sosial (keagamaan, kesenian, dan sebagainya). Pada kekuatan ekonomi, inti kekuatan terletak pada institusi-institusi yang berwujud dalam korporasi ekonomi.

- Pada tingkat praksis, pemberdayaan politik di sini akan mengarah pada terbangunnya “kesaling-terkaitan” (linkage) antara keluarga-keluarga miskin di pedesaan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan korporasi-korporasi ekonomi nasional maupun internasional.
- Secara praksis, langkah-langkah yang ditawarkan bagi pemberdayaan politik ini adalah sebagai berikut :
 - Mendorong agar kelompok-kelompok individu berkembang menjadi “civil society” yang memiliki kekuatan tawar menawar.
 - Mendudukan lembaga-lembaga pemerintah sebagai tulang punggung (backbone) bagi terbangunnya keterkaitan antara kekuatan-kekuatan sosial pedesaan dengan korporasi-korporasi ekonomi nasional maupun multinasional.
 - Melalui kekuatan lembaga-lembaga pemerintah, korporasi ekonomi nasional dan multinasional diminta untuk membuka pasarnya bagi produk-produk yang dihasilkan oleh penduduk miskin pedesaan, atau memberikan sebagian dari kegiatan produksinya kepada para keluarga miskin di pedesaan melalui mekanisme sub-kontrak.

Selain itu, pada dasarnya pendidikan sebagai sarana pemberdayaan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.³⁴ Pada hakikatnya pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia baik individu maupun sosial.

³⁴ UU.No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan kata lain, pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi masa depan. Hal ini juga diungkapkan oleh J. Babari dan Onny S. Prijono sebagai berikut³⁵ :

“...Pada hakekatnya proses pemberdayaan di bidang pendidikan merupakan pendekatan holistik yang meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, sistem belajar mengajar, institusi atau lembaga pendidikan dengan segala sarana dan prasarana pendukungnya...”

Dengan mengacu pada definisi di atas maka pemberdayaan diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha yang teencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif. Suatu pendidikan disebut bermutu dari segi produk jika mempunyai salah satu atau lebih ciri-ciri sebagai berikut ini³⁶ :

- Peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar yang harus dikuasainya sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya adalah hasil akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal).
- Hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya sehingga dengan belajar peserta didik bukan mengetahui sesuatu, melainkan dapat melakukan sesuatu yang fungsional untuk kehidupannya.
- Hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja. Dari segi ini, maka relevansi merupakan salah satu aspek atau indikator dari kualitas. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam proses pemberdayaan dalam bidang pendidikan yaitu tenaga pendidik sebagai faktor kunci proses pemberdayaan. Definisi dari tenaga kependidikan adalah semua orang yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.³⁷

³⁵ Onny S.Prijono dan A.M.W.Pranarka, op.cit, Hal.72

³⁶ Ibid, Hal.77-78

³⁷ Ibid, Hal. 78

1.6.7. Upaya-Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Adapun upaya-upaya dalam proses pemberdayaan masyarakat meliputi hal-hal berikut ini :

1. Menciptakan kondisi yang memungkinkan / mendorong pengembangan potensi masyarakat.
2. Menciptakan berbagai program yang memihak untuk membangun potensi dan kapasitas manusia dalam rangka membentuk manusia yang produktif secara ekonomi dan efektif secara sosial.
3. Membangun potensi masyarakat secara kelompok melalui pengorganisasian untuk menggalang potensi kelompok dan menciptakan wahana yang kompatibel dengan pranata sosial yang ada.³⁸

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau potensi masyarakat dari dalam, dengan dukungan unsur-unsur penguat luar atau bersifat intervensi dari luar untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan mengembangkan potensi unggulan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini lebih luas dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar, lebih diarahkan untuk melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan ketertinggalan.³⁹

Usaha pemberdayaan masyarakat mencakup upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menciptakan kondisi yang mendorong / memungkinkan pengembangan potensi masyarakat melalui reformasi pengaturan, kelembagaan, pasar dan penciptaan akses ke sumberdaya kunci (tanah, dana, perijinan, teknologi dan sebagainya).
2. Membangun potensi kelompok melalui pengorganisasian untuk menggalang potensi kelompok dan menciptakan wahana yang kompatibel dengan pranata formal yang ada.

³⁸ Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat, Hal.5

³⁹ Ibid, Hal. 13

3. Pengembangan program-program pendukung upaya kelompok untuk tercapai sinergi.⁴⁰

1.6.8. Proses Sosial dan Interaksi Sosial

Interaksi dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya ataupun proses politik dan sejenisnya yang lambat atau cepat dapat menimbulkan suatu realita atau kenyataan.⁴¹ Sedangkan menurut Yoseph. S Roucek (1963)⁴²

“Interaction is a process in which the responses of each party become, successfully, stimulan for the responses of the other, it is a reciprocal process in which one party is influenced by the other behavior. People influence each other behavior through contact direct speakin, listening, indirect writing.”

Dimana interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dan pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, melalui berita yang didengar dan sebagainya.

Menurut Mar’at, interaksi sosial adalah suatu proses dimana individu memperhatikan dan merespon terhadap individu lain sehingga dibalas oleh suatu tingkah laku tertentu⁴³, sedangkan menurut Gillin⁴⁴, bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial (yang juga dapat dinamakan proses sosial), oleh karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial.. Bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia.

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor antara lain ; faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri, secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. Apabila masing-masing ditinjau secara lebih mendalam, maka faktor imitasi

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Soetrisno, Loekman., Menuju Masyarakat Partisipatif, Tahun 1995, Hal.61

⁴² Ibid, Hal.62

⁴³ Mar’at Prof, Dr., Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya, Tahun 1981, Hal.107

⁴⁴ Soekanto, Soerjono., Sosiologi Suatu Pengantar, Tahun 1990, hal 67

misalnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Namun demikian, imitasi mungkin pula mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif dimana misalnya yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang. Kecuali daripada itu, imitasi juga dapat melemahkan bahkan mematikan pengembangan daya kreasi seseorang.

Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau suatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Jadi proses ini hampir sama dengan imitasi akan tetapi titik tolaknya berbeda. Berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak yang menerima dilanda emosi, hal mana menghambat daya berfikirnya secara rasional.

Identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, oleh karenanya kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. Proses identifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya (secara tidak sadar), maupun dengan disengaja oleh karena seringkali seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam proses kehidupannya. Walaupun dapat berlangsung dengan sendirinya, proses identifikasi berlangsung dalam suatu keadaan dimana seseorang yang beridentifikasi benar-benar mengenal pihak lain (yang menjadi idealnya), sehingga pandangan, sikap maupun kaidah-kaidah yang berlaku pada pihak lain dapat melembaga bahkan menjiwainya.

Berlangsungnya identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh-pengaruh yang lebih mendalam daripada proses imitasi dan sugesti walaupun ada kemungkinan bahwa pada mulanya proses identifikasi diawali oleh imitasi dan atau sugesti. Proses simpati sebenarnya merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Dalam hal ini perasaan memegang peranan yang sangat penting walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerjasama dengannya. Proses simpati akan dapat berkembang di dalam suatu keadaan dimana faktor saling mengerti

terjamin. Hal-hal tersebut merupakan faktor minimal yang menjadi dasar bagi berlangsungnya proses interaksi sosial.

Interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial (social contact) dan komunikasi. Terjadinya suatu kontak tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan akan tetapi tetapi juga tanggapan terhadap tindakan tersebut. Dalam suatu kontak sosial diperlukan komunikasi karena arti penting dari komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniyah atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (conflict). Gillin mengemukakan ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu :

- 1) Proses yang asosiatif (processes of association) yang terbagi menjadi tiga bentuk khusus lagi, yaitu : akomodasi, asimilasi dan akulturasi.
- 2) Proses yang disosiatif (processes of dissociation) yang mencakup : persaingan yang meliputi kontravensi dan pertentangan atau pertikaian (conflict)

Sedangkan Kimball young mengemukakan bentuk-bentuk proses sosial adalah oposisi (opposition) yang mencakup persaingan (competition) dan pertentangan atau pertikaian (conflict), kerjasama (cooperation) yang menghasilkan akomodasi (accomodation), diferensiasi (diferentiaition) yang merupakan suatu proses dimana orang perorang di dalam masyarakat memperoleh hak-hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang lain dalam masyarakat atas dasar perbedaan usia, seks, dan pekerjaan. Diferensiasi tersebut menghasilkan sistem berlapis-lapis dalam masyarakat.

Tamotsu Shibutani mengedepankan pula beberapa pola interaksi yaitu: akomodasi dan situasi-situasi rutin, ekspresi pertemuan dan anjuran, interaksi strategis dalam pertentangan-pertentangan pengembangan perilaku massa.

Adapun proses interaksi yang pokok adalah :

1. Proses-proses asosiatif, meliputi :

a. Kerjasama (oooperation)

Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok yang dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorang atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk dan pola-pola kerjaasma dapat dijumpai pada semua kelompok manusia. Kerjasama timbul karena orientasi orang perorang terhadap kelompoknya (yaitu in-groupnya) dan kelompok lain (yang merupakan out-groupnya).

Kerjasama memiliki fungsi yang sangat penting, hal tersebut digambarkan oleh Charles Cooley sebagai berikut :

”Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.”

b. Akomodasi Kimball Young dan Raymond W mengemukakan akomodasi digunakan untuk menunjukkan pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses, sedangkan Gillin dan Gillin menjelaskan bahwa akomodasi adalah suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiologi untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama artinya dengan pengertian adaptasi.

Richard W Mack dan Kimball Young menyatakan akomodasi sebagai suatu proses mempunyai beberapa bentuk yaitu :

- Coercion, adalah suatu bentuk akomodasi yang prosenya dilaksanakan oleh karena adanya paksaan.
- Compromis, adalah suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutananya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.
- Arbitration, merupakan suatu cara untuk mencapai compromise apabila pihak-pihak yang brhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri.

- Mediation, pada mediation diundanglah pihak ketiga yang netral dalam soal perselisihan yang ada
- Conciliation, adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.
- Toleration, juga sering dinamakan tolerant-participation merupakan suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya.
- Stalemate, merupakan suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada satu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya.
- Adjudication, yaitu penyelesaian perkara atau nsengketa di pengadilan.

2. Proses Disosiatif

Proses-proses disosiatif sering disebut juga sebagai *oppositional processes*, persis halnya dengan kerjasama dapat ditemukan pada setiap masyarakat, walaupun bentuk dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat bersangkutan. Proses-proses disosiatif dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu :

a. Persaingan

Persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, dimana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan.

b. kontravensi

Kontravensi pada hakekatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontravensi terutama ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau satu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keragu-raguan terhadap kepribadian seseorang.

c. Pertentangan

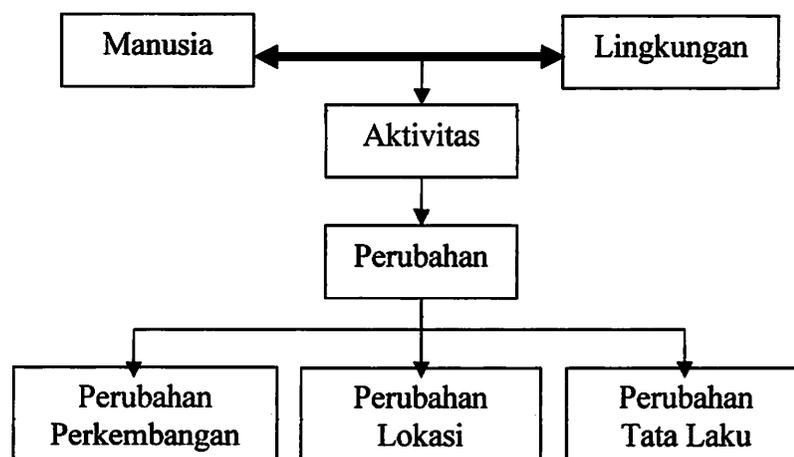
Sebab-sebab pertentangan antara lain adalah

- Perbedaan antara individu-individu
- Perbedaan kebudayaan
- Perbedaan kepentingan
- Perubahan sosial

Manusia baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok, hidup di dalam dan dengan lingkungannya. Dari hubungan yang erta dan timbal balik sifatnya, manusia menyesuaikan diri, memelihara serta mengelola lingkungannya. Dari hasil hubungan yang dinamik antara manusia dengan dengan lingkungannya itu dapat timbul suatu bentuk aktivitas atau kegiatan. Bentuk aktivitas ini menimbulkan beberapa perubahan, perubahan perkembangan, perubahan lokasi, dan perubahan tata laku.

Diagram 1.1

Hubungan Manusia-Lingkungan dan Perubahan



Di dalam menyesuaikan diri manusia terhadap lingkungannya dan dalam usaha mengelola lingkungan dapat terjadi perubahan sebagai berikut :

- a. Perubahan perkembangan, yakni perubahan yang terjadi setempat dimana perubahan-perubahan itu masih dapat dilaksanakan di tempat itu dengan tidak usah mengadakan perpindahan.

- b. Perubahan lokasi dari suatu unit kegiatan, yakni perubahan yang terjadi di suatu tempat yang mengakibatkan adanya suatu rencana atau gejala perpindahan sejumlah penduduk dari daerah itu ke daerah lain, karena daerah itu sendiri tidak mampu lagi mengatasi masalah yang timbul dengan sumber dan swadaya yang ada.
- c. Perubahan tata laku, perubahan ini merupakan perubahan sikap perilaku atau tat laku dari penduduk setempat dalam usaha menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di daerah tersebut. Dalam hal ini, dilaksanakan restrukturisasi dari seluruh pola kegiatan dalam daerah tersebut.

1.6.9. Stratifikasi sosial

Stratifikasi sosial menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat atau manusia pada umumnya. Menurut Petirim A. Sorikin, bahwa stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (secara hierarkis)⁴⁵

Dalam kehidupan masyarakat atau manusia pada umumnya selalu terdapat perbedaan status antara orang satu dengan yang lainnya. Ada yang mempunyai status sosial yang tinggi dan ada pula yang mempunyai status yang rendah dalam kehidupan masyarakat. Menurut konsep status sosial, bahwa di dalam kelompok masyarakat tertentu pasti di dalamnya terdapat beberapa orang yang lebih dihormati daripada orang yang lainnya. Status ekonomi, biasanya juga ada beberapa orang yang memiliki faktor ekonomi yang lebih tinggi daripada lainnya, begitu juga seterusnya bagi status-status lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat.

Hassan Shadily menyatakan bahwa pada umumnya lapisan dalam masyarakat menunjukkan keadaan senasib, dengan pemahaman ini kita mengenal lapisan yang terendah dan persamaan batin. Lapisan masyarakat mula-mula didasarkan pada perbedaan seks, perbedaan antara pemimpin dan yang dipimpin, pembagian kerja dan bahkan juga suatu perbedaan berdasarkan kekayaan.

⁴⁵ Rakhmat, Jalaludin., Psikologi Komunikasi, Tahun 2000, Hal.51

Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk mengolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah :⁴⁶

- a. Ukuran kekayaan (material)
- b. Ukuran kekuasaan
- c. Ukuran kehormatan
- d. Ukuran ilmu pengetahuan

Dalam status sosial biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam sistem kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut. Dengan adanya status seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya.

1.6.10. Karakter Masyarakat Nelayan

Kehidupan nelayan di Indonesia pada umumnya memprihatinkan dibandingkan dengan petani yang cepat meningkat taraf hidupnya, dimana kehidupan para nelayan selalu ketinggalan. Kendala yang dihadapi oleh golongan masyarakat ini adalah penghasilan nelayan yang relatif lebih kecil dibandingkan mata pencaharian lainnya. Kemiskinan tersebut tercermin pula pada rendahnya tingkat pendidikan para nelayan, dimana sebagian besar masyarakat tersebut berpendidikan rendah, karena pada umumnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat nelayan di Indonesia adalah lulusan sekolah dasar (SD) dan ada pula yang tidak tamat sekolah dasar. Selain itu juga pengetahuan dan ketrampilan yang rendah, penguasaan dan pemilikan teknologi alat-alat penangkap ikan yang terbatas dan masih sederhana.⁴⁷

Masyarakat nelayan memiliki status sosial yang berbeda-beda dengan berbagai tingkatan. Adapun strata sosial nelayan pada umumnya adalah :⁴⁸

- a. Nelayan Kaya A yang mempunyai kapal (juragan) sehingga memperkerjakan nelayan lain sebagai pandega tanpa ia sendiri harus ikut bekerja.

⁴⁶ Soekanto, Soerjono., Sosiologi Suatu Pengantar, Tahun 1990, Hal. 287

⁴⁷ Neptunus (Majalah ilmiah pembangunan dan pengembangan kelautan) Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Edisi 5 Universitas Hang Tuah Surabaya , Tahun 1996, Hal. 9

⁴⁸ Mubyarto, Soetrisno, L., dan Dove, M., Nelayan dan Kemiskinan, Tahun 1984, Hal.10

- b. Nelayan Kaya B yang memiliki kapal yang ia sendiri masih ikut bekerja sebagai awak kapal.
- c. Nelayan sedang merupakan nelayan yang kebutuhan hidupnya dapat ditutup dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan dan memiliki perahu tanpa memperkerjakan tenaga dari luar keluarga.
- d. Nelayan miskin yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan bekerja lain baik untuk ia sendiri atau untuk istri dan anak-anaknya.
- e. Nelayan pandega atau tukang kiteng.

Ditinjau dari budayanya sebagaimana masyarakat nelayan yang akrab dengan alam, di mana berbagai tantangan alam di perairan laut seperti angin , badai dan gelombang besar membuat para pelaut seakan-akan tidak berdaya. Pada gilirannya keadaan ini membuat kesadaran bahwa lam memiliki kekuatan yang tidak terlawan pada saat-saat tertentu membuat mereka pun mencari kekuatan batin yang lebih bersifat kepercayaan daripada pengetahuan yang rasional, hal tersebut diwujudkan melalui upacara selamatan laut.

Tradisi masyarakat nelayan di pantai berupa upacara laut tersebut sangat kental mereka hayati . Bentuk upacara sangat bervariasi untuk setiap lokasi pemukiman nelayan. Walaupun berkesan ke arah mistik. Tetapi intinya diperlukan ekspresi ritual kelompok masyarakat sebagai ucapan syukur kepada tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan keselamatan yang dilimpahkannya melalui persembahan sesajen yang dilarungkan di laut.

Selain tradisi setempat, masyarakat nelayan mempunyai beberapa kebiasaan melaut yang disesuaikan dengan jenis kapal penangkap ikan yang dioperasikan, yaitu:⁴⁹

- a. Nelayan melaut lima kali dalam seminggu (pada musim barat), dini hari berangkat dan siang hari pulang (umumnya menggunakan perahu motor tempel)
- b. Nelayan melaut tiga kali dalam seminggu , dengan lama di laut rata-rata 32 jam (menggunakan perahu motor)

⁴⁹ Ibid, Hal 27

- c. Nelayan melaut 3 kali sebulan dengan lama di laut satu minggu dan waktu istirahat di darat 2-3 hari untuk satu kali melaut (perahu motor besar)
- d. Umumnya waktu istirahat di darat digunakan untuk memperbaiki perahu, alat-alat penangkapan ikan dan mengusahakan warung.

Secara umum struktur masyarakat nelayan berdasarkan mata pencaharian terbagi atas nelayan juragan atau lebih dikenal dengan pemilik perahu, nelayan buruh atau juru mudi, serta bakul pembeli ikan hasil tangkapan.

1.6.11. Pengertian Lembaga Kemasyarakatan

Dalam pembangunan, masyarakat desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas peran serta dan swadaya gotong royong masyarakat. Atas dasar tersebut maka kesadaran, peran serta dan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama. Sehubungan dengan itu, untuk mewadahi aspirasi dan aktifitas segenap masyarakat di setiap desa atau kelurahan terdapat lembaga kemasyarakatan. Adapun pengertian dari lembaga kemasyarakatan adalah ;⁵⁰

Menurut Robert Mac Iver dan Charles H. Page

“Lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi.”

Menurut Leopold Von Wiese dan Howard Becker melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut fungsinya.

“Lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antara kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.”

Menurut Summer yang melihatnya dari sudut kebudayaan,

“Lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pentingnya adalah agar ada keteraturan dan integrasi dalam masyarakat.”

Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu ;⁵¹

⁵⁰ Soekanto, Soejono., Sosiologi Suatu Pengantar, Tahun 1990, hal. 218

⁵¹ R. Bintarto, Prof, Drs., Interaksi Desa Kota, hal 219

- a. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.

1.6.12. Lingkungan Fisik

Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda-benda hidup dan tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk tersebut.⁵² Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam faktor: pertama, oleh jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut; kedua, oleh hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu; ketiga, oleh kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup; keempat, oleh faktor non-materiil seperti suhu, cahaya, dan kebisingan.⁵³

Selanjutnya menurut Otto Soemarwoto, manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Dalam hal ini adalah lingkungan fisik dimana manusia bersangkutan hidup atau tinggal.⁵⁴

Lingkungan fisik dapat dibagi menjadi dua, 1) lingkungan alami (*natural environmet*) dan 2) lingkungan buatan (*built environment*). Lingkungan alami merujuk pada bentuk geografis seperti misalnya gunung, lembah, laut, serta kondisi seperti misalnya curah hujan, flora, fauna, dan sebagainya. Adapun lingkungan buatan merujuk pada hasil kreasi manusia seperti misalnya rumah, kota, komunitas, kawasan pertanian, dan sebagainya.⁵⁵

Lingkungan buatan mempunyai bermacam-macam kegunaan, seperti melindungi manusia dan kegiatan-kegiatan serta harta miliknya dari musuh-musuh berupa manusia, hewan dan dari kekuatan adikodrati. Fungsi lain juga untuk membuat tempat, menciptakan suatu kawasan aman yang berpenduduk dalam suatu dunia fana dan cukup berbahaya, menekankan identitas sosial dan

⁵² Otto Soemarwoto, Op. cit., hal. 48.

⁵³ Ibid., hal. 50-51.

⁵⁴ Otto Soemarwoto, Op. cit., hal. 51.

⁵⁵ T. Nirarta S., Op. cit., hal. 3.

menunjukkan status dan sebagainya. Lingkungan buatan menyampaikan makna-makna, memberikan kerangka ruang dan waktu untuk tindakan manusia dan perilaku yang tepat.⁵⁶

Untuk dapat memahami lingkungan hunian sebagai fenomena fisik akan menjadi lebih jelas jika karakter kultur, pandangan dan tata nilai masyarakat setempat digali dan ditemukan.

1.6.13. Sistem Nilai Budaya dan Sikap

Sistem nilai budaya merupakan bagian dari sistem budaya, yaitu aspek dari sistem gagasan. Dalam kaitan itu sistem nilai budaya adalah sejumlah pandangan mengenai soal-soal yang paling berharga dan bernilai dalam hidup,⁵⁷ karena itu disebut sistem nilai. Sebagai inti dari suatu sistem kebudayaan, sistem nilai budaya menjiwai semua pedoman yang mengatur tingkah laku warga pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Pedoman tingkah laku itu adalah adat-istiadat, sistem norma, aturan sopan-santun, pandangan hidup, idiologi pribadi.

Soal-soal yang paling tinggi nilainya dalam hidup manusia dan yang secara universal ada dalam tiap kebudayaan di dunia, menyangkut sedikitnya lima hal,⁵⁸ yaitu: 1) soal makna hidup manusia; 2) soal makna pekerjaan, karya dan amal perbuatan manusia; 3) persepsi manusia mengenai waktu; 4) soal hubungan manusia dengan alam sekitarnya; 5) soal hubungan manusia dengan sesama manusia. Kelima masalah yang bernilai dalam hidup inilah yang biasanya menjadi isi dari sistem nilai budaya dalam tiap kebudayaan di dunia. Persepsi dan konsepsi mengenai kelima masalah di atas bisa berbeda-beda dalam berbagai kebudayaan.

Nilai dapat dilihat sebagai variabel bebas dan variabel terikat.⁵⁹ Sebagai *variabel* bebas terhadap perilaku manusia, disini nilai sama fungsi psikisnya seperti sikap, kebutuhan-kebutuhan dan sebagainya yang mempunyai dampak luas terhadap hampir semua aspek perilaku manusia dalam konteks sosialnya. Sebagai variabel terikat terhadap pengaruh-pengaruh sosial budaya dari masyarakat yang

⁵⁶ *Ibid.* Pernyataan Amos Rapoport yang dikutip dari Snyder, 1979, hal. 5-6.

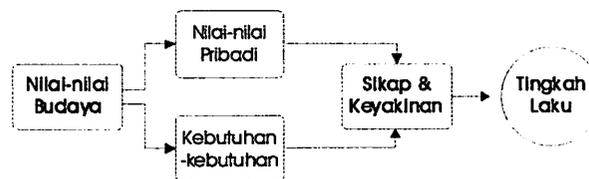
⁵⁷ Hans J. Daeng, loc. cit.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 47.

⁵⁹ Tri Dayakisni, Et al., Loc. cit. kutipan dari Dananjaya, 1986.

dihuni, yang merupakan hasil pembentukan dari faktor-faktor kebudayaan, pranata dan pribadi-pribadi dalam masyarakat tersebut selama hidupnya. Kaitan antara nilai, sikap dan perilaku dapat digambarkan sebagai berikut :

Diagram 1.2
Kaitan Antara Nilai, Sikap dan Tingkah Laku



Sumber : Danarjaya (1986), dikutip dari Tri Dayakini dan Sals Yuniardi (Psikolog Lintas Budaya, 2004: 50)

Diagram di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya berpengaruh pada nilai-nilai pribadi dan kebutuhan seseorang. Sedangkan nilai-nilai pribadi dan kebutuhan seseorang saling mempengaruhi. Keduanya mempengaruhi sikap dan keyakinan seseorang dan tingkah lakunya. Kebutuhan-kebutuhan seseorang lebih menentukan bagaimana perilaku yang akan terjadi.

Suatu sikap merupakan kecondongan yang berasal dari dalam diri individu untuk berkelakuan dalam suatu pola tertentu, terhadap suatu obyek, akibat pendirian dan perasaannya terhadap obyek tersebut. Suatu sikap terhadap obyek juga bisa dipengaruhi oleh unsur-unsur nilai budaya, artinya pendirian dan perasaan orang terhadap suatu pekerjaan, terhadap manusia lain, terhadap hewan atau benda yang dihadapinya. Suatu sikap juga bisa ditentukan oleh cara pandang umum masyarakatnya dalam menilai obyek bersangkutan. Suatu nilai budaya walaupun merupakan konsepsi yang abstrak, juga bisa mempengaruhi tindakan manusia secara langsung, bahkan juga bisa menyebabkan timbulnya pola-pola cara berpikir tertentu pada individu yang bersangkutan. Dalam kenyataan, suatu sistem budaya terperinci lagi ke dalam apa yang disebut norma-norma, yang merupakan tata kelakuan dan pedoman yang sesungguhnya untuk sebagian besar tindakan-tindakan manusia dalam masyarakat.⁶⁰

⁶⁰ Esti D. P., op. cit., hal 28-29.

1.7. Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran

Kerangka teori di dalamnya memuat batasan-batasan pengertian dari konsep pemberdayaan masyarakat berdasarkan tinjauan teori. Penjabaran definisi operasional dari konsep pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi acuan dalam membuat indikasi penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat. Setelah diketahui indikasi penyimpangan dari implementasi konsep pemberdayaan masyarakatnya, maka dapat dirumuskan variabel penelitiannya.

Kerangka pemikiran merupakan bagan alir atau runutan berpikir dari awal hingga akhir proses penelitian yang akan menjadi frame kerja.

1.7.1. Perumusan Variabel Penelitian

Mengacu kepada definisi sederhana dari kajian literatur Ambar Teguh Sulistiyani mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir yang telah diulas pada sub bab definisi judul penelitian di atas, maka pemberdayaan masyarakat pesisir adalah suatu proses peningkatan atau transfer sumberdaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir. Transfer atau pemberian di sini menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat, namun pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah maupun agen pembaharu. Karena pada batasan materi telah disebutkan bahwa fokus amatan dari penelitian ini adalah konsep proyek pemberdayaan yang diprakarsai oleh Wetlands International selaku agen pembaharu, maka variabel amatan pun dibatasi hanya kepada variabel-variabel pendukung dari agen pembaharu yakni aspek kelembagaan, sistem manajemen, aspek kinerja dan aspek penguasaan materi pemberdayaan.

Mengetahui bahwa pada konsep proyek pemberdayaan yang diprakarsai oleh Wetlands International merupakan praktek transfer sumberdaya dengan menggunakan pendekatan teknik PRA, maka sesuai dengan kajian literatur dari Studio Desain Komunikasi Pengembangan Masyarakat yang di dalamnya lebih menekankan pada penjabaran upaya pengadopsian metodologi pendekatan partisipatif khususnya PRA untuk bisa melihat sejauhmana metodologi pendekatan tersebut bekerja atau tidak bekerja dalam mengembangkan proses

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang di dalamnya memuat beberapa variabel amatan meliputi ; internalisasi partisipasi lembaga pengembang program (LSM), ketepatan gunaan program dan otonomi masyarakat. Untuk internalisasi partisipasi lembaga pengembang program merupakan satu cakupan bahasan dari variabel-variabel pendukung dari agen pembaharu yang telah diulas di atas.

Konsep pemberdayaan di sini merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik program pemberdayaan yang di dalamnya mencakup variabel tujuan, strategi, asas dan prinsip dari program pemberdayaan. Secara implisit memang tidak ada pengertian dari konsep yang menunjukkan bahwa konsep selalu mengacu kepada tujuan, asas, prinsip, serta strategi. Adanya variabel tujuan, strategi, asas dan prinsip disini menjadi penting karena dalam penelitian ini perlu variabel-variabel tersebut untuk mengetahui serta mengukur tujuan / target dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan.

Berikut merupakan definisi operasional dari konsep pemberdayaan, yang sekiranya bisa memberikan kerangka teori variabel yang cukup jelas. Di dalamnya memuat tentang pengertian konsep, tujuan, strategi, asas dan prinsip, kelembagaan, kemampuan managerial, tingkat kinerja, penguasaan materi dan otonomi masyarakat dari proyek pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus amatan.

Tabel 1.1
Kerangka Teori Variabel Pemberdayaan Masyarakat

Konsep Pemberdayaan	Definisi Operasional
Konsep	Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik,ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Konsep Pemberdayaan	Definisi Operasional
Tujuan	<p>Merupakan arah atau haluan yang telah ditentukan dalam suatu konsep</p> <p>Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.</p> <p>Parameter penilaiannya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap tahapan selalu berorientasi pada tujuan ▪ Setiap tahapan mempunyai target ▪ Tercapainya target pada setiap tahapan membentuk satu rangkaian yang berkesinambungan
Sasaran	<p>Kesesuaian bantuan program dengan kebutuhan masyarakat dilihat dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menginventarisir kebutuhan berdasarkan informasi masyarakat/kelompok ▪ Ada penentuan tingkat kebutuhan berdasarkan kesepakatan masyarakat/kelompok ▪ Ada penetapan skala prioritas penanganan kebutuhan masyarakat/kelompok ▪ Program yang ditawarkan merupakan bagian dari kebutuhan yang diprioritaskan ▪ Program yang ditawarkan merupakan skala prioritas tertinggi
Strategi	<p>Merupakan suatu perencanaan yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus</p> <p>Parameter untuk menentukan strategi yang baik adalah keberadaan program-program pemberdayaan yang memihak untuk membangun potensi dan kapasitas manusia dalam rangka membentuk manusia yang produktif secara ekonomi dan efektif secara sosial yang diukur dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian serta adanya kepekaan sosial masyarakat sehingga masyarakat jadi lebih peduli terhadap kegiatan pemberdayaan yang ada. Dengan kata lain strategi bisa dikatakan efektif bila masyarakat mengerti pesan yang diterimanya yang mencakup 3 tahapan strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi persuasif (upaya penyadaran), dilihat dari adanya bentuk-bentuk pembinaan yang meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pesan yang disampaikan mencakup kegiatan sosialisasi dan akses informasi. ▪ Strategi edukatif (mendidik), dilihat dari terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat. ▪ Strategi fasilitatif (memfasilitasi), dilihat dari terlaksananya bentuk-bentuk kegiatan pendampingan, seperti pemberian bantuan modal usaha, pembentukan kelompok, pertemuan clas action dan sebagainya, sebagai penunjang partisipasi masyarakat.
Asas dan Prinsip	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara kualitas mengacu kepada keberlanjutan ekologi dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik ▪ Secara kualitas mengacu kepada keadilan sosial yang mensiratkan pandangan tentang kejujuran dan pemerataan, persamaan hak dan kewajiban serta paham kemitraan.

Konsep Pemberdayaan	Definisi Operasional
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya efisiensi struktur kelembagaan ▪ Mempunyai gaya kepemimpinan / manajemen yang visioner ▪ Adanya diskresi dalam pengambilan keputusan
Kemampuan Manajerial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada aksesibilitas terhadap program-program pemberdayaan yang bersumber pada donor lain
Tingkat Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kemampuan untuk mencapai efisiensi, efektifitas, produktifitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan
Penguasaan Substansi /Materi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya penguasaan konsep dan implementasi tri daya (daya manusia, daya lingkungan dan daya ekonomi)
Otonomi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat mempunyai ruang yang lebar untuk menyampaikan ide, masukan, kritik, rasa keberatan, permintaan dan sebagainya tanpa merasa terbebani sanksi maupun ancaman / masyarakat bisa berbicara di depan publik. ▪ Adanya penghargaan dan pengakuan atas keberadaan, pikiran dan pandangan orang lain di masyarakat ▪ Masyarakat bisa mengakses informasi menyangkut berbagai aspek pembangunan lokal maupun nasional secara transparan ▪ Masyarakat terlibat dalam formulasi kebijakan dengan melihat nilai kepentingan masyarakat terhadap program pemberdayaan ▪ Masyarakat mampu mengembangkan modal usaha, baik individu, bersama / berkelompok, atau mengakses sumber dana lainnya dan kemampuan masyarakat untuk melakukan analisis biaya usaha dengan baik serta kemampuan mengembangkan pemasaran hasil produksinya paling tidak di tingkat lokal ▪ Masyarakat mampu mengembangkan pengertian tentang bentuk kemandirian secara personal maupun berkelompok.

*Sumber ; Kajian Teori
Hasil Pemikiran*

1.7.2. Indikasi Penyimpangan Implementasi Konsep Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan batasan pengertian konsep pemberdayaan masyarakat di atas, maka untuk mengetahui faktor-faktor yang terkait dengan penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat perlu mempunyai gambaran mengenai indikasi penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan itu sendiri. Dalam hal ini, analogi bahwa setiap program memiliki tolak ukur untuk menilai sejauhmana target program dapat dicapai. Segala bentuk kegiatan maupun aktifitas telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program pemberdayaan. Jadi segala sesuatu yang di luar ketetapan maupun yang tidak sesuai dengan ketetapan yang telah ada dianggap sebagai bentuk penyimpangan

dari implementasi program pemberdayaan, dengan kata lain merupakan bentuk non idealis dari kerangka teori konsep pemberdayaan yang telah dibuat di atas.

Sesuai dengan asumsi tersebut, berikut adalah indikasi penyimpangan dari konsep pemberdayaan :

1. Tujuan pemberdayaan yang tidak dititikberatkan kepada proses, namun mengutamakan hasil akhirnya saja.
2. Sasaran yang dituju adalah bantuan-bantuan yang berupa insentif serta tidak bersifat menumbuhkan sikap sadar dan peduli masyarakat terhadap pemberdayaan, dalam hal ini dikhususkan bagi orang-orang miskin secara umum (siapa saja).
3. Strategi yang digunakan belum cukup memberikan pengaruh positif karena masyarakat belum memahami dan mengerti maksud dari kegiatan yang dilakukan.
4. Tidak ada asas persamaan hak dan kewajiban serta kemitraan dalam implementasi konsep pemberdayaan
5. Tidak ada prinsip sustainable dan transparency dalam implementasi konsep pemberdayaan.
6. Kelembagaan masyarakat belum cukup kompatibel dengan pranata sosial yang ada serta belum bisa mewedahi semua aspirasi dan mewujudkan integrasi serta keteraturan dalam masyarakat
7. Peran fasilitator kurang efektif karena tidak mampu menjembatani komunikasi antar pelaku, tidak mampu memberikan dorongan (motivasi) dan semangat, tidak intens dalam pendampingan atau tinggal dekat masyarakat, dan tidak bisa memberikan pencerahan sehingga tidak tercipta dialog dan kerjasama yang sinergis.
8. Belum ada penguasaan konsep dan implementasi tri daya (daya manusia, daya lingkungan dan daya ekonomi) oleh fasilitator .
9. Penguatan kemandirian / otonomi masyarakat di bidang ekonomi, belum cukup berkemampuan untuk mengembangkan modal usaha, baik individu, bersama / berkelompok, atau mengakses sumber dana lainnya dan belum cukup berkemampuan untuk melakukan analisis biaya usaha dengan baik serta

belum cukup berkemampuan untuk mengembangkan pemasaran hasil produksinya paling tidak di tingkat lokal, serta belum cukup berkemampuan untuk mengembangkan pengertian tentang bentuk kemandirian secara personal maupun berkelompok.

Berdasarkan kajian teoritis terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi penyimpangan konsep pemberdayaan. Dalam hal ini variabel merupakan gejala yang menjadi fokus penelitian untuk diamati dan merupakan konsep yang diterapkan secara empiris atau fakta.

Berikut adalah penjabaran dari design penelitian yang di dalamnya berisi rangkaian keterkaitan dari sasaran, variabel amatan, metodologi penelitian sampai dengan output yang bisa dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Design Penelitian

No	Sasaran	Tinjauan Pustaka	Landasan Penelitian	Variabel Penelitian	Metodologi	Output	Sumber
1	Mengidentifikasi karakteristik masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karakter Sosial Ekonomi Masyarakat ▪ Karakter Sosial Kemasyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Stratifikasi sosial</i> menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat atau manusia pada umumnya. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (secara hierarkis) Dalam kehidupan masyarakat atau manusia pada umumnya selalu terdapat perbedaan status antara orang satu dengan yang lainnya. Ada yang mempunyai status sosial yang tinggi dan ada pula yang mempunyai status yang rendah dalam kehidupan masyarakat. Menurut konsep status sosial, bahwa di dalam kelompok masyarakat tertentu pasti di dalamnya terdapat beberapa orang yang lebih dihormati daripada orang yang lainnya. Status ekonomi , biasanya juga ada beberapa orang yang memiliki faktor ekonomi yang lebih tinggi daripada lainnya, begitu juga seterusnya bagi status-status lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. ▪ <i>Kelembagaan Masyarakat</i> Dalam pembangunan, masyarakat desa merupakan gerakan pembangunan yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mata pencaharian ▪ Tingkat pendidikan ▪ Tingkat pendapatan masyarakat ▪ Kebutuhan masyarakat ▪ Tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat ▪ Jumlah lembaga desa ▪ Jumlah kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deskriptif kualitatif ▪ Distribusi Frekuensi Relatif ▪ Deskriptif kualitatif ▪ Distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi sosial ekonomi masyarakat ▪ Potensi sosial budaya masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wawancara ▪ Quisioner ▪ Survey lapangan ▪ Wawancara ▪ Quisioner ▪ Survey

No	Sasaran	Tinjauan Pustaka	Landasan Penelitian	Variabel Penelitian	Metodologi	Output	Sumber
		an	<p>didasarkan atas peran serta dan swadaya gotong royong masyarakat. Atas dasar tersebut maka kesadaran, peran serta dan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama. Sehubungan dengan itu, untuk mewedahi aspirasi dan aktifitas segenap masyarakat di setiap desa atau kelurahan terdapat lembaga kemasyarakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sistem Nilai Budaya dan Sikap</i> Sistem nilai budaya merupakan bagian dari sistem budaya, yaitu aspek dari sistem gagasan. Dalam kaitan itu sistem nilai budaya adalah sejumlah pandangan mengenai soal-soal yang paling berharga dan bernilai dalam hidup, karena itu disebut sistem nilai. Sebagai inti dari suatu sistem kebudayaan, sistem nilai budaya menjiwai semua pedoman yang mengatur tingkah laku warga pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Pedoman tingkah laku itu adalah adat-istiadat, sistem norma, aturan sopan-santun, pandangan hidup, idiologi pribadi. Suatu sikap juga bisa ditentukan oleh cara pandang umum masyarakatnya dalam menilai obyek bersangkutan. Suatu nilai budaya walaupun merupakan konsepsi yang abstrak, juga bisa mempengaruhi 	<p>masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peran lembaga ▪ Peran kelompok masyarakat ▪ Bentuk hubungan masyarakat ▪ Aspirasi masyarakat ▪ Adat istiadat ▪ Budaya 	Frekuensi Relatif		lapangan

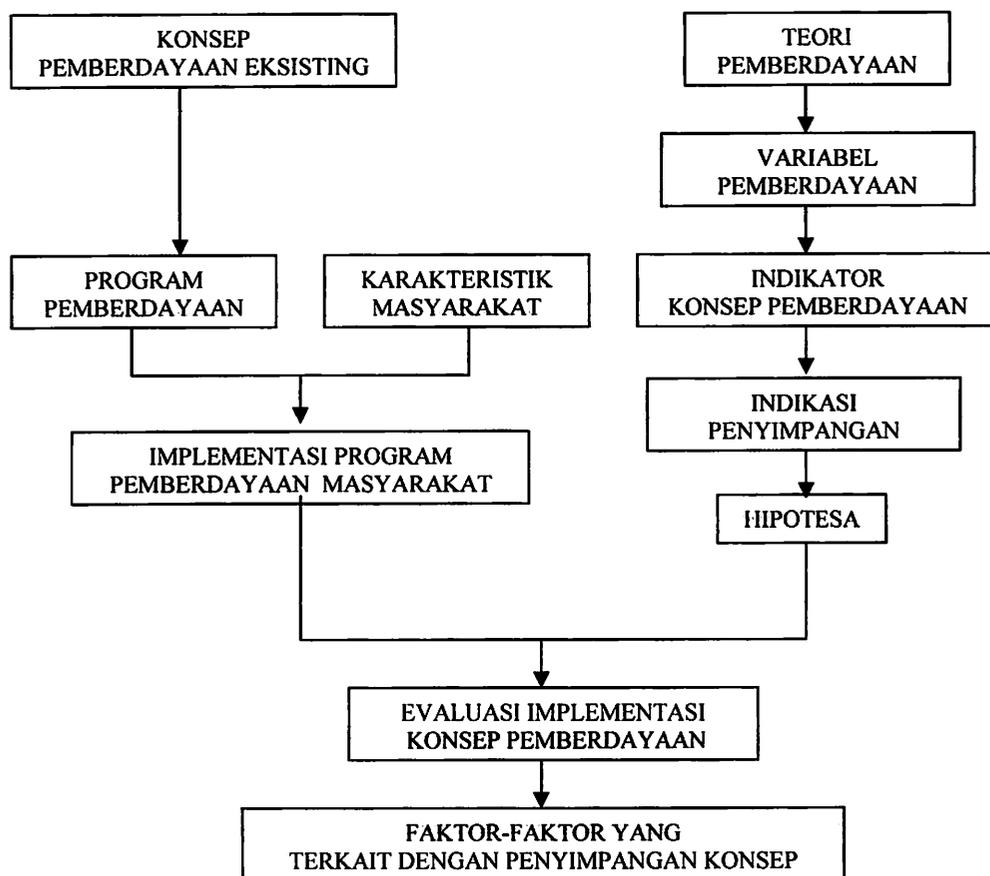
No	Sasaran	Tinjauan Pustaka	Landasan Penelitian	Variabel Penelitian	Metodologi	Output	Sumber
			tindakan manusia secara langsung, bahkan juga bisa menyebabkan timbulnya pola-pola cara berpikir tertentu pada individu yang bersangkutan.				
2	Mengidentifikasi konsep pemberdayaan masyarakat Desa Karangsong	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsep pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses ini mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan konsep, bertujuan untuk : mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan, kelengkapan strategi, ketepatan skenario dan kesesuaian program 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsep pemberdayaan eksisting ▪ Tujuan konsep ▪ Strategi konsep ▪ Skenario konsep ▪ Program-program turunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengetahui bentuk konsep pemberdayaan masyarakat berupa program turunan dari konsep pemberdayaan yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wawancara ▪ Survey lapangan

No	Sasaran	Tinjauan Pustaka	Landasan Penelitian	Variabel Penelitian	Metodologi	Output	Sumber
3	Mengidentifikasi bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan konsep pemberdayaan masyarakat di Desa Karangsong	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesesuaian antara konsep pemberdayaan eksisting dengan konsep yang dibutuhkan oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menginventarisir kebutuhan berdasarkan informasi masyarakat/kelompok ▪ Ada penentuan tingkat kebutuhan berdasarkan kesepakatan masyarakat/kelompok ▪ Ada penetapan skala prioritas penanganan kebutuhan masyarakat/kelompok ▪ Program yang ditawarkan merupakan bagian dari kebutuhan yang diprioritaskan ▪ Program yang ditawarkan merupakan skala prioritas tertinggi ▪ Adanya efisiensi struktur kelembagaan ▪ Mempunyai gaya kepemimpinan / manajemen yang visioner ▪ Adanya diskresi dalam pengambilan keputusan ▪ Ada aksesibilitas terhadap program-program pemberdayaan yang bersumber pada donor lain. ▪ Adanya kemampuan untuk mencapai efisiensi, efektifitas, produktifitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan. ▪ Adanya penguasaan konsep dan implementasi tri daya (daya manusia, daya lingkungan dan daya ekonomi) ▪ Fasilitator yang mampu berperan sebagai jembatan komunikasi antar pelaku, memberikan dorongan (motivasi) dan semangat, intens dalam pendampingan atau tinggal dekat dengan masyarakat, bisa memberikan pencerahan sehingga tercipta dialog dan kerjasama yang sinergis. ▪ Masyarakat mempunyai ruang yang lebar untuk menyampaikan ide, masukan, kritik, rasa keberatan, permintaan dan sebagainya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelembagaan yang kuat ▪ Kemampuan manajerial ▪ Tingkat kinerja ▪ Penguasaan substansi / materi pemberdayaan ▪ Otonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribusi frekuensi relative ▪ Deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentuk-bentuk penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat yang terjadi ▪ Pengujian hipotesa I, untuk membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comparasi dari kajian teori dengan hasil survey lapangan sasaran 1 dan 2 s

No	Sasaran	Tinjauan Pustaka	Landasan Penelitian	Variabel Penelitian	Metodologi	Output	Sumber
			<p>tanpa merasa terbebani sanksi maupun ancaman / masyarakat bisa berbicara di depan publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya penghargaan dan pengakuan atas keberadaan, pikiran dan pandangan orang lain di masyarakat ▪ Masyarakat bisa mengakses informasi menyangkut berbagai aspek pembangunan lokal maupun nasional secara transparan ▪ Masyarakat terlibat dalam formulasi kebijakan dengan melihat nilai kepentingan masyarakat terhadap program pemberdayaan ▪ Masyarakat mampu mengembangkan modal usaha, baik individu, bersama / berkelompok, atau mengakses sumber dana lainnya dan kemampuan masyarakat untuk melakukan analisis biaya usaha dengan baik serta kemampuan mengembangkan pemasaran hasil produksinya paling tidak di tingkat lokal ▪ Masyarakat mampu mengembangkan pengertian tentang bentuk kemandirian secara personal maupun berkelompok 				
4	Mengetahui faktor-faktor yang terkait penyimpangan pelaksanaan konsep pemberdayaan masyarakat di Desa Karangsong	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan antara variabel-variabel amatan dengan penyimpangan implementasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menganalisis konsekuensi-konsekuensi penerapan konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyimpangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktor-faktor yang terkait dengan penyimpangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regresi berganda dan korelasi parsial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengujian hipotesa ke II yang menguji seberapa besar keterkaitan antara variabel-variabel pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil analisa

No	Sasaran	Tinjauan Pustaka	Landasan Penelitian	Variabel Penelitian	Metodologi	Output	Sumber
		konsep yang terjadi				terhadap penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat	

Sumber : Tinjauan Literatur-Literatur dan Hasil Pemikiran

KERANGKA PIKIR

1.8. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori yang berhubungan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Ada penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat di Desa Karangsong.
2. Penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat (Y) mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik partisipan (X_1)
3. Penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat (Y) mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap integrasi orientasi tujuan program (X_2).
4. Penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat (Y) mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap kesesuaian bantuannya (X_3).
5. Penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat (Y) mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap kelengkapan strategi (X_4).
6. Penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat (Y) mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap kelengkapan asas dan prinsip (X_5).
7. Penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat (Y) mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap kelembagaan (X_6).
8. Penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat (Y) mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan manajerial (X_7).
9. Penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat (Y) mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kinerja (X_8).

10. Penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat (Y) mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap penguasaan materi (X_9).
11. Penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat (Y) mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap organisasi agen pembaharu (X_{10}).
12. Penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat (Y) mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap otonomi masyarakat (X_{11}).

1.9. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yakni metode pengumpulan data (investigasi) dan metode analisa. Dengan harapan bahwa penggunaan berbagai metode teknis di dalam dua kelompok tersebut secara konsisten, maka proses dan hasil studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bermanfaat.

1.9.1. Metode Pengumpulan Data (Investigasi)

Pengumpulan data dilakukan mulai dari tahap persiapan hingga pengumpulan data-data untuk kebutuhan analisa. Secara umum, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

1.9.1.1. Survey Primer

Survey primer merupakan cara penggalan data yang dilakukan secara langsung di lapang. Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan tentang gejala yang muncul pada lokus yang berhubungan fokus penelitian. Kegiatan survey primer dalam penelitian ini meliputi :

A. Observasi Lapangan

Observasi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan, untuk menangkap gambaran kondisi di lapang secara sensual. Terdapat dua macam observasi lapangan yang biasa digunakan, yaitu observasi terkontrol dan observasi tidak terkontrol. Namun dalam kepentingan penelitian ini, hanya

menggunakan observasi tidak terkontrol. Observasi tidak terkontrol adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data seperti ceklis, peta dasar, alat pemotret dan tabel-tabel. Informasi atau data-data yang akan dikumpulkan melalui observasi lapangan, sedikitnya antara lain:

- Potensi dan permasalahan yang ada di Desa Karangsong
- Karakteristik masyarakat Desa Karangsong
- Gambar-gambar kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Karangsong

B. Teknik Kuisisioner

Teknik kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membagi kuisisioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang dilengkapi dengan pilihan (*multiple choice*) yang memudahkan responden untuk menggali informasi-informasi maupun data-data mengenai karakteristik masyarakat sendiri sebagai responden, serta karakteristik program pemberdayaan sehingga dapat menjabarkan informasi maupun data yang relevan tentang tujuan survey. Untuk mendapatkan data primer dilaksanakan melalui kuisisioner yaitu metode pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan materi penelitian kepada responden yang telah dipilih. Jenis pertanyaan yang digunakan adalah jenis pertanyaan tertutup yang jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu (Singarimbun, 2006).

Pengukuran untuk masing-masing variabel digunakan Skala Likert dengan skala jawaban 1-5 (satu sampai dengan lima). Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap obyek. Penggunaan Skala Likert karena pertimbangan sebagai berikut: (1) mempunyai banyak kemudahan, (2) mempunyai reliabilitas yang tinggi dalam mengurutkan subyek berdasarkan persepsi, (3) fleksibel dibanding teknik lain, dan (4) aplikatif pada berbagai situasi. Skala Likert termasuk dalam skala interval dan dalam penelitian ini, jawaban dari tiap-tiap pertanyaan dihitung dengan cara menjumlahkan angka-angka dari pertanyaan sedemikian rupa sehingga jawaban yang berada dalam posisi yang sama akan menerima secara konsisten nilai angka yang sama pula.

Penilaian untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut: jawaban A nilainya 5, jawaban B nilainya 4, jawaban C nilainya 3, jawaban D nilainya 2, dan jawaban E nilainya 1.

C. Teknik Wawancara

Banyak hal yang tidak dapat diinterpretasikan dengan observasi langsung, untuk itu wawancara sangat penting artinya dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan terutama untuk mengetahui pendapat atau opini responden/informan secara lebih luas, atau menggali berbagai kemungkinan jawaban tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi.⁶¹ Dengan kata lain untuk mengumpulkan banyak informasi mengenai keadaan/aspek kehidupan masyarakat di lapang, terutama yang berkaitan dengan konsep-konsep dan program pemberdayaan yang akan dan sedang diimplementasikan. Dalam hal ini, teknik wawancaranya bersifat terbuka dengan maksud para responden mengetahui bahwa sedang diwawancarai serta mengetahui maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, wawancara ini termasuk dalam jenis wawancara terstruktur dengan maksud pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan tujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja.⁶² Dengan teknik wawancara, maka data yang berupa pendapat atau sikap penduduk terhadap gejala atau masalah yang sedang kita teliti dapat dilaksanakan. Pada pedoman wawancara inilah dituangkannya metode pendekatan, variabel dan item-item yang ingin diperoleh, yang mana pada pelaksanaannya pewawancara harus secara langsung berhadapan dengan orang yang dijadikan sumber data. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi selengkap mungkin, yang biasanya kurang tergali bila melalui cara penyebaran kuisioner.

Teknik wawancara ini ditujukan kepada :

- Masyarakat usia produktif

Masyarakat Desa Karangsong yang berusia 15 – 50 tahun, lebih dikhususkan pada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pesisir dan

⁶¹ *Ibid.*, hal. 79-84.

⁶² Prof. Dr. Lexy J. Moleong, MA, *Metologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Hal 189-190

bermata pencaharian yang berhubungan langsung dengan pengelolaan wilayah pesisir di Desa Karangsong, misalnya ; nelayan, petambak dan lain-lain.

- Tokoh-tokoh masyarakat.

Tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai sedikit pengetahuan lebih tentang potensi dan permasalahan di Desa Karangsong khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat, misalnya ; kepala Desa Karangsong, ketua-ketua forum diskusi masyarakat Desa Karangsong dan lain-lain.

- Instansi non pemerintah atau NGO terkait.

Instansi-instansi non pemerintah atau NGO yang ikut berperan serta secara langsung dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Karangsong NGO yang teridentifikasi melakukan kegiatan *empowerment* adalah Wetlands International.

1.9.1.2. Survey Sekunder

Survey sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggalian data tidak secara langsung kepada narasumber atau lapangan, melainkan dari data-data instansional, literatur, internet, dsb.

A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari kepustakaan yang relevan dengan apa yang sedang kita lakukan, dalam hal ini membutuhkan data teoritis, pendapat para ahli dalam berbagai bidang yang relevan dengan apa yang sedang kita kaji, konsep-konsep teoritis dan operasional tentang ketentuan penelitian.⁶³

Studi kepustakaan atau biasa juga disebut studi literatur, terutama dilakukan pada tahap persiapan. Penelaahan buku dilakukan untuk:

1. Merumuskan isu penelitian sebagaimana gejala yang nampak di lapang;
2. Mengumpulkan teori-teori yang berkaitan untuk menyusun tinjauan pustaka dan landasan teori;
3. Menemukan definisi-definisi dari berbagai konsep yang berkaitan, antara lain :

⁶³ Dr.Ir..Sugeng Budiharsono, Tenik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan

- Definisi konsep pemberdayaan
- Monitoring dan evaluasi program
- Indikasi-indikasi penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan
- Perumusan hipotesa
- Penentuan variabel-variabel pemberdayaan

B. Survey Instansi

Survey instansional merupakan teknik pengumpulan data dari instansi-instansi yang membidangi aspek-aspek atau sektor yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Data instansional dimaksud mencakup data numeric, peta-peta maupun berbagai bentuk data yang lain yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Desa Karangsong. Instansi yang umumnya akan dituju antara lain BPN, Bapeda, BPS, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan dan lain sebagainya.

1.9.2. Populasi Penelitian

Berdasarkan data monografi desa tahun 2005, jumlah penduduk menurut klasifikasi penduduk yang bermata pencaharian berhubungan dengan pesisir, misalnya ; nelayan, petambak mangrove dan lain-lainnya berjumlah 887 jiwa dari total keseluruhan populasi penduduk sebesar 4480 jiwa, berikut rincian penduduk yang bermata pencaharian pada sub sektor perikanan atau kenelayanan, dapat dilihat pada tabel 1.4

Tabel 1.3.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Pada Subsektor Perikanan / Kenelayanan
Tahun 2005

No.	Status	Jumlah (Jiwa)
1	Pemilik Kapal	32
2	Pemilik Tambak	89
3	Buruh Perikanan atau kenelayanan	766
	Jumlah	887

Sumber : Monografi Desa Karangsong Tahun 2005

1.9.3. Teknik Penentuan Sampel

Berikut adalah penjabaran mengenai teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian . Selain itu, menjelaskan besaran ukuran sampel yang dianggap cukup mewakili.

1.9.3.1. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sample. Melakukan penelaahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Karangsong melalui penilaian variabel-variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Karangsong. Penentuan sampel yang dijadikan responden untuk penelitian ini didasarkan pada parameter populasi dengan tingkat kepercayaan 95%.⁶⁴ Teknik ini digunakan untuk mengetahui kondisi sosial, budaya, ekonomi serta aspirasi masyarakat yang sangat berpengaruh pada penyusunan studi ini. Pemilihan teknik pengambilan sampel secara bertujuan (*purposive sample*) dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya karena adanya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar. Walaupun cara seperti ini diperbolehkan, yaitu bahwa peneliti bisa menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subject).
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.
- d. Memungkinkan kita untuk mencari sampel sesuai dengan kebutuhan kita⁶⁵

Alasan yang digunakan dalam penentuan sampling adalah populasi penelitian yang dibatasi pada masyarakat Desa Karangsong yang bermata

⁶⁴ HP Hill JL Roth dan H. Arkin, *Sampling in Auditing*, The Ronald Press, New York, 1962

⁶⁵ Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1963

pencaharian berhubungan dengan pesisir, misalnya ; nelayan, petambak mangrove dan lain-lainnya yang telah atau sedang mengikuti kegiatan pemberdayaan dikhususkan bagi nelayan yang terdaftar keanggotaannya sebagai kelompok masyarakat yang pernah mengikuti program pemberdayaan.

1.9.3.2 Ukuran Sampling

Dalam hal ini, teknik pengambilan sampel bertujuan untuk membatasi populasi hanya pada masyarakat Desa Karangsong yang telah atau sedang mengikuti kegiatan pemberdayaan dikhususkan bagi nelayan yang terdaftar keanggotaannya sebagai kelompok masyarakat yang pernah mengikuti program pemberdayaan.⁶⁶

Untuk mengetahui jumlah sampel yang dianggap cukup mewakili dapat menggunakan rumus :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Dimana :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = tingkat validitas yang diinginkan

Maka hasil perhitungan untuk banyaknya sampel yang dibutuhkan menurut rumus puslitbang di atas serta menggunakan derajat kepercayaan sebesar 10% adalah :

$$n = \frac{887}{887(0.1)^2 + 1} = 90 \text{ sampel}$$

⁶⁶ Dr.Ir..Sugeng Budiharsono, Tenik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan

1.9.4. Pendekatan Analisa

Tahapan analisa pada penelitian ini dapat digolongkan dalam metode deskriptif kualitatif, metode frekuensi distribusi relative serta metode analisa kuantitatif. Penjabaran lebih jelas bisa dilihat pada ulasan di bawah sebagai berikut :

1.9.4.1. Metode Deskriptif Kualitatif

Metode analisis deskriptif kualitatif ini berusaha untuk mengolah dan menginterpretasikan data dan informasi verbal. Adapun data yang diuraikan dalam metode ini adalah berupa gejala dan masalah yang bersifat kualitatif, sedangkan ketentuan analisisnya didasarkan pada logika dan hukum logika untuk menarik kesimpulan hasil penelitian secara logis. Informasi yang akan dituangkan dapat berupa gambar, bagan, diagram, potret dan peta. Hasil analisisnya berupa kesimpulan dari pengkajian masalah, berupa model-model verbal yang bersifat kualitatif.

Adapun analisa kualitatif ini digunakan untuk mengidentifikasi :

1. Karakteristik masyarakat Desa Karangsong
 - Potensi sosial budaya masyarakat (klasifikasi jumlah penduduk menurut mata pencaharian, usia produktif serta tingkat pendidikannya corak dan kultur masyarakat pesisir)
 - Potensi ekonomi (tingkat pendapatan dan pengeluaran masyarakat, serta tingkat pemenuhan kebutuhannya), termasuk di dalamnya kelembagaan masyarakat.
 - Cara pandang masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan
 - Motivasi masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan.
 - Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan
 - Proporsi masyarakat
 - Interaksi sosial masyarakat.
2. Karakteristik konsep pemberdayaan masyarakat di Desa Karangsong
 - Tujuan Konsep Pemberdayaan
 - Strategi Konsep Pemberdayaan
 - Asas Konsep Pemberdayaan

- Prinsip Konsep Pemberdayaan
- Kelembagaan

Dari keseluruhan hasil analisa kualitatif yang meliputi ; hasil studi kepustakaan, hasil survey instansi, hasil observasi lapangan dan hasil wawancara; maka dapat menggambarkan kondisi wilayah (berbagai aspek) dan meninjau konsep/program yang telah dan atau sedang dilakukan, berikut yang akan dilakukan di lapang berdasar konsep yang telah ada, sekaligus menggambarkan korelasi (evaluatif) antara gejala di lapang, konsep dan program yang dilakukan

Adapun langkah-langkah dalam menemukan dan menentukan faktor-faktor yang terkait dengan penyimpangan implementasi pemberdayaan di Desa Karangsong adalah sebagai berikut:

1. Fokus penelitian dirumuskan berdasarkan temuan awal dan studi literatur
2. Hasil observasi lapangan dan survey sekunder (berupa teori, tabel, uraian dan peta) digunakan untuk mengkaji karakteristik awal masyarakat, juga sekilas gambaran tentang kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang ada
3. Wawancara dengan para tokoh masyarakat dilakukan untuk mempertanyakan dugaan dan mendapatkan gambaran singkat mengenai konsep pemberdayaan dan dugaan penyimpangan yang terjadi.
4. Bentuk-bentuk penyimpangan dirancang berdasarkan definisi operasional penelitian dan dikembangkan melalui studi literatur;
5. Proses analisis dilakukan berdasarkan tema-tema amatan dengan cara mengkomparasikan pernyataan-pernyataan (data/informasi) dari narasumber berkaitan dengan kasus-kasus yang berhasil dikumpulkan.
6. Menemukan dan menetapkan sasaran *interview*, bisa sama atau mungkin berbeda dengan narasumber terdahulu, antara lain instansi pemerintah terkait yang berkompeten langsung terhadap kegiatan pemberdayaan, NGO yang teridentifikasi melakukan kegiatan *empowerment* yakni Wetlands International, ataupun tokoh masyarakat yang juga berkompeten dalam kegiatan pemberdayaan. Wawancara mendalam dilakukan kepada narasumber terpilih untuk melakukan ricek meliputi :

- a. Mencari keterangan lebih jelas mengenai kegiatan-kegiatan pemberdayaan serta kaitannya dengan dugaan penyimpangan.
- b. Menemukan motivasi dan kepentingan dari kegiatan pemberdayaan

Hal ini dilakukan mengingat, peristiwa-peristiwa yang muncul atau yang didapatkan dari kegiatan pengumpulan data hanyalah menunjukkan fakta-fakta (realitas). Fakta-fakta tersebut belum menggambarkan penyebab dari peristiwa fenomenal yang muncul. Peristiwa apa menyebabkan apa, dan bagaimana konsekuensi-konsekuensi dari hubungan antar peristiwa serta gejala-gejala yang ada di dalamnya adalah hal-hal yang (sedikitnya) harus ditemukan.

7. Mengkomparasikan kembali hasil analisa (meliputi keterkaitan antar kegiatan pemberdayaan dan pelaku) antara narasumber dan antara informasi hasil wawancara dengan hasil studi literatur (teori). Hal ini dilakukan untuk menjaga obyektivitas informasi, konsekuensi-konsekuensi dan mendefinisikan (penyesuaian) ulang tema penelitian. Pada saat bersamaan proses pencarian data di lapangan (kuisioner dan observasi) juga terus dilakukan
8. Menarik kesimpulan umum atau kesimpulan kecil mengenai indikasi penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan dan menggunakan kesimpulan tersebut sebagai pijak awal untuk merumuskan hipotesa.

Perumusan hipotesa menentukan variabel-variabel pemberdayaan yang kemudian akan dicari korelasi antar variabelnya dengan menggunakan uji statistik untuk pada akhirnya menemukan faktor-faktor yang terkait dengan penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan.

1.9.4.2. Metode Frekwensi Distribusi Relative

Hasil penyebaran kuisioner dianalisa dengan menggunakan metode *Distribusi Frekwensi Relative (%)*⁶⁷. Metode ini merupakan frekwensi yang dihitung dalam persen, yang diperoleh dengan membagi frekwensi responden

⁶⁷ Ronny Kountour, *Metode Penelitian Ilmiah*, Jakarta, PPM, 2003, hal 168

keseluruhan yang diambil sebagai sample kemudian dikalikan dengan 100 %. Berikut ini dapat dilihat rumus distribusi frekwensi :

$$df = \frac{n}{Tn} \times 100\%$$

Dimana : df = distribusi frekwensi

n = responden

Tn = total responden

Metode frekuensi distribusi relatif ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan menghitung prosentase jawaban responden, sehingga dapat diketahui kapasitas responden sesuai dengan variabel-variabel pemberdayaan yang terdapat di dalam quisioner. Selain itu, hasil perhitungan distribusi relatif ini juga digunakan sebagai acuan untuk menganalisa keterkaitan antar variabel-variabel pemberdayaan melalui uji statistik.

1.9.4.3. Metode Analisa Kuantitatif

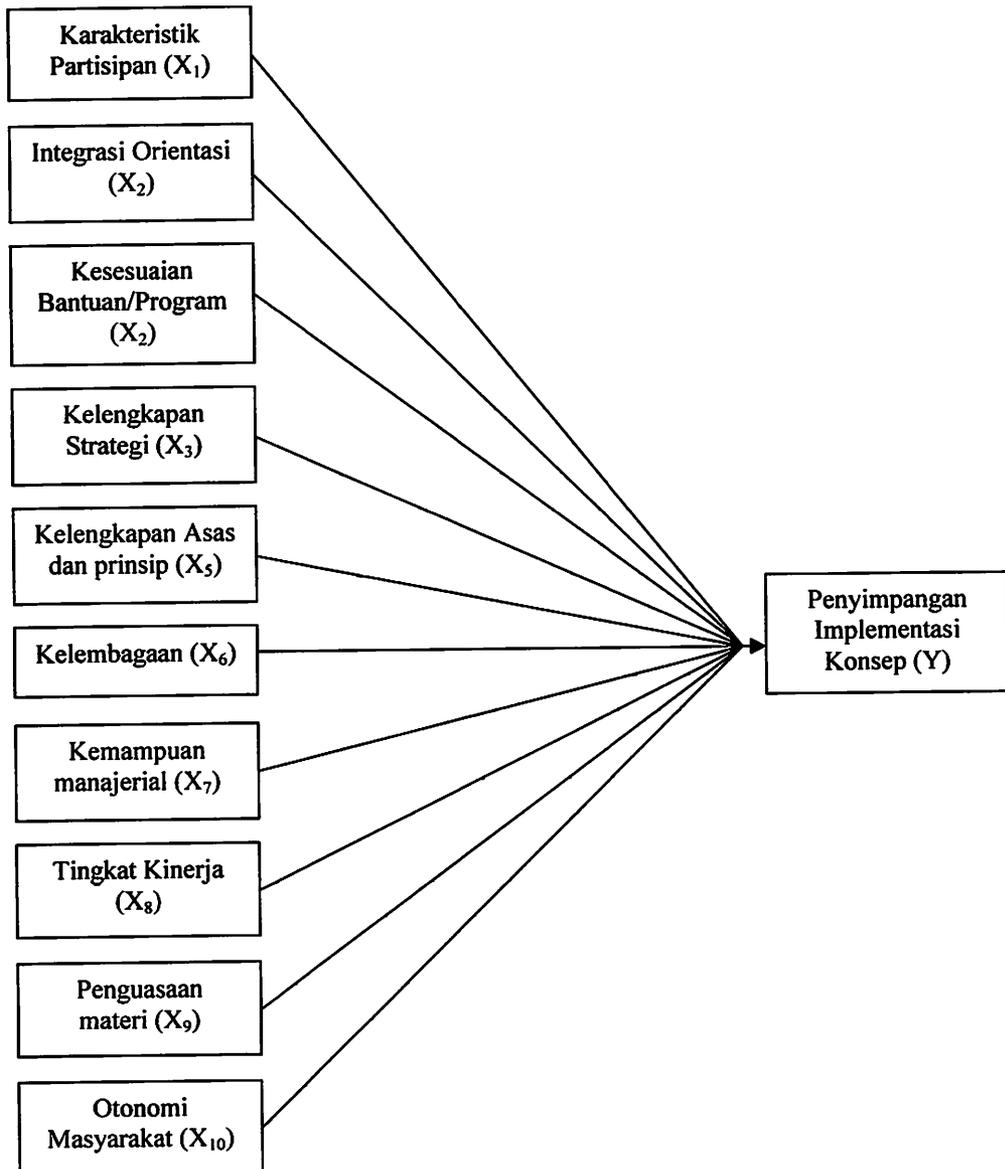
Berdasarkan hasil perumusan hipotesa pada tahap sebelumnya, penelitian ini juga menguji ada tidaknya hubungan antar variabel-variabel serta memeriksa arah dan kuatnya hubungan, maka digunakan analisis regresi dan korelasi. Rancangan uji regresi dimaksudkan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel X (X1,X2,X3,...dan sebagainya) terhadap variabel Y. Rancangan ini juga digunakan untuk melihat perbedaan besar kecil pengaruh variabel X (X1,X2,X3,...dan sebagainya) terhadap variabel Y.

Mengingat rumitnya dalam proses menghitung, maka untuk pengolahan dan perhitungan data akan digunakan bantuan komputer yaitu dengan bantuan program SPSS 10.0. Dengan bantuan program ini maka hasil perhitungannya dapat digunakan untuk menguji hipotesa.

Mengingat rumitnya dalam proses menghitung, maka untuk pengolahan dan perhitungan data akan digunakan bantuan komputer yaitu dengan bantuan program SPSS 10.0. Dengan bantuan program ini maka hasil perhitungannya dapat digunakan untuk menguji hipotesa.

Berdasarkan rancangan tersebut maka rancangan uji regresinya bisa dilihat pada diagram 1.2

Diagram 1.3
Rancangan uji regresi



Untuk menguji hipotesa yang menyatakan bahwa “ Penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap variabel-variabel pemberdayaan”, maka diuji menggunakan korelasi berganda dengan taraf nyata 5% dengan rumus :

$$R = \frac{\sum JK_R}{\sum JK_T} \quad (\text{Rangkuti, 1997 : 154})$$

Keterangan :

R = Koefisien korelasi berganda

JK_R = Jumlah kuadrat regresi

JK_T = Jumlah kuadrat total terkoreksi

Selanjutnya untuk mengetahui hubungan ini signifikan atau tidak, maka digunakan uji F-Test dengan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / k}{(1-R^2) - (n-k-1)} \quad (\text{Sugiyono, 1998:190})$$

Hubungan ini dapat dikatakan berarti signifikan bila F hitung > F- tabel dimana :

F = Pendekatan distribusi probabilitas

k = Banyaknya variabel bebas

R = Koefisien korelasi berganda

N = Besarnya sampel

Sedangkan hipotesis statistiknya sebagai berikut :

- H_0 : $R_{ij} : Y = 0$ (artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5,$ dan X_6 terhadap Y).
- H_a : $R_{ij} : Y > 0$ (artinya ada pengaruh yang bermakna dari variabel $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5,$ dan X_6 terhadap Y).

Kriterianya sebagai berikut :

- Ho diterima dan Ha ditolak apabila F hitung < F tabel
- Ha diterima dan Ho ditolak apabila F hitung > F tabel

Kegunaan korelasi berganda adalah untuk mengukur keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas (independen) dengan variabel tergantung (dependen).

Untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai pengaruh paling dominan, maka alat analisa yang dipakai adalah regresi berganda dan korelasi parsial.

a) Korelasi parsial

Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara satu sama atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat, dimana variabel bebas lain dianggap konstan dalam taraf tertentu ($\alpha = 5\%$), serta nilai r product moment dengan pearson untuk $df = 90$ adalah 0.205^{68} dengan rumus :

$$R_{YX_2X_1} = \frac{r_{YX_2} - (r_{YX_1})(r_{X_1X_2})}{\sqrt{(1 - r_{X_1X_2}^2)(1 - r_{YX_1}^2)}}$$

Untuk mengujinya digunakan uji t dengan rumus sebagai berikut :

$$t_h = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

th = pendekatan distribusi probabilitas

r = koefisien korelasi

n = banyaknya sampel

Sedangkan hipotesis untuk korelasi parsial statistiknya adalah sebagai berikut :

⁶⁸ Sudijono Anas, Prof, Drs, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, lampiran Hal. 402

- $H_0 : r_{Xi} \leq r_{Xij}$ (X_i mempunyai hubungan lebih kecil atau sama dengan variabel X yang lain)
- $H_a : r_{Xi} \geq r_{Xij}$ (X_i mempunyai hubungan paling kuat dibandingkan dengan variabel X yang lain)

Dengan kriteria ditetapkan sebagai berikut :

- H_0 diterima apabila t hitung $<$ t tabel dan H_a ditolak
- H_a diterima apabila t hitung $>$ t tabel dan H_0 ditolak

b) Regresi berganda

Untuk mengetahui ketetapan prediksi atau model hubungan maka dipergunakan metode analisis regresi berganda dengan rumus sebagai berikut⁶⁹ :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k$$

Dimana :

Y = Variabel tergantung

X = Variabel bebas

$X_1 \dots X_k$ = Jumlah variabel bebas

$\beta_1 \dots \beta_k$ = Parameter estimasi

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas X_1 , X_2 , dan X_3 ... X_{10} secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel terikat Y digunakan uji t . dengan nilai t_{tabel} untuk $n = 90$ adalah 1.99 ⁷⁰, dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{b}{Sb}$$

Dimana :

T = t hitung

B = koefisien regresi

⁶⁹Bungin Burhan, Prof, Dr, H.M, S.Sos.,M.Si., Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Prenada Media, Jakarta ; Kencana, 2005

⁷⁰ Sudijono, op. cit., lampiran Hal 404

Sb = standar error

Dengan kriteria ditetapkan sebagai berikut :

- Ho diterima apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan H_a ditolak
- H_a diterima apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan H_o ditolak

1.10. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang dari dipilihnya tema penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, definisi judul penelitian, lingkup pembahasan, tinjauan pustaka, landasan penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan menjadi isi dari bab ini.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Tinjauan wilayah studi dari berbagai aspek penting berkaitan dengan tema studi sekaligus gambaran umum konsekuensi atas kondisi dari berbagai aspek tersebut, serta konsep-konsep berikut implementasi pemberdayaan masyarakat terpapar dalam bab ini. Keduanya menjadi sub bab yang secara diskriptif menarasikan rangkaian data yang didapatkan dari hasil investigasi di Desa Karangsong dan wilayah lebih luas dalam kaitannya secara material.

BAB III PEMBAHASAN ANALISA

Menguraikan tentang hasil-hasil evaluasi serta perhitungan-perhitungan analisa yang menguji ada tidaknya hubungan antara variabel serta memeriksa arah dan kuatnya hubungan, maka digunakan analisis regresi dan korelasi menemukan faktor-faktor yang berkaitan serta mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel pemberdayaan terhadap penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di Desa Karangsong.

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan merupakan *output* dari hasil analisa yang berupa faktor-faktor yang terkait dengan penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Pada sub bab terakhir diuraikan juga mengenai hal-hal apa yang dapat dan seyogyanya dilakukan pada kawasan studi, berkaitan langsung maupun tidak dengan hasil penelitian, dan apa yang menjadi prasyarat bila hasil penelitian ini coba di aplikasikan (generalisasi) di lokus yang berbeda, sebagai suatu rekomendasi.

BAB II
GAMBARAN UMUM
DESA KARANGSONG KECAMATAN INDRAMAYU

2.1. Kebijakan Pemerintah Desa Karangsong No. 27 / 45 / 2019 / KepDes /IV / 2002 tentang Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Karangsong

Adapun dasar-dasar yang digunakan sebagai pertimbangan untuk membuat kebijaksanaan adalah sebagai berikut :

- a Bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara.
- b Bahwa pembangunan wilayah pesisir adalah pembangunan seluruh wilayah daratan dan perairan Indonesia dengan segenap sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- c Bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan dipandang perlu untuk menjaga kelestarian sumberdaya wilayah pesisir dan laut dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh sesuatu kegiatan di wialyah pesisir secara terpadu oleh dan untuk masyarakat dengan kerjasama aktif antara masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta.
- d Bahwa untuk pembangunan dan pengelolaan wialyah pesisir di tingkat desa, perlu dituangkan dalam suatu Keputusan Desa yang pengelolaannya dilakukan secara terpadu oleh seluruh masyarakat dan pemerintah di Desa Karangsong.

2.1.1. Isu-Isu Pembangunan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Karangsong

Isu-isu pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir di Desa Karangsong adalah sebagai berikut :

1. Abrasi pantai
2. Produktivitas budidaya ikan dan udang
3. Populasi udang liar
4. Suplai air tawar untuk tambak
5. Produktivitas nelayan
6. Peranan wanita dalam pengelolaan pesisir
7. Kualitas dan keamanan lingkungan
8. Pemberdayaan masyarakat

2.1.2. Visi Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Karangsong

Visi Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Karangsong adalah terciptanya masyarakat Desa Karangsong yang sejahtera melalui pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan.

2.2. Gambaran Umum Desa Karangsong

Desa Karangsong merupakan salah satu dari 6 desa pesisir yang ada di Kecamatan Indramayu. Desa ini terletak di sebelah timur Semenanjung Indramayu. Jarak desa dari pusat kecamatan sekitar 1 kilometer dan dari ibukota kabupaten sekitar 1,5 kilometer.

2.2.1. Kondisi Fisik Dasar

Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan potensi sumber daya alamnya dipengaruhi oleh letak administratif serta kondisi-kondisi fisik dasar yang meliputi kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, kondisi klimatologi serta keadaan vegetasinya.

2.2.1.1. Letak Administrasi Desa Karangsong

Desa Karangsong pada awalnya merupakan bagian dari Desa Pabean Udik. Tahun 1983 Desa Pabean Udik dipecah dari satu desa menjadi tiga desa, yaitu Desa Pabean Udik, Desa Brondong dan Desa Karangsong. Penamaan Desa Karangsong sendiri merupakan gambaran situasi pada saat awal perkembangan

desa. “*Karang*” artinya hamparan tanah dan “*Song*” diambil dari kata kosong. Dengan kata lain Karangsong awalnya adalah hamparan tanah yang masih kosong.

Adapun Desa Karangsong mempunyai batas administratif sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Pabean Udik
Sebelah selatan : Desa Singajaya
Sebelah barat : Kelurahan Paoman
Sebelah timur : Laut Jawa

Secara administratif Desa Karangsong terdiri dari 3 RW (rukun warga, yaitu RW I, RW II dan RW III. RW I dan RW II masing-masing terbagi ke dalam 5 RT (rukun tetangga), sedangkan RW III hanya terdiri dari 1 RT.

2.2.1.2. Kondisi Topografi / Kemiringan Tanah

Desa Karangsong merupakan daerah pantai dengan keadaan topografi relatif datar yang terbentuk dari endapan sedimen yang berasal dari sungai Cimanuk. Panjang pantai sekitar 3 kilometer dan berada pada ketinggian 0,5 meter dari permukaan air laut

2.2.1.3. Kondisi Jenis Tanah

Kondisi tanah di Desa Karangsong sebagian besar merupakan lahan yang penyebarannya sangat luas. Lahan basah ini selalu dipengaruhi oleh air pasang surut secara permanen dengan ketinggian air pasang mencapai ± 1 meter. Tanah di Desa Karangsong merupakan endapan pasir dan liat yang selalu jenuh air, mengandung sulfat dan karbon organik tinggi. Selain itu, merupakan bentukan dari endapan sungai dan laut. Tanahnya mengandung kadar garam yang cukup tinggi dan bersifat *hidromorf*.

2.2.1.4. Kondisi Hidrologi

Desa Karangsong merupakan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dibatasi dua sungai yaitu Sungai Cimanuk dan Sungai Prawirokepolo. Di antara kedua sungai tersebut terdapat sungai cabang yang melintasi Desa Karangsong

yaitu Sungai Prajagumiwang dengan kedalaman antara 0.61 – 0.85 meter dan lebar antara 13.33 – 50.00 meter.

2.2.1.5. Kondisi Vegetasi Hutan Mangrove

Pada saat ini keberadaan hutan mangrove alami di desa Karangsong hanya berupa tegakan yang tidak kontinu atau dalam kelompok-kelompok kecil. Tegakan mangrove tersebut terutama berada di sekitar muara sungai. Jenis dominan yang ditemukan adalah api-api (*Avicennia marina*) pada ingkat pohon. Pada beberapa bagian pantai terdapat tegakan mangrove hasil penanaman dengan jenis bakau, *Rhizophora apiculata* dan *Rhizophora mucronata*. Kedua jenis yang ditanam ini menghubungkan tegakan mangrove yang sebelumnya tidak kontinu menjadi kontinu. Selain di pantai, bakau hasil penanaman juga ditemukan di saluran-saluran air di daerah pertambakan dan di dalamnya beberapa tambak masyarakat.



Gambar 2.1
Tegakan-tegakan mangrove
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2005

2.2.1.6. Kondisi Klimatologi

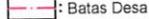
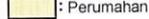
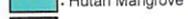
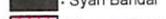
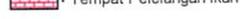
Desa Karangsong termasuk tipe iklim Aw. Tipe iklim Aw merupakan tipe iklim hujan tropis dengan musim basah yang kering yang mempunyai curah hujan tahunan di bawah 2500 mm, curah hujan pada bulan terkering lebih kecil dari 60

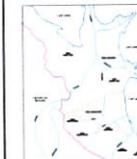
JUDUL PETA :

LAND USE DESA KARANGSONG

NO PETA : 2.1

LEGENDA :

-  : Jalan
-  : Sungai
-  : Daerah Pesisir
-  : Batas Desa
-  : Perumahan
-  : Tambak
-  : Dermaga
-  : Kantor Lurah
-  : Kantor
-  : Hutan Mangrove
-  : Syah Bandar
-  : Tempat Pelelangan Ikan



SUMBER PETA : KANTOR DESA DAN
SURVEY LAPANGAN

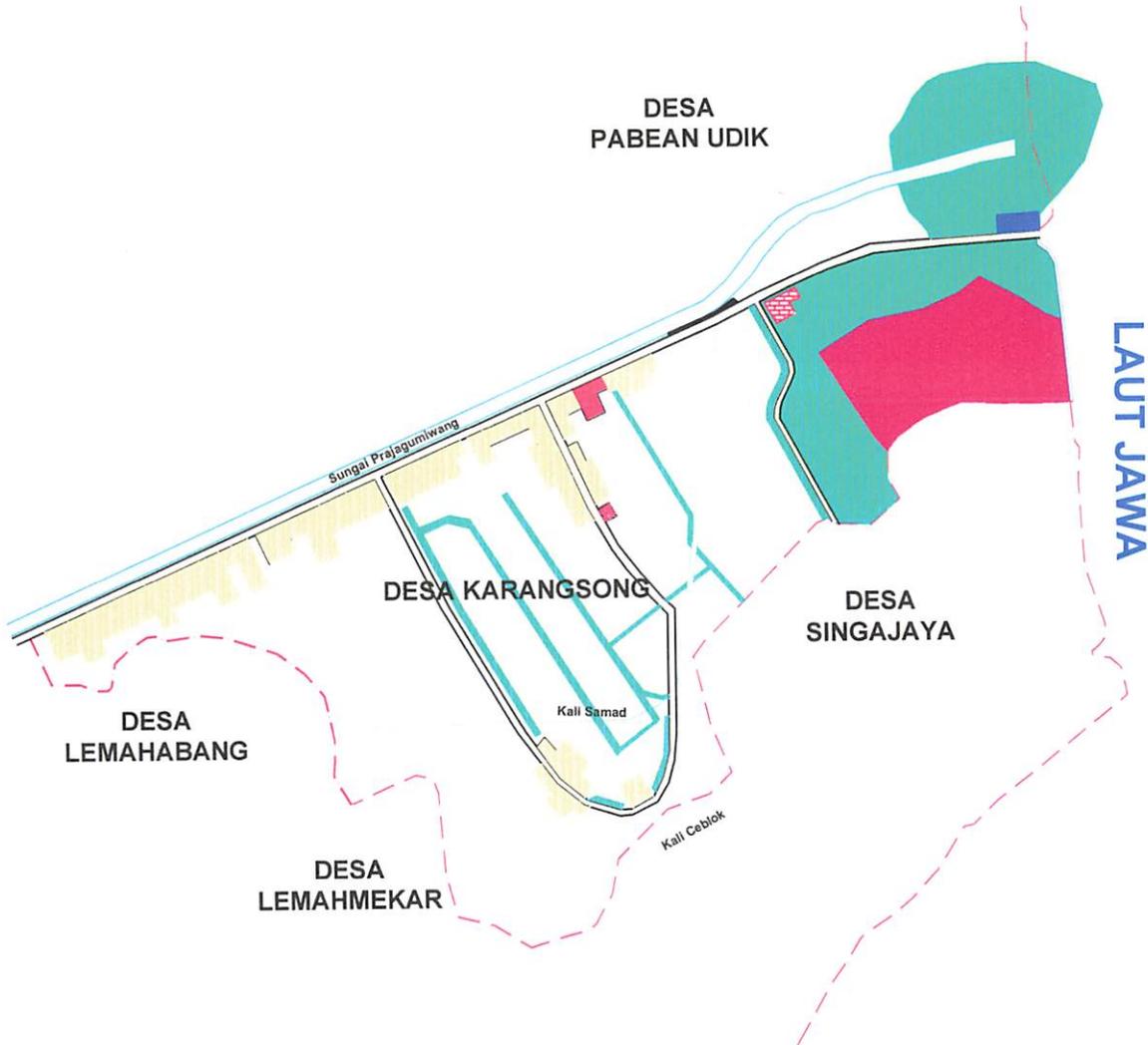
SKALA PETA :



STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR
DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU



TUGAS AKHIR
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2007



DESA KARANGSONG

mm serta suhu udara rata-rata bulanan terdingin lebih dari 18 °C dan suhu udara pada bulan terpanas lebih besar dari 22 °C.

2.2.2. Kondisi Fisik Binaan

2.2.2.1. Pola Penggunaan Lahan

Kondisi fisik binaan Desa Karangsong terkait dengan pola penggunaan lahannya. Pada tahun 2000, sawah di Desa Karangsong masih tercatat seluas 30 ha dan pada tahun 2004 hampir keseluruhan sawah tersebut dikonversi menjadi tambak. Saat ini sawah yang tersisa sudah tidak produktif lagi. Data monografi desa tahun 2004 menunjukkan bahwa luas tambak mencapai 201,917 ha, sedangkan lainnya adalah pemukiman seluas 35,862 ha, bangunan seluas 14,660 ha dan sawah seluas 2,750 ha. Gambaran penggunaan lahan Desa Karangsong bisa dilihat pada peta 2.1

2.2.2.2. Karakteristik Tempat Tinggal Masyarakat

Dilihat dari rumah yang ditempati, umumnya petani tambak memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup baik. Kepemilikan rumah umumnya antara 60-120 m² dengan tipe permanent, beratap genteng, berdinding tembok dan berlantai tegel/keramik. Sebagian besar rumah merupakan milik sendiri dan rata-rata mempunyai fasilitas kamar mandi dan WC sendiri. Hampir semua petambak memiliki sambungan listrik dan sebagian besar menggunakan ledeng dari PDAM untuk penyaluran air bersih.

Didesa Karangsong ini terdapat terdapat sebuah TPI yang merupakan sarana pemasaran hasil tangkapan ikan nelayan.

2.2.3. Aspek Sosial Budaya Masyarakat Desa Karangsong

Kondisi sosial budaya masyarakat sangat erat kaitannya dengan penduduk dan perilaku masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat akan selalu terjadi penambahan penduduk dan juga tingkat pendidikan maupun mata pencaharian masyarakat.

2.2.3.1. Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan penduduk

Jumlah penduduk Desa Karangsong tahun 2005 tercatat sebanyak 4490 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 940 KK dan kepadatan penduduk mencapai 175,20 jiwa/km². Jika dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Indramayu sebesar 1294,56 jiwa/km² dan di Kabupaten Indramayu sebesar 819 jiwa/km², maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepadatan penduduk di Desa karangsong masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat kepadatan penduduk ini disebabkan 79,12 % dari luas desa merupakan wilayah pertambahan.

2.2.3.2. Penduduk Menurut Komposisi Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan jumlah antara penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki hampir sama, yaitu 2138 jiwa (47,60 %) dan 2352 jiwa (52,38 %). Dari segi umur terlihat penduduk berusia antara 10-59 tahun merupakan penduduk yang dominan, yaitu sebanyak 2272 jiwa (50,6 %). Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indramayu tahun 2005, penduduk dalam golongan ini merupakan usia produktif atau usia yang aktif secara ekonomi.

TABEL 2.1
DISTRIBUSI PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN UMUR
DESA KARANGSONG
TAHUN 2005

NO	RW	KK	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JENIS KELAMIN		UMUR (TAHUN)		
				LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	0-9	10-59	< 59
1	I	488	2340	1257	1106	872	1173	246
2	II	419	2012	1036	953	797	1002	262
3	III	33	138	59	79	32	97	9
JUMLAH		940	4490	2352	2138	1701	2272	517

Sumber : Monografi Desa Karangsong Tahun 2005

2.2.3.3. Penduduk Menurut Agama

Desa Karangsong mempunyai jumlah penduduk yang semuanya memeluk agama Islam. Dan fasilitas peribadatan yang telah tersedia sudah sangat mencukupi. Terdapat mesjid 3 buah dan mushola 10 buah dengan kondisi yang cukup baik. Pembangunan dari fasilitas peribadatan ini berasal dari swamsembada

masyarakat sendiri. Kegiatan social yang dilakukan masyarakat adalah jami'an (pengajian) yang biasanya dilakukan setiap malam jum'at.



Gambar 2.2
Salah satu fasilitas peribadatan yang ada
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2005

2.2.3.4. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Seperti umumnya desa-desa lain di pantai utara Jawa, sebagian besar penduduk di Desa Karangsong bekerja sebagai buruh perikanan atau kenelayanan. Dari 766 orang, sebanyak 496 jiwa (64,75 %) merupakan *bidak* (anak buah kapal) pada kapal-kapal penangkap ikan di desa-desa tetangga, sedangkan sisanya 270 jiwa (35,25 %) merupakan nelayan kecil yang beroperasi di Desa Karangsong, sedangkan sebagai nelayan pemilik kapal sebesar 32 jiwa (2,89 %) dan sebagai nelayan pemilik tambak sebesar 89 jiwa (8.03 %). Dilihat dari jumlah kepemilikan perahu , sebanyak 25 jiwa merupakan pemilik perahu motor dan 7 jiwa merupakan pemilik kapal motor.

Petambak di Desa Karangsong terbagi dua, yaitu petambak pemilik dan petambak penyewa (penggarap). Jumlah petambak pemilik sebanyak 57 jiwa (64.04 %) dan petambak penyewa sebanyak 32 jiwa (35.95 %). Pedagang pada umumnya juga terbagi dua , yaitu pedagang (warung/toko) dan pedagang (bakul) ikan/udang. Jumlah bakul sebanyak 70 jiwa dan umumnya berada pada RW II. Di RW III yang merupakan kompleks perumahan pekerjaan penduduk umumnya sebagai PNS dan wiraswasta sebanyak 68 jiwa (6.14 %).

Di samping pekerjaan penduduk yang telah disebutkan di atas, sebagian dari perempuan di Desa Karangsong menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di berbagai negara, seperti Saudi Arabia dan Taiwan. Jumlah perempuan yang menjadi TKW pada tahun 2005 diketahui sebanyak 83 jiwa (7.49 %) dari perempuan yang berusia produktif.



Gambar 2.3
Aktifitas Petambak Desa Karangsong
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2005

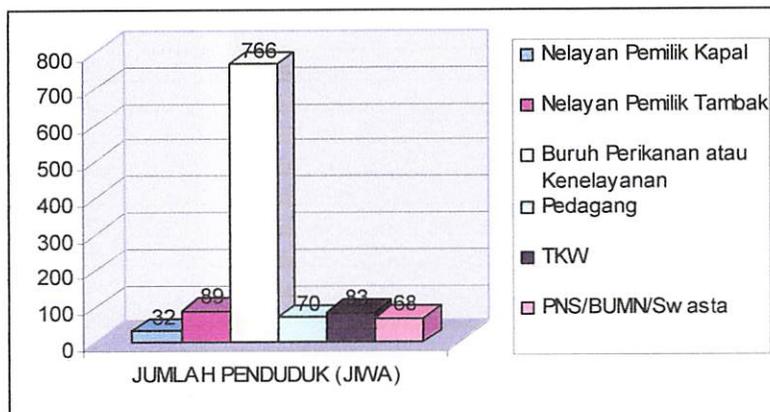
Pekerjaan penduduk secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 2.2
DISTRIBUSI PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN
DESA KARANGSONG
TAHUN 2005

NO	PEKERJAAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	PROSENTASE (%)
1	Nelayan Pemilik Kapal	32	2.89
2	Nelayan Pemilik Tambak	89	8.03
3	Buruh Perikanan atau Kenelayanan	766	69.13
4	Pedagang	70	6.32
5	TKW	83	7.49
6	PNS/BUMN/Swasta	68	6.14
JUMLAH		1108	100

Sumber : Monografi Desa Karangsong Tahun 2005

DIAGRAM 2.1
DISTRIBUSI PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN
DESA KARANGSONG
TAHUN 2005



2.2.3.5. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

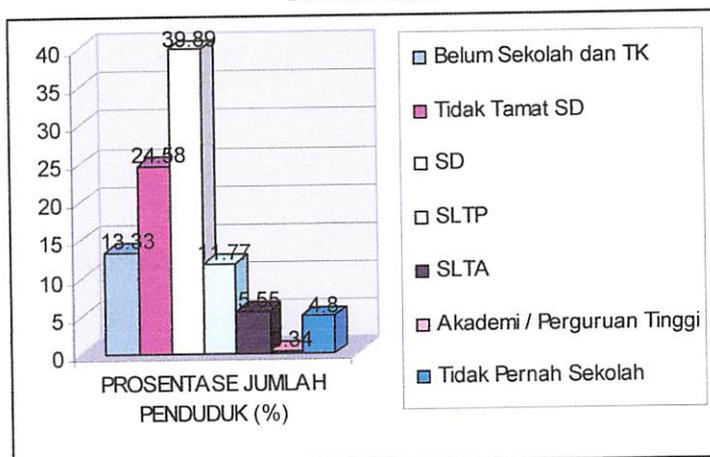
Tingkat pendidikan penduduk umumnya SD, yakni sebanyak 1791 jiwa (39.89 %). Walaupun secara umum tingkat pendidikan penduduk masih rendah, namun dari data terlihat cukup banyak penduduk yang tamat dari pendidikan lanjutan seperti SLTP, SLTA, bahkan sampai jenjang akademi/perguruan tinggi meskipun jumlahnya sedikit. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penduduk Desa Karangsong umumnya pernah mengenyam pendidikan. Adapun fasilitas pendidikan yang ada di Desa Karangsong adalah 2 buah sekolah dasar dan 3 buah madrasah. Tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 2.3
DISTRIBUSI PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
DESA KARANGSONG
TAHUN 2005

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	PROSENTASE (%)
1	Belum Sekolah dan TK	596	13,33
2	Tidak Tamat SD	1099	24,58
3	SD	1791	39,89
4	SLTP	526	11,77
5	SLTA	248	5,55
6	Akademi / Perguruan Tinggi	15	0,34
7	Tidak Pernah Sekolah	215	4,8
JUMLAH		4490	100

Sumber : Monografi Desa Karangsong Tahun 2005

DIAGRAM 2.2
DISTRIBUSI PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
DESA KARANGSONG
TAHUN 2005



2.2.3.6. Hubungan Sosial Masyarakat Desa Karangsong

Masyarakat nelayan memiliki status sosial yang berbeda-beda dengan berbagai tingkatan. Adapun strata sosial nelayan pada umumnya adalah :

- a. Nelayan Kaya A yang mempunyai kapal (juragan) sehingga memperkerjakan nelayan lain sebagai pandega tanpa ia sendiri harus ikut bekerja.
- b. Nelayan Kaya B yang memiliki kapal yang ia sendiri masih ikut bekerja sebagai awak kapal.
- c. Nelayan sedang merupakan nelayan yang kebutuh hidupnya dapat ditutup dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan dan memiliki perahu tanpa memperkerjakan tenaga dari luar keluarga.
- d. Nelayan miskin yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan bekerja lain baik untuk ia sendiri atau untuk istri dan anak-anaknya.
- e. Nelayan pandega atau tukang kiteng.

Ditinjau dari budayanya sebagaimana masyarakat nelayan yang akrab dengan alam, di mana berbagai tantangan alam di perairan laut seperti angin, badai dan gelombang besar membuat para pelaut seakan-akan tidak berdaya. Pada gilirannya keadaan ini membuat kesadaran bahwa lam memiliki kekuatan yang

tidak terlawan pada saat-saat tertentu membuat mereka pun mencari kekuatan batin yang lebih bersifat kepercayaan daripada pengetahuan yang rasional, hal tersebut diwujudkan melalui upacara selamatan laut.

Tradisi masyarakat nelayan di pantai berupa upacara laut tersebut sangat kental mereka hayati . Bentuk upacara sangat bervariasi untuk setiap lokasi pemukiman nelayan. Walaupun berkesan ke arah mistik. Tetapi intinya diperlukan ekspresi ritual kelompok masyarakat sebagai ucapan syukur kepada tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan keselamatan yang dilimpahkannya melalui persembahan sesajen yang dilarungkan di laut.

Selain tradisi setempat, masyarakat nelayan mempunyai beberapa kebiasaan melaut yang disesuaikan dengan jenis kapal penangkap ikan yang dioperasikan, yaitu:

- a. Nelayan melaut lima kali dalam seminggu (pada musim barat), dini hari berangkat dan siang hari pulang (umumnya menggunakan perahu motor tempel)
- b. Nelayan melaut tiga kali dalam seminggu , dengan lama di laut rata-rata 32 jam (menggunakan perahu motor)
- c. Nelayan melaut 3 kali sebulan dengan lama di laut satu minggu dan waktu istirahat di darat 2-3 hari untuk satu kali melaut (perahu motor besar)
- d. Umumnya waktu istirahat di darat digunakan untuk memperbaiki perahu, alat-alat penangkapan ikan dan mengusahakan warung.

Secara umum struktur masyarakat nelayan berdasarkan mata pencaharian terbagi atas nelayan juragan atau lebih dikenal dengan pemilik perahu, nelayan buruh atau juru mudi, serta bakul pembeli ikan hasil tangkapan. Hubungan sosial antar sesama nelayan dapat di kelompokkan menjadi hubungan antar nelayan, hubungan antar nelayan dengan juragan, dan hubungan antar tetangga sesama nelayan. Hubungan sosial seperti itu berlaku baik untuk nelayan kelompok maupun nelayan perorangan.

Hubungan sosial antar sesama nelayan dapat dikatakan sangat baik dan akrab. Kegiatan tolong-menolong kenelayanan juga tampak menonjol di kalangan masyarakat Desa Karangsong. Apabila ada salah seorang nelayan yang

mengalami musibah baik di laut maupun di darat selalu memperoleh pertolongan secara spontan dari temannya. Nelayan ini benar-benar mempunyai kerjasama dan kekompakan yang cukup baik. Dalam hubungan kerja antar nelayan dapat dikatakan mereka saling mempercayai. Diantara nelayan tidak ada campur tangan dalam hal kerja, sebab di antara mereka mempunyai tugas masing-masing yang cukup jelas.

Hubungan sosial antara nelayan dan juragan terwujud tidak hanya pada hubungan kerja saja, melainkan juga dalam hubungan tolong-menolong. Hubungan tersebut terjadi ketika nelayan kehabisan uang. Nelayan dapat berhutang kepada juragan. Dan kebanyakan sudah berlaku seperti demikian.

Hubungan sosial yang terjadi antara nelayan dengan masyarakat sekitar terwujud tidak saja pada tetangga terdekat melainkan juga hubungan dengan tetangga tingkat RT, khususnya seprofesi sebagai nelayan.

Dalam lingkungan tempat tinggal para nelayan terdapat pula organisasi sosial, seperti arisan dan mengaji. Umumnya kegiatan ini hanya dilakukan oleh para istri dan anak-anak karena para nelayan harus melakukan aktivitasnya dilaut. Perkumpulan arisan dilakukan sebulan sekali sedangkan untuk pengajian dilakukan dua kali dalam seminggu. Sementara itu pengajian untuk anak-anak terutama yang belum bekerja hampir dilakukan setiap malam, bertempat di masing-masing musholla.

2.2.3.7. Kegiatan Sosial Masyarakat Desa Karangsong

Kegiatan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kegiatan sosial, partisipasi masyarakat sangat berperan didalamnya. Bahwa kegiatan dalam partisipasi merupakan kegiatan usaha bersama. Kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Karangsong ini cukup banyak, baik terorganisasi secara formal maupun tidak. Kegiatan sosial yang terorganisasi secara formal antara lain PKK, Karang Taruna dan organisasi nelayan. Sedangkan kegiatan sosial yang tidak terorganisasi secara formal antara lain arisan, pengajian, gotong royong, siskamling dan kerja bakti.

Melalui organisasi PKK ini peranan wanita dapat dimobilisasi secara maksimal. Akan tetapi di Desa Karangsong organisasi PKK ini belum berkembang sebagaimana mestinya. Kegiatan utama dan sangat menonjol adalah arisan dan pengajian yang berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat nelayan di Desa Karangsong bervariasi pada umumnya dalam kehidupan sosialnya masih berpegang teguh pada tradisi gotong royong. Karena kehidupan masih mengandalkan dirinya pada bidang kenelayan yang umumnya cukup baik, maka kesadaran akan tradisi juga nampak sekali tercermin dalam aktivitas kenelayan. Selain itu kepatuhannya kepada perangkat desa dan tokoh desa masih sangat tinggi, sehingga perilaku saling hormat dan gotong royong dalam kegiatan desa juga berkembang dengan baik.

Meskipun masalah tradisi kerukunan dan gotong royong terbina dengan baik dalam perilaku kehidupan masyarakat di Desa Karangsong, namun berkaitan dengan pola kehidupan yang mengandalkan bidang kenelayan sebagai penopang utama kehidupan ekonominya seringkali masih juga muncul berbagai masalah. Tekanan yang sering menimpa mereka seperti datangnya awal musim ikan dan akhir musim ikan, yang menyebabkan mereka hanya menghasilkan ikan sedikit sering menimbulkan kesulitan dan kekurangan.

2.2.3.8. Kehidupan Budaya Masyarakat Desa Karangsong

Manusia yang beradab tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan yang mencerminkan eksistensi dari tata nilai masyarakatnya. Kebudayaan dan kehidupan masyarakat merupakan dua dunia yang saling terkait dan sulit dipisahkan. Di dalam suatu tatanan hidup masyarakat, berkembang kebudayaan dan tata nilai selalu terjadi sedemikian rupa. Hal ini terjadi sejalan dengan perubahan waktu serta masalah yang mencuat di dalam dinamika kehidupan masyarakat yang dinamis. Seperti halnya masyarakat pada Desa Karangsong yang menggunakan ajaran Islam sebagai landasan perkembangan kebudayaannya sehingga membentuk kriteria dan karakter sendiri. Misalnya saja, mereka selalu mengadakan suatu tradisi yang masih berkembang sampai saat ini dikalangan nelayan adalah upacara nadran. Upacara ini adalah acara sedekah laut yang

mencerminkan rasa terima kasih nelayan atas rejeki yang didapatnya dari hasil laut. Biasanya upacara diadakan setiap tahun dan jatuh pada bulan tujuh atau delapan. Hal ini merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang telah didapatkan. Masyarakat Permukiman Nelayan di Desa Karangsong juga sangat menyenangi kesenian daerah yang bernafaskan Islam, seperti hadrah atau samrohan.

2.2.4. Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Karangsong

Kondisi ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh mata pencaharian sehari-hari dalam hal ini yaitu nelayan. Disamping itu juga tingkat pendidikan masyarakatnya. Kegiatan masyarakat yang didominasi oleh karakter nelayan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakatnya terutama yang terkait dengan pendapatan masyarakat.

Seperti diketahui rata-rata tingkat pendidikan masyarakatnya adalah Sekolah Dasar dan hampir semua penduduk mempunyai tingkat pendidikan yang masuk dibawah rata-rata. Untuk mata pencaharian juga sama halnya, sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Dimana untuk hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi alam. Terdapat 2 kali musim ikan dalam periode 1 tahun selama melakukan penangkapan ikan, yaitu :

- **Musim Normal**

Musim ini terjadi pada bulan April - Agustus dan bulan Oktober – Desember. Pada musim ini nelayan lebih banyak mendapatkan ikan karena tidak terpengaruh cuaca buruk sehingga ikan-ikan dengan mudah ditangkap. Dan ini sangat berpengaruh terhadap banyaknya hasil jual.

- **Musim Ombak besar**

Pada musim ombak besar nelayan mengalami hambatan dalam mencari ikan karena cuaca yang buruk, ombak yang besar, angin kencang dan hujan deras. Dan karena itu nelayan mengalami kesulitan dalam mencari ikan.

2.2.4.1. Pendapatan Masyarakat Nelayan Rata-rata Tiap Bulan

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi ekonomi berdasarkan tingkat pendapatan dapat dilihat pada tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Kondisi Ekonomi Masyarakat
Berdasarkan Tingkat Pendapatan (Nelayan)

Jenis Kapal	Tingkat Pendapatan (Bersih)	Keterangan
Nelayan Kapal Kecil ▪ Melaut setiap hari	Rp. 15.000 – Rp. 25.000/Per hari/orang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 kapal biasanya terdiri dari 2 orang. ▪ Memerlukan biaya Rp. 250.000 sekali jalan/melaut.
Nelayan Kapal Sedang ▪ Melaut setiap hari	Rp. 30.000/Per hari/orang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 kapal biasaya terdiri dari 4 orang ▪ Pengeluaran sekali melaut Rp. 400.000
Nelayan Kapal Besar ▪ Melaut 15 hari sekali	Rp. 1.000.000 - Rp.3.000.000 /bulan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 kapal biasanya terdiri dari 30 orang ▪ Pengeluaran sekali melaut Rp. 1.000.000

Sumber : Hasil Wawancara

Disamping tingkat pendapatan yang pasti dari nelayan terdapat pendapatan yang didapat dari kerja sampingan. Selain sebagai nelayan biasanya masyarakat juga memperoleh pendapatan sampingannya dengan membuka warung, , menjadi kuli bangunan dan lain-lain. Pendapatan yang diterima berkisar antara Rp. 50.000 – Rp. 100.000. Dan dari 90 kuisisioner yang telah disebarkan 50 orang atau 55,56 % berpenghasilan berkisar antara Rp. 250.000 – Rp. 499.000, 24 orang atau 26,67% berpenghasilan sebesar < Rp. 250.000, 10 orang atau 11,11 % berpenghasilan antara Rp.5300.000 – Rp. 1.000.000 dan 6 orang atau 6,67 % berpenghasilan > 1,000,000/bulan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.5
Pendapatan Rata-rata Per bulan Masyarakat
Desa Karangsong

Pendapatan Rata-rata	Responden (Jiwa)	Prosentase (%)
< 250,000/bulan	24	26,67
250,000 - 499,000/bulan	50	55,56
500,000 - 1,000,000/bulan	10	11,11
> 1,000,000/bulan	6	6,67

Sumber : Hasil Kuisisioner

2.2.4.2. Pengeluaran Masyarakat Nelayan Rata-rata Tiap Bulan

Pengeluaran masyarakat nelayan sangat berpengaruh pada kebutuhan yang dapat dibeli oleh masyarakat. Untuk kebutuhan diprioritaskan untuk kebutuhan makan sehari-hari, biaya sekolah anak, untuk perbaikan kapal dan untuk membeli peralatan menangkap. Jika ada sisa dari pendapatan, maka mereka baru bisa mempergunakan untuk memperbaiki rumah, belanja, dan menabung. 20-50% dari penghasilan bersih dikembalikan untuk modal kerja nelayan atau tambak

Dalam hal ini tidak ada pengeluaran khusus, kecuali untuk kegiatan gotong royong kebersihan dan keamanan sekitar 5000 sampai 10000. Biaya penghijauan biasanya dibantu oleh pemerintah dan LSM

Berdasarkan hasil kuisisioner, sebanyak 45 orang atau 50 % rata-rata pengeluaran tiap bulan sebesar < Rp. 500.000, sebanyak 34 orang atau 37,78 % sebesar Rp. 500.000 – Rp. 1 juta, sebanyak 11 orang atau 12,22 % berkisar > 1 juta Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Pengeluaran Rata-rata Per bulan Masyarakat
Desa Karangsong

Pengeluaran Rata-rata Tiap Bulan	Responden (Jiwa)	Prosentase (%)
<500 ribu	45	50
500 ribu – 1 juta	34	37.78
> 1 juta	11	12.22
Jumlah	90	100

Sumber : Hasil Kuisisioner

2.2.5. Aspek Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan masyarakat, yaitu suatu organisasi formal maupun informal yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan, di Desa Karangsong sebanyak 6 buah. Kelembagaan formal terdiri dari BPD (Badan Perwakilan Desa), 3 kelompok petambak yaitu ; kelompok, bina sejahtera dan rahayu serta 1 kelompok nelayan, yaitu pelagis. Sedangkan kelembagaan informal yang ada adalah kelembagaan pedagang – nelayan / pedagang – petambak. Namun demikian, sebagian besar nelayan menjual hasil tangkapannya ke pedagang karena adanya ikatan hutang piutang. Sampai saat ini fasilitas kredit dari lembaga keuangan formal masih belum menjangkau nelayan maupun petambak sehingga ketergantungan terhadap pedagang sangat tinggi. Dalam memberikan pinjaman, pedagang memberikan persyaratan yang sangat fleksibel, yaitu tidak membatasi waktu pinjaman maupun jaminan. Persyaratan yang diberikan hanyalah setiap hasil tangkapan harus dijual kepada mereka seperti yang dijelaskan diatas.

2.3. Profil Wetlands International Indonesia Programme

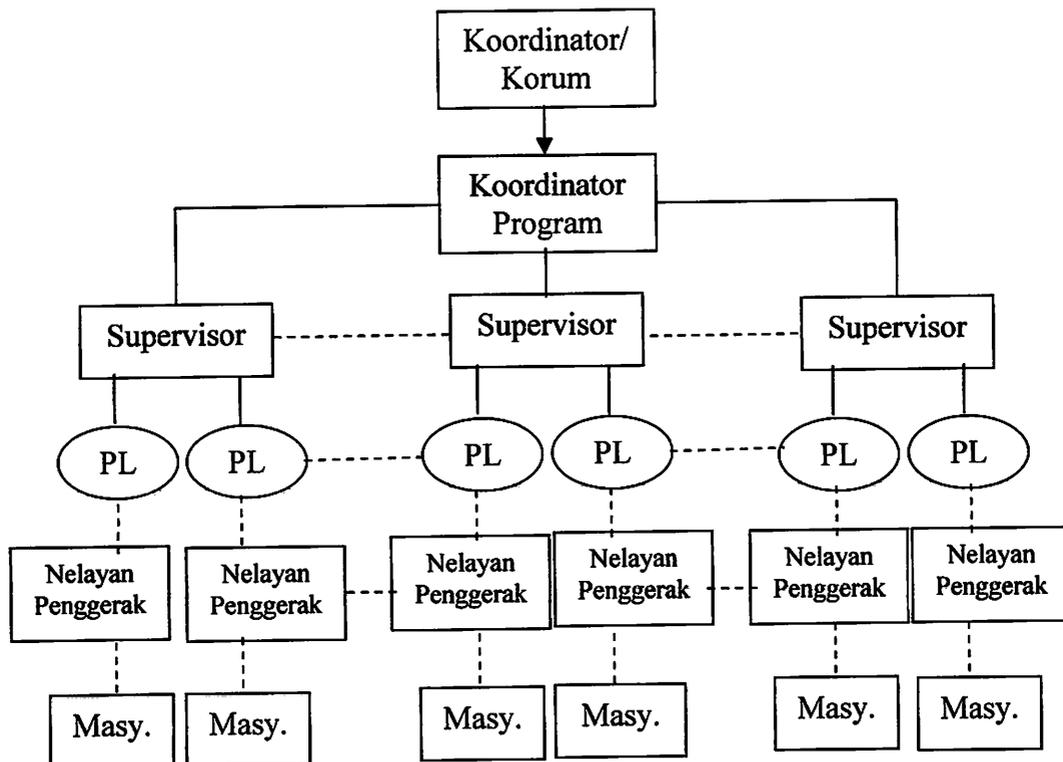
Mengingat Wetlands International adalah organisasi non pemerintah yang biasanya sarat dengan ideologi dan memperjuangkan demokrasi/partisipatif, maka melembaganya partisipasi adalah diadopsinya partisipasi ke dalam suatu kebijakan, perangkat organisasi dan mekanisme kerja lembaga. Dari struktur organisasi inilah bisa digunakan untuk memahami pola hubungan antara masing-masing jabatan yang terdapat di dalam Wetlands International. Struktur organisasi di sini mencerminkan hubungan formal yakni garis wewenang dan garis koordinasi antara masing-masing jabatan, tetapi yang lebih penting adalah hubungan informal yang terjadi di antara personil-personil yang memiliki level yang berbeda, mulai dari tingkat pimpinan (direktur) sampai ke level yang merupakan ujung tombak, yaitu Petugas Lapangan (PL).

Berikut ini adalah penjabaran mengenai struktur organisasi dan pelayanan program serta jenis dan mekanisme pengambilan keputusan pada Wetlands International.

2.3.1. Struktur Organisasi dan Pelayanan Program Wetlands International

Berikut ini adalah model struktur organisasi Wetlands International yang menggambarkan struktur pelayanan program yang bisa dilihat pada diagram 2.3 di bawah ini.

DIAGRAM 2.3
STRUKTUR ORGANISASI DAN PELAYANAN PROGRAM
WETLANDS INTERNATIONAL



Dari diagram di atas terlihat di bawah direktur terdapat seorang koordinator program/manager program yang bertugas untuk mengkoordinir bidang-bidang pelayanan kepada masyarakat. Koordinator program ini harus menguasai semua isu program lembaganya, baik dari segi implementasi di lapangan maupun dari segi finansial dan administratif kelembagaan.

Lembaga juga mengakomodir suatu komitmen khusus dengan lembaga-lembaga donor yang memiliki pendekatan proyek. Perbedaan proyek dengan program dalam hal ini adalah proyek biasanya merupakan agenda dari donor itu sendiri, sedangkan program merupakan agenda dari LSM yakni dalam hal ini

adalah Wetlands International yang dikembangkan menjadi proposal umum lembaga berdasarkan proses perencanaan dari masyarakat.

2.3.2. Jenis dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Struktur organisasi yang dipaparkan di atas, hanya bisa menggambarkan pola hubungan antar personil dan antara lembaga dengan masyarakat. Karena itu selanjutnya dilakukan dijabarkan mengenai kewenangan dalam hal pengambilan keputusan-keputusan di tingkat lembaga maupun di tingkat lapangan (implementasi program)

Tabel 2.7
Jenis dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Wetlands International

Jenis Keputusan	Proses dan Pihak-Pihak yang Terlibat
Keputusan Tingkat Organisasi	
1. Pemilihan direktur	Ditetapkan oleh badan khusus (misal ; badan pendiri/penasihat)
2. Penyusunan visi-misi, tujuan strategis	Selain diputuskan oleh badan khusus, juga ada peran serta dari lembaga lain/donor
Keputusan Tingkat Management	
3. Kontrak kerjasama dengan donor	Ditetapkan oleh pimpinan lembaga namun sebagian bisa dibuat oleh staf yang mewakili lembaga
4. Komitmen kerjasama dengan mitra	Ditetapkan oleh pimpinan lembaga namun sebagian bisa dibuat oleh staf yang mewakili lembaga
5. Penyusunan anggaran program	Disusun berdasarkan kebutuhan peserta program/dampingan melalui pertemuan tahunan. Penetapan anggaran dilakukan oleh manajemen lembaga dalam sebuah proposal
Keputusan Tingkat Implementasi Program	
6. Perluasan kelompok	Ditetapkan bersama (seluruh staf dalam sebuah pertemuan)
7. Perubahan/penyesuaian jadwal program	Ditetapkan bersama (seluruh staf dalam sebuah pertemuan) dan dikomunikasikan kepada masyarakat
8. Mengatasi persoalan di lapangan	Menjadi wewenang PL dan kelompok dampingannya
9. Perencanaan program tingkat kelompok/desa dampingan	Bulanan : tingkat kelompok, melibatkan anggota dan PL
	Triwulan : tingkat desa, melibatkan anggota,

Jenis Keputusan	Proses dan Pihak-Pihak yang Terlibat
	tokoh masyarakat, pemdes, PL dan korbid Semester : tingkat antar desa/wilayah, melibatkan dinas, LSM mitra, direktur, PL dan korbid

Sumber : Hasil Wawancara dengan Direktur Program Wetlands International

2.4. Konsep Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Wetlands International

Sistem pemberdayaan ini dijabarkan dalam bentuk rangkaian kegiatan yang melibatkan dan mendorong masyarakat kelompok sasaran menjadi mandiri melalui suatu proses yang panjang dengan tujuan merubah paradigma masyarakat tentang makna mandiri yang sebenarnya yaitu ditekankan dengan pembinaan rasa tanggung jawab yang besar oleh masyarakat tentang kegiatan pemberdayaan mulai dari awal proses hingga akhir proses. Dalam hal ini Pihak Wetlands International memberikan bantuan dana bergulir terhadap masyarakat untuk pembiayaan seluruh kegiatan pemberdayaan dari awal hingga akhir hingga mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pihak Wetlands International, sehingga sasaran yang dituju mandiri atau bisa dilepas tanpa meminta kembali hasil dari masyarakat selaku obyek pemberdayaan yang telah dibantu.

Secara garis besar, rencana teknis dari konsep kegiatan yang diprakarsai oleh Wetlands International merupakan hasil analisis dari kondisi di lapangan untuk menentukan strategi di lapangan atau scenario teknis dari kegiatan. Berikut adalah rencana teknis kegiatan yang telah disusun, meliputi :

1. Pemantapan konsep kegiatan

Mengkaji ulang bagaimana keterkaitan tambak dengan mangrove dari segi manfaat petambak, bagaimana mendukung fungsi mangrove terhadap tambak dimana mangrove yang ditanam baru akan berfungsi setelah bertahun-tahun kemudian, serta bagaimana rancangan detil tambak ramah lingkungan

2. Penentuan pola pendekatan yang akan dilakukan

Misalnya : participatory rural appraisal, pertemuan formal dan informal, diskusi-diskusi , studi banding dan metode lainnya.

3. Penajaman kelompok target prioritas (stakeholder utama)

Menentukan siapa saja yang mengakses dan mendapat manfaat langsung dari pesisir, siapa saja yang akan mendapat manfaat langsung dari keberadaan mangrove, siapa saja yang akan mendukung pemanfaatannya sekarang dan di masa depan, siapa saja yang berpotensi merusak dan sebagainya. Dalam hal ini kelompok target yang dipilih adalah petambak, nelayan, sekolah dan pemerintah daerah.

Kelompok petambak dan nelayan tidak diragukan lagi kepentingannya dalam kegiatan ini. Sekolah menjadi kelompok pendukung penting karena sekolah adalah bagian dari masyarakat dan generasi muda adalah penentu kebijakan di masa depan. Jika usaha penyadaran tidak menyentuh kelompok ini, maka dikhawatirkan dalam jangka panjang kegiatan akan sia-sia. Sedangkan pemerintah adalah kelompok paling strategis karena posisinya sebagai penentu kebijakan dan pada pasca kegiatan, pihak pemerintah juga berperan penting menentukan keberlanjutan kegiatan.

4. Penetapan lokasi ideal kegiatan

5. Penyusunan kembali langkah-langkah kegiatan

6. Penyiapan penguasaan teknik-teknik kegiatan yang akan dilakukan

7. Penyiapan materi informasi yang perlu disampaikan

Penjabaran mengenai rangkaian proses kegiatan ini dimulai dari sosialisasi, penyadaran masyarakat dan pendampingan kelompok hingga mandiri. Langkah-langkah kegiatan dalam konsep pemberdayaan ini diraikan sebagai berikut ;



- **Tahap Persiapan**, membentuk tim pelaksana lapangan. Tim pelaksana ini dibentuk dengan mempertimbangkan latar belakang keilmuan, kemampuan dan pengalaman lapangan. Setelah itu

dilakukan penyamaan persepsi anggota tim terhadap konsep program secara menyeluruh dan strategi pelaksanaan yang akan digunakan. Selanjutnya

disusun rencana umum kegiatan sebagai garis besar acuan program kegiatan. Hal-hal yang dicantumkan dalam perencanaan umum meliputi rincian lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan, tahapan kegiatan yang akan dilakukan di lapangan, waktu serta penentuan personil yang akan melaksanakannya. Hal lain adalah menetapkan anggota tim yang akan ditempatkan secara permanen di lapangan dan menyusun kriteria penentuan pemilihan lokasi kegiatan. Dengan terkumpulnya informasi awal lokasi kegiatan yang terpilih selanjutnya disusun rencana teknis kegiatan. Rencana ini pada dasarnya merupakan hasil analisis dari kondisi lapangan untuk menentukan strategi pelaksanaan di lapangan atau skenario teknis dari kegiatan. Rencana teknis yang disusun meliputi : pemantapan konsep kegiatan ; penentuan pola pendekatan yang akan dilakukan, misalnya pertemuan formal atau informal, studi banding dan metode lainnya; penajaman kelompok target prioritas, penetapan lokasi ideal kegiatan, penyusunan kembali langkah-langkah kegiatan sesuai dengan kondisi lapangan, penyiapan penguasaan teknik-teknik kegiatan yang akan dilakukan dan penyiapan materi informasi yang perlu disampaikan misalnya poster, slide, selebaran dan sebagainya.

Tahapan persiapan berlangsung selama 3 bulan. Tahapan ini penting guna mempersiapkan tim pelaksana yang solid dan rencana kegiatan yang matang.



- ***Integrasi ke dalam masyarakat,*** integrasi ke dalam masyarakat diawali dari kunjungan kedua kalinya oleh tim lapangan ke kepala desa. Dalam kunjungan ini tim memperkenalkan diri, menyampaikan maksud, tujuan

serta rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan di desa. Dari kepala desa diperoleh informasi tokoh-tokoh masyarakat yang perlu dikunjungi. Selain kepada tokoh masyarakat, tim juga memperkenalkan diri kepada ketua RT dan tetangga terdekat dari kantor atau tempat kediaman anggota tim di desa. Selain itu juga, pendekatan juga dilakukan terhadap SD yang ada di desa untuk

mengetahui sejauhmana pemahaman mereka mengenai pendidikan lingkungan hidup, persepsi tentang pendidikan lingkungan dan pernahkah menerapkan pendidikan lingkungan dalam proses pendidikan dan pengajaran sehari-hari. Berdasarkan hal ini tim mengajak guru-guru untuk mengembangkan program lingkungan hidup secara bersama-sama. Pendekatan ke instansi pemerintah daerah dilakukan terhadap instansi yang paling erat keterkaitannya dengan program kegiatan, dalam hal ini adalah bagian lingkungan hidup dan dinas perikanan. Selanjutnya tim melakukan pertemuan dengan bupati dan juga diundang untuk memaparkan rencananya dalam rapat koordinasi daerah. Selama tinggal di desa, anggota tim ikut berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari masyarakat seperti pengajian, shalat bersama, ke tambak dan sebagainya. Selama proses ini tim akan semakin memahami peta sosial masyarakat dan permasalahan-permasalahan sosial ekonomi yang terjadi.

Upaya mengkaitkan program kegiatan dengan beberapa instansi pemerintah daerah dilakukan untuk memperoleh dukungan pemerintah daerah, baik dalam bentuk kebijaksanaan, peraturan atau program. Hal ini agar dapat mendorong dan menjamin keberlanjutan program yang dirintis. Hasil dari pendekatan ini adalah terjalinnya pemahaman dan kepercayaan di kedua belah pihak.

Integrasi ke dalam masyarakat sangat penting sebagai langkah awal memulai kegiatan dilapangan. Keberhasilan pendekatan ini merupakan dasar hubungan kerjasama ke depan antara tim dengan masyarakat maupun dengan pemda.



- **Pendidikan masyarakat**, Setelah terjalinnya hubungan baik dan tumbuhnya kepercayaan dari masyarakat terhadap tim, maka dimulailah kegiatan pendidikan masyarakat sebagai upaya penyadaran tentang pentingnya

lingkungan hidup, pelestarian dan rehabilitasinya, serta pentingnya masyarakat berkelompok untuk menghadapi permasalahan-permasalahan

mereka. Pendidikan yang dilakukan lebih bersifat non formal melalui pertemuan-pertemuan atau diskusi-diskusi. Pada beberapa sesi diskusi, tim mengundang pihak pemerintah daerah seperti dinas perikanan atau bagian lingkungan hidup dan kecamatan untuk menjelaskan berbagai program yang berkaitan dengan masyarakat dan wilayah pesisir. Keterlibatan personil pemerintah dalam sesi-sesi diskusi sangat bermanfaat untuk menumbuhkan keyakinan yang telah disepakati bersama mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Selain itu, kehadiran personel instansi pemerintah sangat membantu dalam upaya mencari solusi dari beberapa permasalahan yang menyangkut konflik kepentingan.

Dari diskusi-diskusi yang dilaksanakan, selanjutnya dilakukan studi banding untuk memberi gambaran yang lebih lengkap dan nyata mengenai kondisi di lapangan. Selama tahapan ini berlangsung, tim terus melakukan proses integrasi ke dalam masyarakat. Upaya ini untuk memperkuat hubungan dan kepercayaan masyarakat terhadap tim



- ***.Pembentukan kelompok masyarakat***, mendorong timbulnya keinginan masyarakat (kelompok diskusi) untuk membentuk kelompok bukanlah hal yang mudah, apalagi jika masa

sebelumnya pembentukan kelompok sudah pernah dicoba namun tidak berjalan. Belajar dari pengalaman tersebut tim mengusahakan agar ide dan keinginan membentuk kelompok datang dari kelompok diskusi sendiri karena merupakan kebutuhan mereka. Untuk membantu proses pertumbuhan kepercayaan itu, tim melakukan beberapa upaya seperti yang disebutkan dalam pendidikan masyarakat di atas, seperti membahas contoh-contoh keberhasilan beberapa kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam mereka, berdiskusi secara langsung dengan kelompok masyarakat di daerah studi banding dan mengundang beberapa instansi pemerintah untuk

memberikan gambaran mengenai berbagai peluang yang ada dan dapat difasilitasi oleh pemerintah jika suatu wilayah memiliki kelompok masyarakat.

Setelah 6 bulan sejak kegiatan dilapangan dimulai, tim berhasil mendorong kelompok diskusi untuk membentuk kelompok masyarakat. Sebelum ide pembentukan kelompok disosialisasikan ke masyarakat luas, kelompok diskusi bersama tim menyusun prinsip-prinsip dasar pembentukan kelompok seperti tujuan pembentukan kelompok, siapa saja yang bisa jadi anggota, garis besar kegiatan dan alternatif-alternatif nama kelompok. Setelah itu kelompok diskusi mengundang warga masyarakat untuk menghadiri pembentukan dan pemilihan ketua kelompok. Agar kelompok ini memiliki legalitas, pengurus kelompok bersama dengan tim penyusun AD/ ART dan mengukuhkannya secara formal melalui SK Kepala Desa. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana kerja kelompok, pembagian tugas dan mekanisme kerja kelompok. Selain itu kelompok dengan didampingi tim melakukan kunjungan ke instansi pemerintah daerah terkait untuk memperkenalkan diri, tujuan dan program kegiatannya.



- **Penguatan kapasitas kelompok**, terbentuknya kelompok masyarakat menunjukkan bahwa tim telah dapat memulai pelaksanaan program pelestarian dan rehabilitasi lingkungan dalam hal ini adalah pelestarian dan rehabilitasi mangrove serta peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Agar program ini dapat berjalan dengan baik, maka penguatan kapasitas kelompok sangat dibutuhkan karena merekalah yang didorong untuk menjadi pelaku utama pelaksana program.

Kegiatan yang pertama kali dilaksanakan adalah penanaman mangrove. Sebelum pelaksanaan penanaman, tim terlebih dulu memberikan pengetahuan teknis rehabilitasi mangrove kepada kelompok seperti syarat-syarat tumbuh,

kondisi ideal untuk tumbuh, seleksi buah dan cara-cara penanaman mangrove. Berbekal informasi ini kemudian kelompok merencanakan kegiatan penanaman seperti lokasi dan waktu penanaman serta yang terlibat dalam penanaman. Tim mendampingi kelompok dalam merencanakan penanaman, sedangkan pelaksanaannya dikoordinir oleh kelompok. Pada akhir kegiatan terdapat dana sisa dan kelompok mulai memiliki dana selain dari iuran anggota. Pada kerjasama dengan dinas perikanan, instansi ini memberikan kegiatan penanaman mangrove dengan paket usaha pembesaran kepiting dan budidaya bandeng pada kelompok. Pada pelaksanaan program ini kelompok juga mendapatkan dana sisa.

Dengan mulai terkumpulnya dana, tim mendorong dan memfasilitasi kelompok untuk membuat aturan main dalam pengelolaan keuangan kelompok. Selain itu, tim mendorong kelompok untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan program sosial. Dalam sesi-sesi diskusi tim selalu menekankan bahwa *tujuan utama pembentukan kelompok adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan warga masyarakat sekitarnya melalui program pelestarian lingkungan dan peningkatan sosial dan ekonomi*. Program ekonomi pertama yang diputuskan kelompok adalah bantuan bibit bandeng untuk anggotanya.

Permasalahan yang dihadapi setelah dana kelompok mulai terkumpul adalah terjadinya penggunaan dana kelompok yang tidak transparan dari ketua. Hal ini menyebabkan sebagian anggota kelompok mengundurkan diri., sedangkan anggota lainnya menjadi pasif karena berlarut-larutnya penyelesaian permasalahan. Keadaan ini menyebabkan kelompok terancam bubar sehingga mendorong tim untuk ikut menyelesaikan masalah. Dengan kesepakatan anggota yang pada akhirnya dipilih ketua baru. Selanjutnya tim mendorong dan memfasilitasi kepengurusan yang baru untuk memperbaharui aturan main seperti sistem penggunaan dan laporan keuangan, sistem administrasi, jadwal pertemuan dan keanggotaan.

Tim tetap mendampingi kelompok dalam perencanaan kegiatan penanaman dan membantu mengawasi keuangan. Dari sisa dana penanaman ini dan sisa

kas kelompok, kemudian kelompok bersepakat untuk mengembangkan kegiatan perekonomian berupa usaha sarana produksi pertambakan, baik pembibitan bandeng maupun pakan. Dengan dana yang terbatas, kelompok difasilitasi untuk mendapatkan dana dari program PKM (Pemulihan Keberdayaan Masyarakat). Dari dana yang ada kemudian kelompok merencanakan program-program kegiatannya ke depan.

Selain melalui proses pekerjaan-pekerjaan seperti di atas, penguatan kapasitas kelompok juga dilakukan melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang diikuti seperti ketrampilan budidaya ikan.

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa penguatan kapasitas kelompok yang dilakukan oleh tim ditekankan melalui pendekatan 'belajar sambil melaksanakan' (learning by doing) seperti pengelolaan keuangan, sistem administrasi dan pelaksanaan program. Selain itu juga dilakukan melalui pelatihan-pelatihan formal.



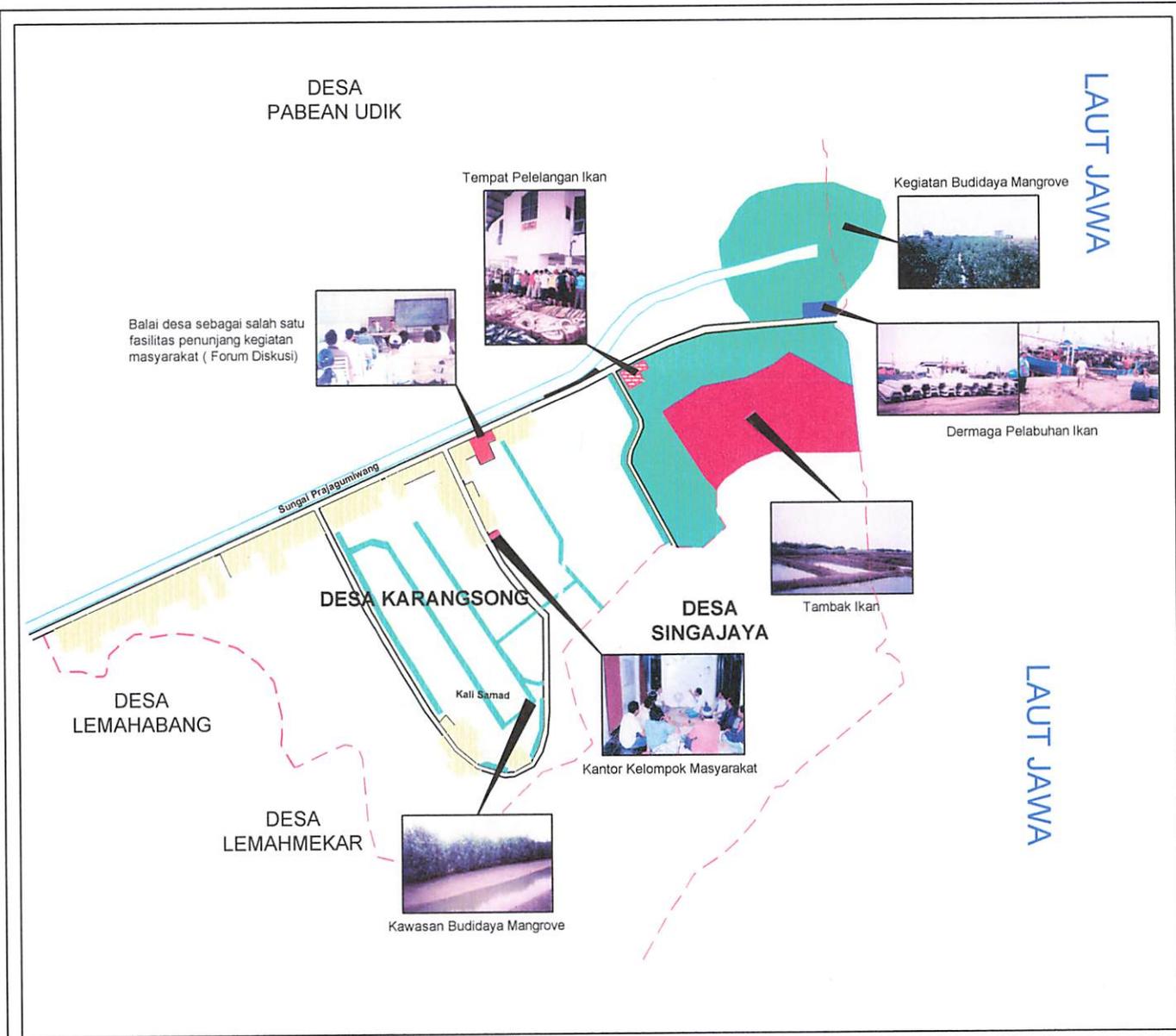
Tahapan ini merupakan tahapan kritis. Apabila penguatan kapasitas kelompok gagal, maka akan menyebabkan bubarnya kelompok. Sebaliknya apabila berhasil, maka akan terbentuk kelompok yang mandiri. Keberadaan kelompok yang

mandirilah yang akan mampu melanjutkan program pelestarian mangrove serta program peningkatan sosial ekonomi masyarakat.

- *Kelompok Mandiri*, dengan pengalaman pelaksanaan program-program sebelumnya, jatuh bangunnya kelompok serta dana kas yang memadai, tim berhasil membuat kelompok menjadi mandiri setelah 28 bulan sejak didirikannya kelompok dengan pendampingan yang intensif. Selanjutnya kelompok menyusun rencana kerja sendiri yang terdiri dari program pengembangan usaha kelompok, pelestarian mangrove dan program sosial kemasyarakatan. Selama tahapan ini berlangsung, peran tim bergeser lebih ke arah sebagai pengamat dalam setiap pertemuan kelompok.

- *Monitoring dan Evaluasi*, selama pelaksanaan kegiatan, tim melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap kegiatan-kegiatan sementara yang berjalan. Monitoring dilakukan untuk memantau permasalahan-permasalahan yang muncul selama kegiatan berjalan di tiap tahapan dan mencari alternatif pemecahannya. Tidak jarang dari hasil monitoring memaksa tim untuk menyesuaikan atau merubah rencana kegiatan pada tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan kondisi lapangan. Segenap masukan dan hasil pengamatan dari monitoring kemudian dievaluasi oleh tim bersama dengan kelompok. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui segala kelemahan dan kelebihan dari kegiatan yang dijalankan guna perbaikan di masa mendatang. Selain itu evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan mencocokkan tujuan yang telah ditetapkan dan bahkan menyesuaikan tujuan di tengah-tengah pelaksanaan kegiatan.
- *Replikasi dan Perluasan*, keberhasilan Kelompok mendorong warga masyarakat lainnya untuk membentuk kelompok. Maka terbentuklah Bina Sejahtera, Rahayu, dan kelompok nelayan dengan nama Pelagis. Bina Sejahtera sebelumnya merupakan kelompok pengajian sedangkan Rahayu sebenarnya sudah terbentuk sejak tahun 2000 namun tidak aktif. Ketiga kelompok tersebut saat ini masih dalam tahap penguatan kapasitas kelompok dengan program yang sama, yaitu peningkatan sosial dan ekonomi anggota dan warga masyarakat sekitarnya dan pelestarian lingkungan.

Lebih jelas mengenai lokasi pusat-pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Karangsong dapat dilihat peta 2.1 Peta Pusat-Pusat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangsong .



JUDUL PETA :
**PUSAT-PUSAT KEGIATAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DESA KARANGSONG**

NO PETA : 2.2

- LEGENDA :
- : Jalan
 - : Sungai
 - : Daerah Pesisir
 - : Batas Desa
 - : Perumahan
 - : Tambak
 - : Dermaga
 - : Kantor Lurah
 - : Kantor
 - : Hutan Mangrove
 - : Syah Bandar
 - : Tempat Pelelangan Ikan



SUMBER PETA : **KANTOR DESA DAN
 SURVEY LAPANGAN**



**STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
 PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR
 DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU**



**TUGAS AKHIR
 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
 FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
 MALANG
 2007**

DESA KARANGSONG

2.4.1. Karakteristik Partisipan

Karakteristik partisipan ini, dijabarkan sesuai dengan data-data umum responden yaitu latar belakang para responden yang meliputi ; latar belakang, pekerjaan, usia, pendidikan, dan tingkat pendapatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.7
KARAKTERISTIK RESPONDEN

NO	URAIAN	JUMLAH (JIWA)	PROSENTASE (%)
1	PEKERJAAN		
	Nelayan Pemilik Kapal	27	30
	Nelayan Pemilik Tambak	18	20
	Buruh Perikanan / Kenelayanan	45	50
2	USIA		
	< 20 tahun	2	2,22
	20 - 59 tahun	83	92,22
	> 59 tahun	5	5,56
3	PENDIDIKAN		
	SD	61	67,78
	SLTP	11	12,22
	SLTA	6	6,67
	Perguruan Tinggi	12	13,33
4	PENGHASILAN		
	< 250,000/bulan	24	26,67
	250,000 - 499,000/bulan	50	55,56
	500,000 - 1,000,000/bulan	10	11,11
	> 1,000,000/bulan	6	6,67

Sumber : Hasil Analisa

Sesuai dengan klasifikasi jumlah penduduk Desa Karangsong menurut tingkat pendidikan yang sudah dijabarkan pada sub bab sebelumnya lalu diperbandingkan lagi dengan karakteristik partisipan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka jelas terlihat bahwa kebanyakan masyarakat desa Karangsong lebih khusus lagi adalah partisipan yang menjadi sampel penelitian adalah lulusan SD. Dengan demikian kualitas sumberdaya manusia di Desa Karangsong bisa dikatakan rendah. Hal ini menjadi salah satu indikasi ketidakberdayaan masyarakat yang merujuk pada keterbatasan kemampuan individual secara akademis yang bisa mempengaruhi kepercayaan diri, kemampuan untuk memotivasi diri dan kemampuan untuk mengendalikan diri serta kesiapan mereka dalam menerima program pemberdayaan.

Selain itu, dari klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian dan tingkat pendapatan serta tingkat pengeluaran masyarakat yang juga telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya kemudian diperbandingkan lagi dengan karakteristik partisipan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka dapat diketahui juga bahwa mayoritas masyarakat desa Karangsong bermata pencaharian sebagai buruh perikanan atau kenelayanan dengan tingkat pendapatan berkisar 250,000 -

499,000/bulan dan tingkat pengeluaran masyarakat kurang dari 500,000/bulan, sekalipun masih mencukupi namun kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu bisa menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan tingkat pendapatan karena sebagian besar masyarakatnya adalah buruh petani tambak dan nelayan yang terbukti secara fisik mengalami abrasi pantai ataupun penurunan kualitas perairan sehingga benar-benar mengalami krisis karena adanya permasalahan lingkungan, baik terlihat langsung maupun dari informasi masyarakat. Padahal di sisi lain masyarakat menggantungkan hidupnya pada produktifitas perairan.

Dari hasil kuisioner dan wawancara terdapat fakta lain menunjukkan bahwa masyarakat masih tergantung pula pada para boss (rentenir/pengijon) dari sebelum maupun sesudah adanya program pemberdayaan atau dengan kata lain masyarakat masih terbentur masalah modal usaha, sehingga munculah adanya dugaan-dugaan penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat.

2.4.2. Tujuan Konsep Kegiatan Pemberdayaan Wetlands International

Berdasarkan pemahaman mengenai segala macam isu-isu pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir di Desa Karangsong, maka disusun satu program kegiatan yang meliputi upaya pemberdayaan masyarakat (penyadaran dan pengembangan kapasitas), pengembangan model tambak ramah lingkungan dan rehabilitasi hutan mangrove. Program kegiatan ini didasari oleh keinginan untuk memberdayakan masyarakat pesisir agar mampu mengelola wilayahnya sendiri secara lestari dan berkelanjutan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan setempat. Dalam penelitian ini, kajiannya lebih ditekankan pada proses kegiatan pemberdayaan masyarakatnya saja.

2.4.3. Bentuk Bantuan / Program Wetlands International

Bentuk program atau kegiatan pemberdayaan untuk peningkatan social ekonomi masyarakat yang ada di Desa Karangsong meliputi :

- A. Program Pemberian Bantuan Dana Bergulir (Revolving Fund)
- B. Program Pembentukan Kelompok Masyarakat
- C. Program Penguatan Kapasitas kelompok
- D. Program Penyuluhan Masyarakat
- E. Program Pelatihan Masyarakat
- F. Program Studi Banding

Dalam hal ini Pihak Wetlands International memberikan bantuan dana bergulir terhadap masyarakat untuk pembiayaan seluruh kegiatan pemberdayaan dari awal hingga akhir hingga mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pihak Wetlands International, sehingga sasaran yang dituju mandiri atau bisa dilepas tanpa meminta kembali hasil dari masyarakat selaku obyek pemberdayaan yang telah dibantu.

2.4.4. Strategi Konsep Kegiatan Pemberdayaan Wetlands International

Untuk perencanaan program kegiatan di lapangan, Wetlands International membutuhkan strategi yang matang dan realistis. Dalam kasus ini, strategi yang diambil adalah memposisikan diri tim pelaksana sebagai fasilitator dan menjadikan masyarakat sebagai mitra sekaligus pelaku aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari meninjau kembali berbagai aktifitas yang tercantum dalam perencanaan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan kegiatan di lapangan.

Perencanaan program kegiatan perlu ditinjau lagi bersama-sama dengan masyarakat karena pola pengelolaan pesisir yang akan dikembangka baru merupakan hasil pemikiran Wetlands International. Walaupun pola yang ditawarkan sudah diyakini betul akan dapat mencapai peningkatan kualitas lingkungan, namun harus tetap memiliki ruang untuk mengakomodasi pendapat masyarakat dan cukup lentur untuk memungkinkan terjadinya proses negosiasi demi tercapainya suatu pola yang dapat disepakati bersama. Hal ini sesuai pula dengan strategi di atas, dimana pola pengelolaan pesisir tersebut harus didiskusikan dengan masyarakat untuk verifikasi dan konfirmasi apakah sudah

secara tepat dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh mereka.

Proses tersebut dilakukan secara terus menerus sampai menyangkut hal-hal yang lebih rincimisalnya lokasi, waktu dan orang-orang yang terlibat, semua ditentukan oleh atau bersama masyarakat. Diharapkan dengan menerapkan strategi ini sejak awal masyarakat setempat sudah merasakan posisinya sebagai pelaku utama dan sebagai kunci dari keberhasilan program.

2.4.5. Asas dan Prinsip Konsep Kegiatan Pemberdayaan Wetlands International

Secara singkat dapat dikatakan bahwa strategi yang dipilih untuk melaksanakan program kegiatan ini merupakan penerapan prinsip-prinsip kegiatan partisipatif yang dilandasi oleh paham kesetaraan.

Dengan demikian, pemberdayaan dilihat sebagai proses kolaboratif yang oleh karenanya masyarakat dan fasilitator harus bekerjasama sebagai partner. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.

2.4.6. Kemampuan Manajerial

Kemampuan manajerial di sini mengacu pada 5 aspek penting yakni motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan-kemampuan, manajemen diri, mobilisasi sumber dan pembangunan dan pengembangan jaringan. Pada tahap awal, tim pendamping dapat membantu kelompok masyarakat dalam mengembangkan sebuah sistem. Namun wewenang penuh untuk menjalankan dan mengatur sistem tersebut oleh kelompok masyarakat belum dijalankan secara maksimal, karena kelompok masyarakat tidak akan menjalankan sesuatu di luar agenda yang telah dibuat oleh LSM.

Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber dilakukan cukup cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan, namun belum cukup mempunyai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat.

2.4.7. Tingkat Kinerja

Tingkat kinerja disini lebih merujuk kepada proses monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh WI. Dalam hal ini, tahap monitoring telah dilakukan sejak awal proses pelaksanaan kegiatan dilakukan, yaitu pada saat dimulainya diskusi-diskusi intensif dengan masyarakat, penanaman mangrove dan pembuatan tambak percobaan. Kegiatan monitoring atau pemantauan diperlukan untuk mendeteksi permasalahan yang timbul dan mencari alternatif pemecahannya. Dengan demikian tiap permasalahan dapat segera diatasi dan tidak terakumulasi menjadi permasalahan yang lebih berat.

Beberapa permasalahan yang timbul menyangkut efektifitas pengelolaan, konflik (kepentingan) antara berbagai pihak, permasalahan teknis seputar hama / penyakit / predator maupun gangguan manusia, kondisi alam, kondisi politis dan keamanan, serta kondisi ekonomi mikro maupun makro (kelangkaan barang, kenaikan harga). Faktor yang datang dari luar maupun berasal dari proses kegiatan itu sendiri selalu mempengaruhi jalannya kegiatan.

Segep masukan dari proses monitoring kemudian dievaluasi bersama dengan melibatkan masyarakat dan stakeholders lainnya. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui segala kelemahan dan kelebihan dari sistem / kegiatan yang diterapkan guna perbaikan sistem / kegiatan di masa mendatang. Pelibatan seluruh stakeholders merupakan sesuatu yang sangat penting, karena kegiatan yang diterapkan adalah milik bersama setiap sisi yang menentukan keberhasilan dan kegagalannya.

2.4.8. Penguasaan Materi

Pengetahuan dan pengalaman lapangan anggota tim WI di Desa Karangsong sangat dibutuhkan terutama pada proses diskusi-diskusi. Banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul selama proses diskusi sangat membutuhkan jawaban-jawaban penyebab permasalahan dan alternatif-alternatif solusi yang dapat meyakinkan kelompok diskusi. Hal tersebut menjadi penting karena kelompok diskusi yang dihadapi adalah orang-orang yang telah lama bergelut pada bidangnya dan adanya jawaban yang meyakinkan akan membantu

dalam proses penumbuhan kepercayaan pada tim WI. Selain itu agar diperoleh informasi yang akurat, pengetahuan dan pengalaman lapangan juga sangat membantu dalam pengujian informasi selama proses diskusi berlangsung maupun pengecekan di lapangan

Di samping itu, pemahaman masyarakat sendiri mengenai partisipasinya dalam kegiatan pemberdayaan masih disejajarkan dengan gotong royong atau dengan kata lain keterlibatan secara fisik dalam suatu kegiatan pemberdayaan.

2.4.9. Otonomi Masyarakat

Adanya praktek-praktek berorganisasi yang mencerminkan terjadinya partisipasi masyarakat, di dalamnya terlihat kelompok masyarakat yang telah terbentuk sudah mengembangkan sistem pemilihan pengurus melalui penggunaan kriteria yang disepakati bersama yang memungkinkan siapa saja dipilih asalkan memenuhi kriteria, yaitu kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Selain itu, aturan internal kelompok sebagian besar bersifat kesepakatan lisan (konvensi), dan kebanyakan memang dipatuhi oleh kelompok. Hanya beberapa saja yang sudah memiliki AD/ART tertulis, dan konsepnya biasanya diberikan oleh LSM.

Terlihat juga bahwa ada kecenderungan kelompok-kelompok masyarakat itu sendiri mengandalkan pendapat kalangan yang berpengaruh / tokoh, sehingga pengakuan atas keberadaan pikiran dan pandangan orang lain belum sepenuhnya dijalankan karena rata-rata dalam kelompok masyarakat masih ada beberapa personil yang sangat menonjol/berpengaruh di dalam kelompok, biasanya mereka juga sangat vokal.

Masyarakat juga bisa menunjukkan keswadayaannya dalam bentuk kontribusi sumberdaya dalam pengembangan program, namun dalam hal ini masyarakat tidak dapat mengembangkan kegiatan/program di luar agenda LSM karena masalah pendanaan. Masyarakat juga kebanyakan belum melihat keterkaitan antara usaha mereka dengan peluang pasar. Dengan kata lain masyarakat belum bisa menyampaikan gagasan tentang bagaimana cara untuk bisa mencapai keswadayaan / kemandirian.

BAB III

PEMBAHASAN ANALISA

3.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Berikut adalah penjabaran dari rekapitulasi quisioner, yang hasilnya dijadikan basis data dalam proses uji hipotesa mengenai pembuktian adanya penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat Desa Karangsong dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang terkait dengan penyimpangan yang terjadi.

3.1.1. Karakteristik Partisipan (X_1)

3.1.1.1. Jenis Kelamin Responden

Tabel 3.1
Hasil Penelitian Jenis Kelamin Responden

JK

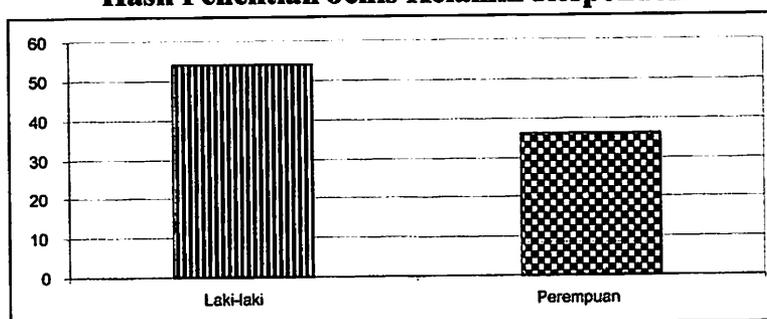
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	54	60.0	60.0	60.0
Perempuan	36	40.0	40.0	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden mempunyai jenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 54 orang (60%), dan sisanya mempunyai jenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 36 orang (40%). Keterkaitan jenis kelamin disini dengan keberadaan program pemberdayaan menunjukkan bahwa peran partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masih didominasi oleh kaum laki-laki. Peranan perempuan dalam hal ini dapat dimobilisasi secara maksimal hanya melalui organisasi PKK. Akan tetapi di Desa Karangsong organisasi PKK ini belum berkembang sebagaimana mestinya. Kegiatan utama dan sangat menonjol adalah arisan dan pengajian yang berjalan dengan baik dan lancar, sedangkan peranan perempuan untuk kegiatan

pemberdayaan sendiri sifatnya hanya untuk membantu porsi kerja kaum laki-laki ketika kaum laki-lakinya sedang melaut, misalnya membantu mengurus tambak. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2
Hasil Penelitian Jenis Kelamin Responden



Keterangan ;

 ; Laki-laki
 ; Perempuan

Sumber : Hasil Analisa

3.1.1.2. Status Perkawinan Responden

Tabel 3.2
Hasil Penelitian Status Perkawinan Responden

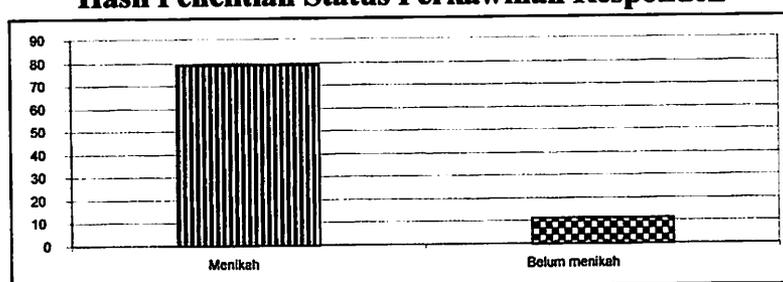
		STATUS			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menikah	79	87.8	87.8	87.8
	Belum Menikah	11	12.2	12.2	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden sudah menikah , yaitu sebesar 79 orang (87.8%), dan sisanya yang belum menikah sebesar 11 orang (12.2%). Dominasi partisipan yang berstatus menikah menunjukkan adanya keterkaitan antara status perkawinan dengan tingkat kebutuhan yang pada akhirnya nanti mempengaruhi tingkat pendapatan dan

tingkat pengeluaran masyarakat, serta mempengaruhi motivasi mereka untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan, dimana partisipan yang telah menikah mempunyai kecenderungan tingkat kebutuhan hidup mereka lebih tinggi dibandingkan yang belum menikah, sehingga berpengaruh pada tingkat pendapatan dan pengeluaran mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi psikis mereka yakni keinginan mereka untuk memperbaiki hidup mereka lebih besar. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.4
Hasil Penelitian Status Perkawinan Responden



Keterangan ;



; Menikah



; Belum menikah

Sumber : Hasil Analisa

3.1.1.3. Tingkat Pendapatan Responden

Tabel 3.3
Hasil Penelitian Tingkat Pendapatan Responden

PDPTN

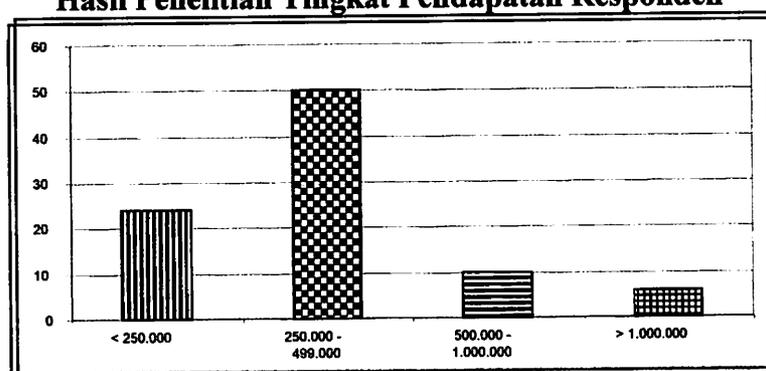
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 250.000	24	26.7	26.7	26.7
250.000 - 499.000	50	55.6	55.6	82.2
500.000 - 1.000.000	10	11.1	11.1	93.3
> 1.000.000	6	6.7	6.7	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden mempunyai pendapatan 250.000-499.000 , yaitu sebesar 50 orang (55.6%), 24

orang responden (26.7%) berpenghasilan <250.000, 10 orang responden (11.1%) berpenghasilan 500.000-1.000.000 dan sisanya sebanyak 6 orang (6.7%) berpenghasilan >1.000.000. Dengan tingkat pendapatan mayoritas berkisar 250,000 - 499,000/bulan dan tingkat pengeluaran masyarakat kurang dari 500,000/bulan, sekalipun masih mencukupi namun kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu bisa menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan tingkat pendapatan karena sebagian besar masyarakatnya adalah buruh petani tambak dan nelayan yang terbukti secara fisik mengalami abrasi pantai ataupun penurunan kualitas perairan sehingga benar-benar mengalami krisis karena adanya permasalahan lingkungan yakni penurunan budidaya mangrove dan budidaya tambak udang karena pengaruh serangan hama, penyakit atau predator maupun gangguan manusia, baik terlihat langsung maupun dari informasi masyarakat. Padahal di sisi lain masyarakat menggantungkan hidupnya pada produktifitas perairan. Selain itu, kondisi alam juga berpengaruh terhadap pendapatan mereka mengingat mereka adalah nelayan musiman yang pada musim-musim ombak besar, angin kencang serta hujan deras, sehingga mengakibatkan nelayan akan sulit mendapatkan ikan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.3
Hasil Penelitian Tingkat Pendapatan Responden



Keterangan ;

-  ; < 250.000
-  ; 250.000-499.000
-  ; 500.000-1.000.000
-  ; > 1.000.000

Sumber : Hasil Analisa

3.1.1.4. Mata Pencaharian Responden

Tabel 3.4
Hasil Penelitian Mata Pencaharian Responden

PKERJN

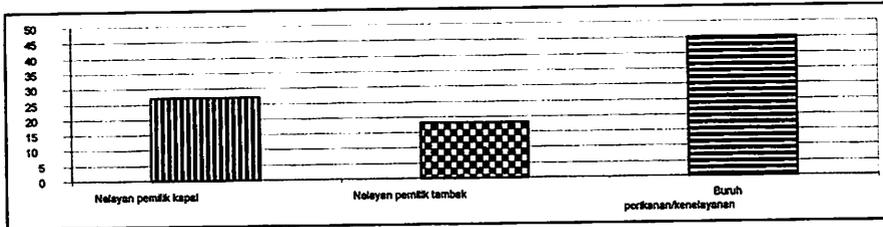
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Nelayan Pemilik Kapal	27	30.0	30.0	30.0
Nelayan Pemilik Tambak	18	20.0	20.0	50.0
Buruh perikanan/kenelayanan	45	50.0	50.0	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden bermata pencaharian sebagai buruh perikanan , yaitu sebesar 45 orang (50.0%), dan 27 orang (30%) bermata pencaharian sebagai nelayan pemilik kapal, kemudian sisanya sebanyak 18 orang (20%) lainnya bermata pencaharian sebagai nelayan pemilik tambak. Mata pencaharian terbesar di wilayah studi terlihat didominasi oleh buruh perikanan. Dalam analisa ini diketahui bahwa mata pencaharian merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat karena dominasi partisipan yang bermata pencaharian sebagai buruh kenelayanan menunjukkan bahwa masyarakat menggantungkan hidupnya pada produktifitas perairan, padahal di sisi lain terbukti secara fisik mengalami abrasi pantai ataupun penurunan kualitas perairan sehingga benar-benar mengalami krisis karena adanya permasalahan lingkungan, baik terlihat langsung maupun dari informasi masyarakat. Selain itu adanya tekanan yang sering menimpa mereka seperti datangnya awal musim ikan dan akhir musim ikan, yang menyebabkan mereka hanya menghasilkan ikan sedikit sering menimbulkan kesulitan dan kekurangan.

Hal ini akhirnya mempengaruhi motivasi mereka yang cukup besar terhadap kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.4
Hasil Penelitian Mata Pencarian Responden



Keterangan ;

-  ; Nelayan pemilik kapal
-  ; Nelayan pemilik tambak
-  ; Buruh kenelayanan/perikanan.

Sumber : Hasil Analisa

3.1.1.5. Usia Responden

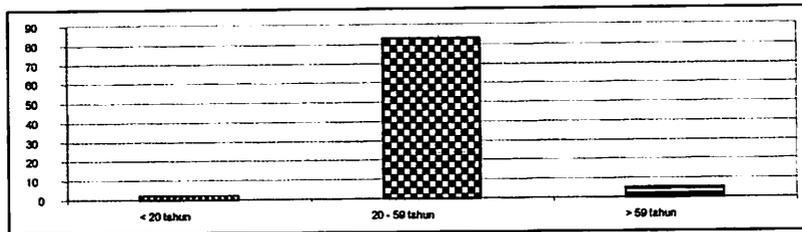
Tabel 3.5
Hasil Penelitian Usia Responden

		UMUR			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 20 tahun	2	2.2	2.2	2.2
	20 - 59 tahun	83	92.2	92.2	94.4
	> 59 tahun	5	5.6	5.6	100.0
Total		90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden berusia antara 20-59 tahun , yaitu sebesar 83 orang (70%), dan yang berusia di bawah 20 tahun sebesar 2 orang (2.2%). Sisanya yang berusia di atas 59 tahun sebanyak 5 orang (5.6%). Terlihat jelas bahwa mayoritas partisipan adalah masyarakat usia produktif yang cukup potensial baik keberadaan secara fisik maupun kesiapan psikis mereka untuk menerima kegiatan pemberdayaan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.5
Hasil Penelitian Usia Responden



Keterangan ;

-  ; < 20 tahun
 ; 20-59 tahun
 ; > 59

Sumber : Hasil Analisa

3.1.1.6. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 3.6
Hasil Penelitian Pendidikan Terakhir Responden

PEDDK

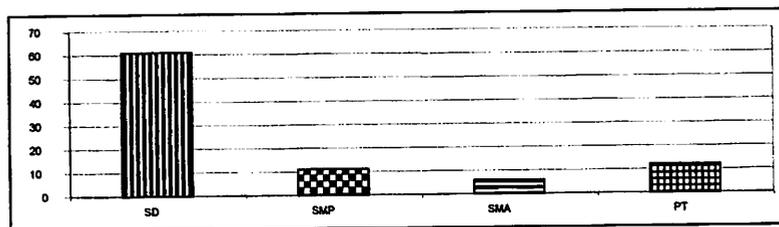
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	61	67.8	67.8	67.8
	SMP	11	12.2	12.2	80.0
	SMA	6	6.7	6.7	86.7
	PT	12	13.3	13.3	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden mengenyam pendidikan terakhir SD , yaitu sebesar 61 orang (67.8%), dan yang mengenyam pendidikan terakhir di perguruan tinggi sebesar 12 orang (13.3%) dan yang lulusan SMP sebanyak 11 orang (12.2%). Sisanya sebanyak 6 orang (6.7%) adalah lulusan SMA. Sesuai dengan klasifikasi jumlah penduduk Desa Karangsong menurut tingkat pendidikan yang sudah dijabarkan pada sub bab sebelumnya lalu diperbandingkan lagi dengan karakteristik partisipan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka jelas terlihat bahwa kebanyakan masyarakat desa Karangsong lebih khusus lagi adalah partisipan yang menjadi sampel penelitian adalah lulusan SD. Dengan demikian kualitas sumberdaya

manusia di Desa Karangsong bisa dikatakan rendah. Hal ini menjadi salah satu indikasi ketidakberdayaan masyarakat yang merujuk pada keterbatasan kemampuan individual secara akademis yang bisa mempengaruhi kepercayaan diri, kemampuan untuk memotivasi diri dan kemampuan untuk mengendalikan diri serta kesiapan mereka dalam menerima program pemberdayaan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.6
Hasil Penelitian Pendidikan Terakhir Responden



Keterangan ;

-  ; SD
-  ; SMP
-  ; SMU
-  ; PT

Sumber : Hasil Analisa

3.1.2. Integrasi Orientasi Tujuan (X_2)

3.1.2.1. Keefektifan Tahapan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 3.7
Hasil Penelitian Keefektifan Tahapan Program Bagi Responden

X2.1

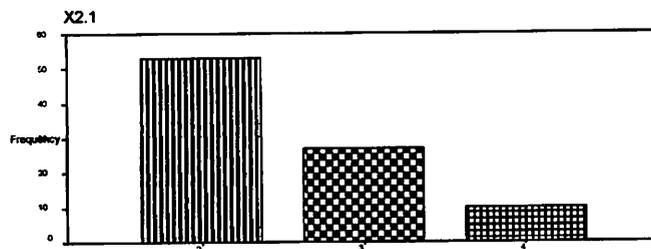
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	53	58.9	58.9	58.9
3	27	30.0	30.0	88.9
4	10	11.1	11.1	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menjawab bahwa adanya tahapan-tahapan dalam program pemberdayaan sangat efektif bagi mereka yaitu sebesar 53 orang (58.9%). Begitupun dengan responden yang

menjawab cukup efektif sebanyak 27 orang (30 %), alasannya relatif sama dengan yang menjawab sangat efektif yakni secara teknis memudahkan mereka untuk bisa lebih memahami kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan sebab tanpa melalui proses, tujuan yang berorientasi hasil pun akan sulit dicapai, sedangkan 10 responden sisanya menjawab tidak efektif karena mereka menilai bantuan yang diberikan belum cukup memadai. Dari analisa di atas dapat diketahui bahwa praktek kerja pemberdayaan yang merujuk pada integrasi tujuan antara orientasi proses dan orientasi hasil berjalan cukup efektif, dengan kata lain masyarakat partisipan lebih mudah memahami kegiatan pemberdayaan itu sendiri melalui serangkaian tahapan untuk mencapai tujuan akhir dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.7
Hasil Penelitian Keefektifan Tahapan Program Bagi Responden



X2.1

Keterangan ;

-  ; Sangat efektif
-  ; Efektif
-  ; Kurang efektif

Sumber : Hasil Analisa

3.1.2.2. Nilai Kepentingan Target yang Ada Pada Setiap Tahapan

Tabel 3.8
Nilai Kepentingan Target yang Ada Pada Setiap Tahapan Bagi Responden

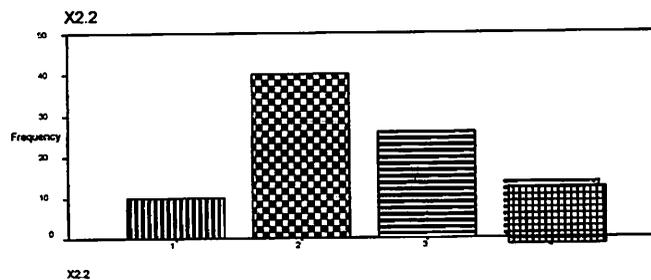
X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	10	11.1	11.1	11.1
2	40	44.4	44.4	55.6
3	26	28.9	28.9	84.4
4	14	15.6	15.6	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menjawab bahwa adanya target dalam tiap tahapan dalam program pemberdayaan penting bagi mereka yaitu sebesar 40 orang (44.4%). Begitupun dengan responden yang menjawab sangat penting sebanyak 10 orang (11.1 %), alasannya relatif sama dengan yang menjawab sangat efektif yakni secara teknis memudahkan mereka untuk bisa lebih memahami kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan sebab dengan ada target pada tiap-tiap tahapan membantu untuk mengukur perkembangan program, sedangkan 26 responden (28.9%) sisanya menjawab kurang penting dan 14 responden lainnya (15.6%) menjawab tidak penting karena mereka menilai bantuan yang diberikan belum cukup memadai sehingga menurut mereka itu belum memenuhi target. Dari analisa di atas dapat menunjukkan bahwa praktek kerja pemberdayaan yang menetapkan adanya target pada setiap tahapan merujuk pada keefektifan integrasi tujuan antara orientasi proses dan orientasi hasil, meskipun ada beberapa masyarakat yang menilai hal tersebut tidak cukup penting karena pemahaman mereka akan tujuan dari program pemberdayaan terbatas pada masalah pendanaan saja. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.8
Nilai Kepentingan Target yang Ada Pada Setiap Tahapan Bagi Responden



Keterangan ;

 ; Sangat penting

 ; Penting

 ; Kurang penting

 ; Tidak penting

Sumber : Hasil Analisa

3.1.2.3. Nilai Kepentingan Bantuan Dana / Insentif

Tabel 3.9
Nilai Kepentingan Bantuan Dana / Insentif Bagi Responden

X2.3

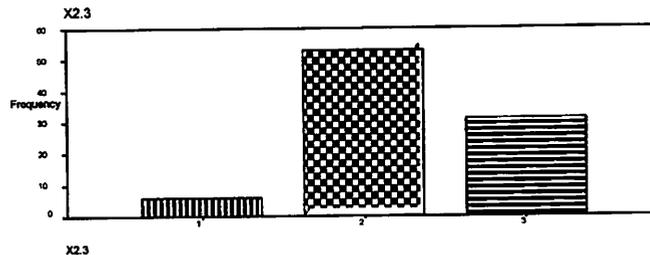
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	6	6.7	6.7	6.7
2	53	58.9	58.9	65.6
3	31	34.4	34.4	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menjawab bahwa adanya bantuan dana/insentif dalam program pemberdayaan cukup penting bagi mereka yaitu sebesar 53 orang (58.9%). Begitupun dengan responden yang menjawab sangat penting sebanyak 6 orang (6.7%), alasannya relatif sama yakni bantuan yang paling diharapkan adalah bantuan modal karena selama ini masyarakat selalu terbentur masalah modal, sedangkan 31 responden (34.4%) sisanya menjawab kurang penting karena mereka menilai bantuan yang diberikan tidak cukup menyelesaikan hanya dengan pemberian bantuan modal saja kepada masyarakat. Dari atas terlihat pemahaman masyarakat partisipan terhadap program peberdayaan masih belum jelas karena terkadang mereka berpikir bahwa

bantuan yang paling diharapkan adalah bantuan secara finansial saja Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.9
Nilai Kepentingan Bantuan Dana / Insentif Bagi Responden



Keterangan ;

-  ; Sangat penting
-  ; Penting
-  ; Kurang penting

Sumber : Hasil Analisa

3.1.2.4. Nilai Kepentingan Pembentukan Kelompok-Kelompok Masyarakat

Tabel 3.10
Nilai Kepentingan Pembentukan Kelompok-Kelompok Masyarakat Bagi Responden

X2.4

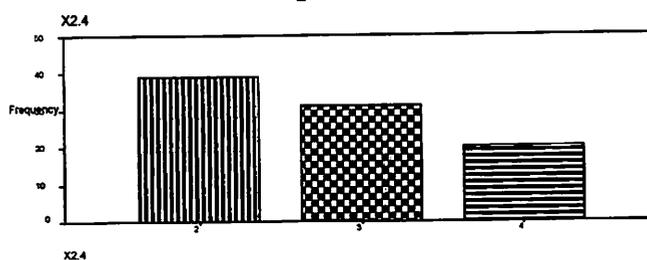
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	39	43.3	43.3	43.3
3	31	34.4	34.4	77.8
4	20	22.2	22.2	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menjawab bahwa adanya pembentukan kelompok-kelompok masyarakat dalam program pemberdayaan sangat penting bagi mereka yaitu sebesar 39 orang (43.3%). Sedangkan responden yang menjawab cukup penting sebanyak 31 orang (34.4%) serta 20 responden (22.2%) lainnya menjawab tidak penting, alasannya relatif sama yakni bantuan yang paling diharapkan adalah bantuan modal karena selama ini masyarakat selalu terbentur masalah modal. Pembentukan kelompok

masyarakat masyarakat di sini mengacu pada bentuk praktek dari tujuan yang berorientasi pada proses/tahapan program pemberdayaan, dimana masyarakat partisipan cukup paham dengan maksud dari program pemberdayaan Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.10
Nilai Kepentingan Pembentukan Kelompok-Kelompok Masyarakat Bagi Responden



Keterangan ;

▨ ; Sangat penting

▨ ; Penting

▨ ; Kurang penting

Sumber : Hasil Analisa

3.1.2.5. Nilai Keefektifan Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Responden

Tabel 3.11
Nilai Keefektifan Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Responden

X2.5

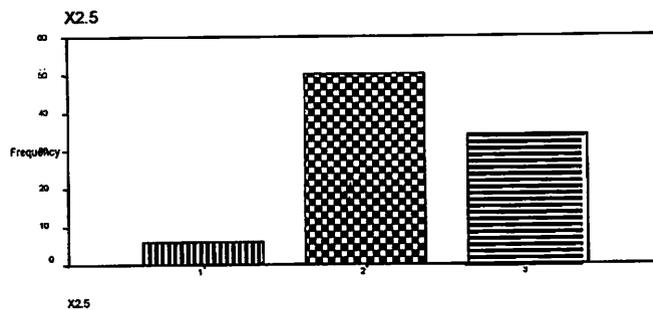
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	6	6.7	6.7	6.7
2	50	55.6	55.6	62.2
3	34	37.8	37.8	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menjawab bahwa adanya kegiatan pelatihan dan penyuluhan dalam program pemberdayaan cukup penting bagi mereka yaitu sebesar 50 orang (55.6%) serta 6 responden lainnya menjawab sangat penting. Sedangkan responden yang menjawab kurang penting sebanyak 34 orang (37.8%) alasannya relatif sama yakni bantuan yang paling diharapkan adalah bantuan modal karena selama ini masyarakat selalu

terbentur masalah modal. Adanya kegiatan pelatihan dan penyuluhan dalam program pemberdayaan di sini mengacu pada bentuk praktek dari tujuan yang berorientasi pada proses/tahapan program pemberdayaan, dimana masyarakat partisipan cukup paham dengan maksud dari program pemberdayaan, meskipun ada pemahaman beberapa masyarakat akan tujuan dari program pemberdayaan terbatas pada masalah pendanaan saja. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.11
Nilai Keefektifan Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Responden



Keterangan ;

 ; Sangat efektif

 ; Efektif

 ; Kurang efektif

Sumber : Hasil Analisa

3.1.3. Kesesuaian Bantuan Program (X₃)

3.1.3.1. Kesesuaian Bantuan Program Pemberdayaan

Tabel 3.12
Kesesuaian Bantuan Program Pemberdayaan Bagi Responden

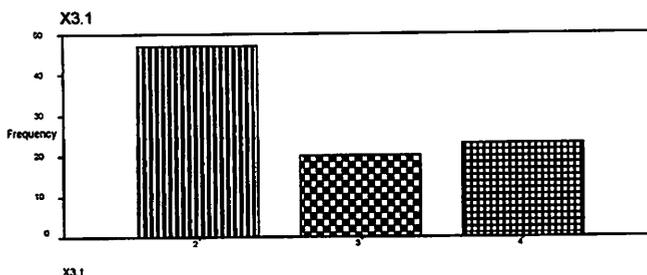
X3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	47	52.2	52.2	52.2
3	20	22.2	22.2	74.4
4	23	25.6	25.6	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menjawab bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan sudah cukup sesuai bagi mereka yaitu sebesar 47 orang (52.2%). Sedangkan responden yang menjawab kurang sesuai sebanyak 20 orang (22.2%) serta 23 responden lainnya menjawab masih tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat alasannya relatif sama yakni bantuan yang paling diharapkan adalah bantuan modal karena selama ini masyarakat selalu terbentur masalah modal. Dari analisa tersebut terlihat jelas bahwa lebih dari 50 % masyarakat paham dengan adanya rangkaian program kegiatan pemberdayaan, tingkat kephahaman masyarakat itulah yang merujuk kepada kesesuaian bentuk program pemberdayaan dengan kebutuhan masyarakatnya. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.12
Kesesuaian Bantuan Program Pemberdayaan Bagi Responden



Keterangan ;

-  ; Sesuai
-  ; Kurang sesuai
-  ; Tidak sesuai

Sumber : Hasil Analisa

3.1.3.2. Keberadaan Penetapan Skala Prioritas Penanganan Kebutuhan Masyarakat

Tabel 3.13
Keberadaan Penetapan Skala Prioritas Penanganan Kebutuhan Masyarakat Bagi Responden

x3.2

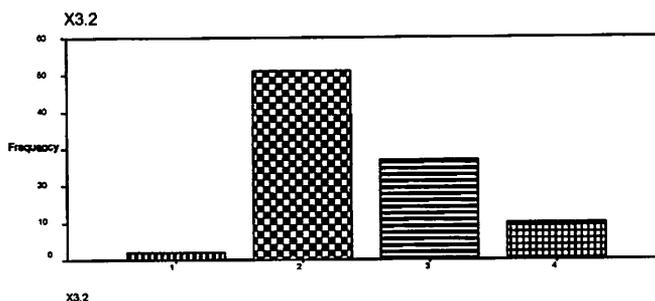
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	2.2	2.2	2.2
2	51	56.7	56.7	58.9
3	27	30.0	30.0	88.9
4	10	11.1	11.1	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menjawab bahwa keberadaan penetapan skala prioritas penanganan kebutuhan masyarakat sudah cukup sesuai bagi mereka yaitu sebesar 51 orang (52.2%) dan bahkan 2 orang responden menyatakan sangat setuju. Sedangkan responden yang menjawab kurang sesuai sebanyak 27 orang (30.0%) serta 10 responden lainnya (11.1) menjawab masih tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat alasannya relatif sama yakni proses penetapan skala prioritas penanganan kebutuhan masyarakat yang seharusnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam forum masyarakat, secara teknis terkadang masih terlalu mengandalkan pendapat dari kalangan-kalangan tertentu / tokoh, sehingga belum cukup memuat semua aspirasi dari masyarakatnya.

Kegiatan penetapan skala prioritas penanganan kebutuhan masyarakat merupakan parameter dari kesesuaian bentuk bantuan / program. Dari analisa tersebut terlihat jelas bahwa lebih dari 50 % masyarakat paham dengan keberadaan penetapan skala prioritas penanganan kebutuhan masyarakat, tingkat kephahaman masyarakat itulah yang merujuk kepada kesesuaian bentuk program pemberdayaan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.13
Keberadaan Penetapan Skala Prioritas Penanganan Kebutuhan Masyarakat
Bagi Responden



Keterangan ;

 ; Sangat sesuai

 ; Sesuai

 ; Kurang sesuai

 ; Tidak sesuai

Sumber : Hasil Analisa

3.1.3.3. Nilai Kepentingan Penentuan Skala Prioritas

Tabel 3.14
Nilai Kepentingan Penentuan Skala Prioritas Penanganan Bagi Responden

X3.3

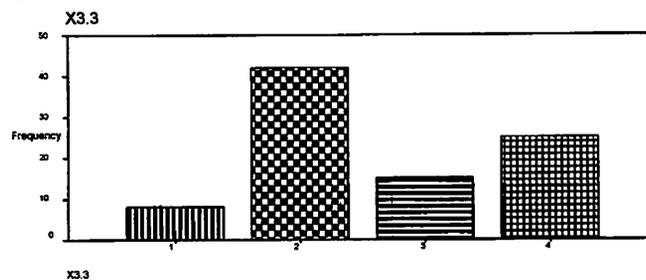
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	8	8.9	8.9	8.9
2	42	46.7	46.7	55.6
3	15	16.7	16.7	72.2
4	25	27.8	27.8	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menjawab bahwa keberadaan penentuan skala prioritas penanganan kebutuhan masyarakat cukup penting bagi mereka yaitu sebesar 42 orang (46.7%) dan bahkan 8 orang responden menyatakan sangat setuju. Sedangkan responden yang menjawab kurang penting sebanyak 15 orang (16.7%) serta 25 responden lainnya (27.8) menjawab masih tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat alasannya relatif

sama yakni proses penetapan skala prioritas penanganan kebutuhan masyarakat yang seharusnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam forum masyarakat, secara teknis terkadang masih terlalu mengandalkan pendapat dari kalangan-kalangan tertentu / tokoh, sehingga belum cukup memuat semua aspirasi dari masyarakatnya. Kegiatan penentuan skala prioritas penanganan kebutuhan masyarakat merupakan parameter dari kesesuaian bentuk bantuan / program. Dari analisa tersebut terlihat jelas bahwa lebih dari 50 % masyarakat paham dengan keberadaan penentuan skala prioritas penanganan kebutuhan masyarakat, tingkat kepehaman masyarakat itulah yang merujuk kepada kesesuaian bentuk program pemberdayaan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.14
Nilai Kepentingan Penetapan Skala Prioritas Penanganan Bagi Responden



Keterangan ;

-  ; Sangat penting
-  ; Penting
-  ; Kurang penting
-  ; Tidak penting

Sumber : Hasil Analisa

3.1.4. Kelengkapan Strategi Pemberdayaan (X₄)

3.1.4.1. Keefektifan Strategi Persuasif

Tabel 3.15
Nilai Keefektifan Strategi Persuasif Bagi Responden

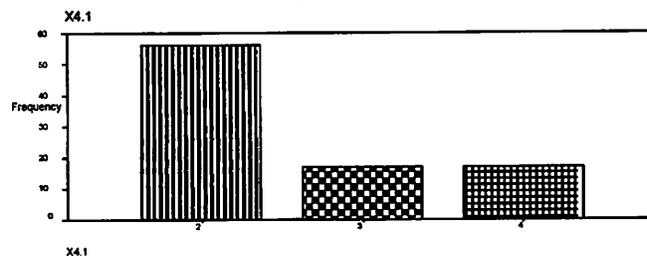
X4.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	56	62.2	62.2	62.2
3	17	18.9	18.9	81.1
4	17	18.9	18.9	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menjawab bahwa adanya kegiatan sosialisasi cukup efektif bagi mereka yaitu sebesar 56 orang (62.2%). Sedangkan responden yang menjawab kurang efektif sebanyak 17 orang (18.9%) serta 17 responden lainnya (18.9) menjawab tidak efektif alasannya relatif sama yakni proses sosialisasi yang tidak cukup intens bagi sebagian masyarakat tertentu masih belum cukup membuat masyarakat paham akan tujuan dari program pemberdayaan itu sendiri. Kegiatan sosialisasi merupakan parameter dari bentuk kelengkapan strategi program pemberdayaan, dimana sosialisasi disini menjadi bagian dari strategi persuasif yang dipraktekkan dalam program pemberdayaan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.15
Nilai Keefektifan Strategi Persuasif Bagi Responden



Keterangan ;

-  ; Efektif
-  ; Kurang efektif
-  ; Tidak efektif

Sumber : Hasil Analisa

3.1.4.2. Keefektifan Strategi Edukatif

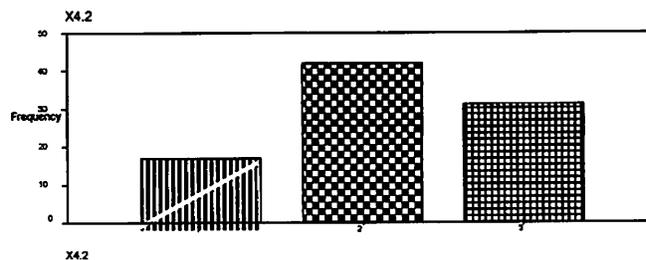
Tabel 3.16
Nilai Keefektifan Strategi Edukatif Bagi Responden
X4.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	17	18.9	18.9	18.9
2	42	46.7	46.7	65.6
3	31	34.4	34.4	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menjawab bahwa adanya kegiatan pelatihan, penyuluhan maupun kegiatan pembinaan cukup efektif bagi mereka yaitu sebesar 42 orang (46.7%) dan 17 orang responden lainnya (18.9%) menyatakan sangat setuju.. Sedangkan responden yang menjawab kurang efektif sebanyak 31 orang (34.4%) menjawab tidak efektif alasannya relatif sama yakni proses pelatihan dan penyuluhan bagi sebagian masyarakat tertentu masih belum cukup jika tidak ditunjang dengan modal usaha yang cukup. Kegiatan pelatihan, penyuluhan maupun kegiatan pembinaan merupakan parameter dari bentuk kelengkapan strategi program pemberdayaan, dimana kegiatan pelatihan, penyuluhan maupun kegiatan pembinaan disini menjadi bagian dari strategi edukatif yang dipraktekkan dalam program pemberdayaan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.16
Nilai Keefektifan Strategi Edukatif Bagi Responden



Keterangan ;

 ; Sangat efektif

 ; Efektif

 ; Kurang efektif

Sumber : Hasil Analisa

3.1.4.3. Keefektifan Strategi Fasilitatif

Tabel 3.17
Nilai Keefektifan Strategi Fasilitatif Bagi Responden

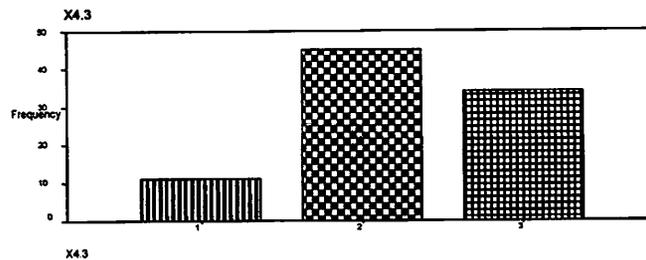
X4.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	11	12.2	12.2	12.2
2	45	50.0	50.0	62.2
3	34	37.8	37.8	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menjawab bahwa adanya bentuk-bentuk kegiatan pendampingan cukup efektif bagi mereka yaitu sebesar 45 orang (50.0%) dan 11 orang responden lainnya (12.2%) menyatakan sangat setuju.. Sedangkan responden yang menjawab kurang efektif sebanyak 34 orang (37.8%) menjawab tidak efektif alasannya relatif sama yakni bentuk-bentuk kegiatan pendampingan bagi sebagian masyarakat tertentu masih dianggap belum cukup jika tidak ditunjang dengan modal usaha yang cukup. Bentuk-bentuk kegiatan pendampingan merupakan parameter dari bentuk kelengkapan strategi program pemberdayaan, dimana bentuk-bentuk kegiatan pendampingan disini menjadi bagian dari strategi fasilitatif yang dipraktekkan dalam program pemberdayaan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut .

Grafik 3.17
Nilai Keefektifan Strategi Fasilitatif Bagi Responden



Keterangan ;

 ; Sangat efektif

 ; Efektif

 ; Kurang efektif

Sumber : Hasil Analisa

3.1.4.4. Tingkat Pemahaman Terhadap Strategi Program Pemberdayaan

Tabel 2.18
Tingkat Pemahaman Terhadap Strategi Program Pemberdayaan

X4.4

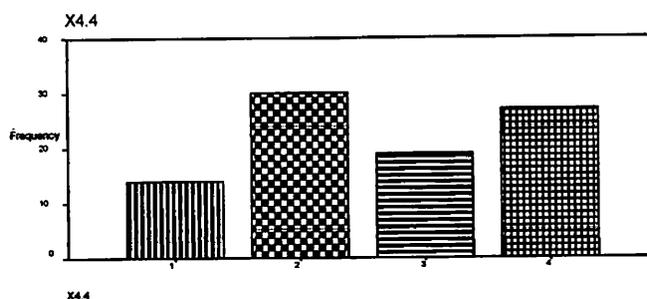
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	14	15.6	15.6	15.6
	2	30	33.3	33.3	48.9
	3	19	21.1	21.1	70.0
	4	27	30.0	30.0	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menyatakan memahami terhadap strategi persuasif, strategi edukatif dan strategi fasilitatif yang diterapkan pada pelaksanaan program pemberdayaan yaitu sebesar 30 orang (33.3%) dan 14 orang responden lainnya (15.6%) menyatakan sangat paham. Sedangkan responden yang menjawab kurang paham sebanyak 19 orang (21.1%) dan sisanya menyatakan tidak paham alasannya relatif sama yakni bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi, pembinaan-pembinaan dan kegiatan pendampingan bagi sebagian masyarakat tertentu masih dianggap belum cukup jika tidak ditunjang dengan modal usaha yang cukup. Bentuk-bentuk kegiatan

sosialisasi, pembinaan-pembinaan dan kegiatan pendampingan merupakan parameter dari bentuk kelengkapan strategi program pemberdayaan, dimana bentuk-bentuk kegiatan pendampingan disini menjadi bagian dari strategi persuasif, edukatif dan fasilitatif yang dipraktekkan dalam program pemberdayaan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.18
Tingkat Pemahaman Terhadap Strategi Program Pemberdayaan



Keterangan ;

 ; Sangat penting

 ; Penting

 ; Kurang penting

 ; Tidak penting

Sumber : Hasil Analisa

3.1.5. Kelengkapan Asas dan Prinsip (X₅)

3.1.5.1. Pencerminan Asas Persaman Hak dan Kewajiban

Tabel 3.19
Pencerminan Asas Persaman Hak dan Kewajiban Bagi Responden

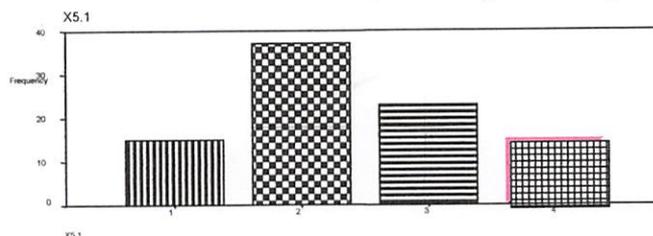
X5.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	15	16.7	16.7	16.7
	2	37	41.1	41.1	57.8
	3	23	25.6	25.6	83.3
	4	15	16.7	16.7	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menyatakan bahwa pencerminan asas persamaan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sudah cukup sesuai yaitu sebesar 37 orang (41.1%) dan 15 orang responden lainnya (16.7%) menyatakan sangat sesuai. Sedangkan responden yang menjawab kurang sesuai sebanyak 23 orang (25.6%) dan sisanya menyatakan tidak sesuai karena pada prakteknya ada kecenderungan bahwa yang lebih didengar adalah tokoh-tokoh dalam masyarakat saja atau lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang vokal saja, sehingga pencerminan persamaan hak dan kewajiban pun belum maksimal. Parameter untuk mengukur kelengkapan asas yang digunakan dalam program pemberdayaan secara kualitas mengacu kepada keadilan sosial yang mensiratkan pandangan tentang kejujuran dan pemerataan, persamaan hak dan kewajiban serta paham kemitraan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.19
Pencerminan Asas Persaman Hak dan Kewajiban Bagi Responden



Keterangan ;

-  ; Sangat sesuai
-  ; Sesuai
-  ; Kurang sesuai
-  ; Tidak sesuai

Sumber : Hasil Analisa

3.1.5.2. Pencerminan Asas Kemitraan

Tabel 3.20
Pencerminan Asas Kemitraan Bagi Responden

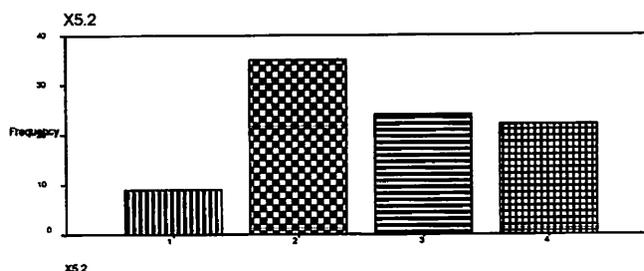
X5.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	9	10.0	10.0	10.0
	2	35	38.9	38.9	48.9
	3	24	26.7	26.7	75.6
	4	22	24.4	24.4	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menyatakan bahwa pencerminan kemitraan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sudah cukup sesuai yaitu sebesar 35 orang (38.9%) dan 9 orang responden lainnya (10.0%) menyatakan sangat sesuai. Sedangkan responden yang menjawab kurang sesuai sebanyak 24 orang (26.7%) dan sisanya menyatakan tidak sesuai karena kurangnya akses informasi untuk masuk ke sumber-sumber yang lain, sehingga pencerminan asas kemitraan pun belum maksimal. Parameter untuk mengukur kelengkapan asas yang digunakan dalam program pemberdayaan secara kualitas mengacu kepada keadilan sosial yang mensiratkan pandangan tentang kejujuran dan pemerataan, persamaan hak dan kewajiban serta paham kemitraan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.20
Pencerminan Asas Kemitraan Bagi Responden



Keterangan ;

-  ; Sangat sesuai
 ; Sesuai
 ; Kurang sesuai
 ; Tidak sesuai

Sumber : Hasil Analisa

2.1.5.3. Pencerminan Prinsip Transparansi

Tabel 3.21
. Pencerminan Prinsip Transparansi Bagi Responden

X5.3

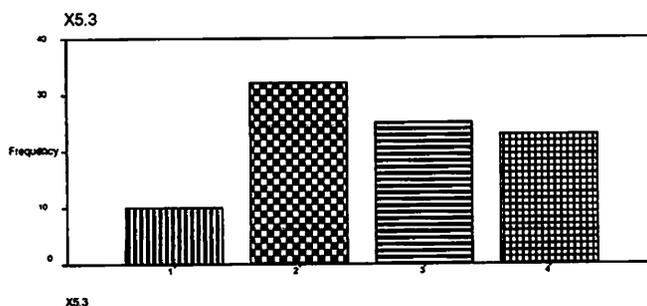
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	10	11.1	11.1	11.1
2	32	35.6	35.6	46.7
3	25	27.8	27.8	74.4
4	23	25.6	25.6	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menyatakan bahwa sering terjadi konflik-konflik yang antar kepentingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sudah cukup sesuai yaitu sebesar 32 orang (35.6%) dan 10 orang responden lainnya (11.1%) menyatakan sangat sering. Sedangkan responden yang menjawab jarang sebanyak 25 orang (27.8%) dan sisanya menyatakan tidak pernah, atas dasar seringnya terjadi konflik antar berbagai kepentingan tersebut dan pada akhirnya menghambat proses implementasi program pemberdayaan, sehingga bisa dikatakan pencerminan asas transparansi pun belum maksimal. Parameter untuk mengukur kelengkapan asas yang digunakan dalam program pemberdayaan secara kualitas mengacu kepada keadilan sosial yang mensiratkan pandangan tentang kejujuran dan pemerataan, persamaan hak dan kewajiban serta paham kemitraan. Praktek tentang kejujuran mengintepretasikan prinsip transparansi yang pada implementasi program pemberdayaannya cukup potensial untuk terjadi penyimpangan karena melihat prosentase terjadinya konflik antar kepentingan cukup berimbang dengan

prosentase masyarakat partisipan yang menjawab jarang terjadi konflik. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.21
Pencerminan Prinsip Transparansi Bagi Responden



Keterangan ;

-  ; Sangat sesuai
-  ; Sesuai
-  ; Kurang sesuai
-  ; Tidak sesuai

Sumber : Hasil Analisa

3.1.5.4. Kesesuaian Program Pemberdayaan dengan Prinsip Keberlanjutan

Tabel 3.22
Kesesuaian Program Pemberdayaan dengan Prinsip Keberlanjutan

X5.4

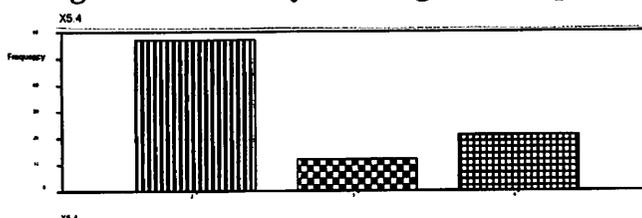
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	57	63.3	63.3
	3	12	13.3	76.7
	4	21	23.3	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menyatakan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sudah cukup sesuai dengan prinsip keberlanjutan yaitu sebesar 57 orang (63.3%) dan 12 orang responden lainnya (13.3%) menyatakan kurang sesuai. Sedangkan responden yang menjawab tidak sesuai sebanyak 21 orang (23.3%) karena mereka menilai bahwa keberlanjutan dapat diukur dengan besarnya modal yang tersedia, sehingga bisa dikatakan pencerminan asas keberlanjutan pun belum maksimal. Parameter untuk

mengukur kelengkapan prinsip yang digunakan adalah secara kualitas mengacu kepada keberlanjutan ekologi dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Bisa disimpulkan bahwa pencerminan prinsip keberlanjutan sudah tercermin pada implementasi program pemberdayaan karena jelas bahwa lebih dari 50 % responden menjawab cukup sesuai. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.22
Kesesuaian Program Pemberdayaan dengan Prinsip Keberlanjutan



Keterangan ;

 ; Sesuai

 ; kurang sesuai

 ; Tidak sesuai

Sumber : Hasil Analisa

3.1.6. Kelembagaan Masyarakat (X₆)

3.1.3.1. Keefektifan Kelompok Masyarakat

Tabel 3.23
Keefektifan Kelompok Masyarakat Bagi Responden

X5.1

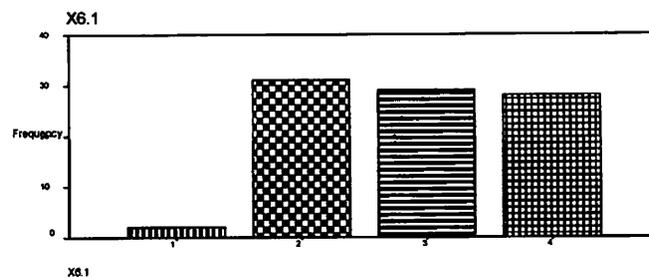
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	15	16.7	16.7	16.7
2	37	41.1	41.1	57.8
3	23	25.6	25.6	83.3
4	15	16.7	16.7	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menyatakan bahwa keberadaan kelompok masyarakat sudah mampu mewedahi semua aspirasi, ide, maupun gagasan yaitu sebesar 37 orang (41.1%) dan 15 orang responden lainnya (16.7%) menyatakan sangat mampu. Sedangkan responden yang

menjawab kurang mampu sebanyak 23 orang (25.6%) dan sisanya menyatakan keberadaan kelompok masyarakat belum mampu untuk mewadahi semua aspirasi, ide maupun gagasan masyarakat karena pada prakteknya masih terjadi kecenderungan bahwa yang mendominasi pada forum-forum kelompok masyarakat adalah orang-orang yang vocal saja ataupun tokoh-tokoh masyarakat saja. Dari hasil analisa di atas cukup bisa menunjukkan bahwa pada implementasi program pemberdayaan kontribusi kelembagaan cukup mampu melaksanakan efisiensi struktur kelembagaan dengan melihat prosentase responden yang menyatakan bahwa keberadaan kelompok masyarakat sebagai salah satu bentuk wadah kelembagaan cukup efektif berperan dalam pemberdayaan masyarakat . Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.23
Keefektifan Kelompok Masyarakat Bagi Responden



Keterangan ;

 ; Sangat mampu

 ; Mampu

 ; Kurang mampu

 ; Tidak mampu

Sumber : Hasil Analisa

3.1.6.2. Kemampuan Kelompok Masyarakat Dalam Melakukan Sosial Kontrol

Tabel 3.24
Kemampuan Kelompok Masyarakat Dalam Melakukan Sosial Kontrol

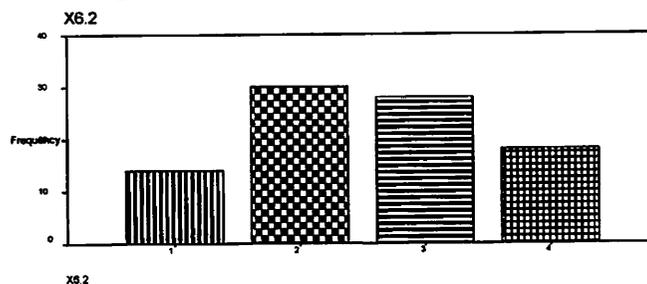
X6.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	14	15.6	15.6	15.6
2	30	33.3	33.3	48.9
3	28	31.1	31.1	80.0
4	18	20.0	20.0	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menyatakan bahwa keberadaan kelompok masyarakat sudah mampu melakukan sosial kontrol terhadap anggotanya yaitu sebesar 30 orang (33.3%) dan 14 orang responden lainnya (15.6%) menyatakan sangat mampu. Sedangkan responden yang menjawab kurang mampu sebanyak 28 orang (31.1%) dan sisanya menyatakan keberadaan kelompok masyarakat belum mampu untuk melakukan sosial kontrol terhadap anggotanya karena pada prakteknya masih sering terjadi konflik-konflik antar kepentingan seputar manajemen finansial. Dari hasil analisa di atas cukup bisa menunjukkan bahwa pada implementasi program pemberdayaan kontribusi kelembagaan ternyata belum mempunyai management yang visioner dengan melihat prosentase responden yang menyatakan bahwa kemampuan kelompok masyarakat dalam melakukan sosial kontrol sebagai salah satu bentuk wadah kelembagaan belum cukup efektif berperan dalam pemberdayaan masyarakat . Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.24
Kemampuan Kelompok Masyarakat Dalam Melakukan Sosial Kontrol



Keterangan ;

▤ ; Sangat mampu

▣ ; Mampu

▬ ; Kurang mampu

▧ ; Tidak mampu

Sumber : Hasil Analisa

3.1.7. Tingkat Kinerja LSM (X₇)

3.1.7.1. Peran LSM

Tabel 3.25
Kemampuan Peran LSM Bagi Responden

X7.1

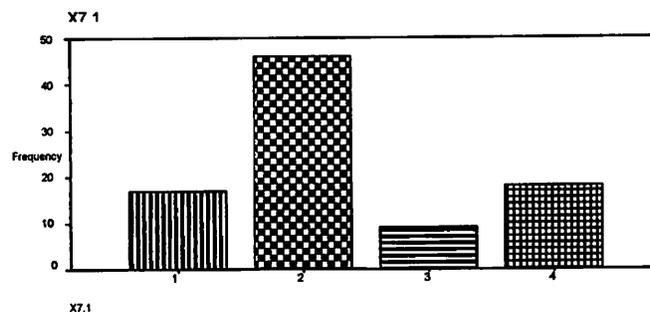
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	17	18.9	18.9	18.9
2	46	51.1	51.1	70.0
3	9	10.0	10.0	80.0
4	18	20.0	20.0	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menyatakan bahwa keberadaan LSM sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat yaitu sebesar 46 orang (51.1%) dan 17 orang responden lainnya (18.9%) menyatakan sangat mampu. Sedangkan responden yang menjawab kurang mampu sebanyak 9 orang (31.1%) dan sisanya menyatakan keberadaan LSM belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat. Kesimpulan dari hasil analisa di atas adalah peran LSM pada implementasi pemberdayaan sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat partisipan. Dengan kata lain LSM cukup

mempunyai kemampuan untuk mencapai efisiensi, efektifitas, produktifitas dan kualitas pelayanan Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.25
Kemampuan Peran LSM Bagi Responden



Keterangan ;

 ; Sangat mampu

 ; Mampu

 ; Kurang mampu

 ; Tidak mampu

Sumber : Hasil Analisa

3.1.7.2. Kemampuan LSM Sebagai Pendamping

Tabel 3.26
Kemampuan LSM Sebagai Pendamping Bagi Responden

X7.2

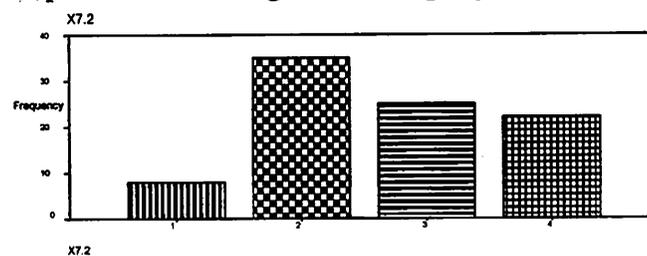
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	8	8.9	8.9	8.9
	2	35	38.9	38.9	47.8
	3	25	27.8	27.8	75.6
	4	22	24.4	24.4	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menyatakan bahwa keberadaan LSM sebagai pendamping sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat yaitu sebesar 35 orang (38.9%) dan 25 orang responden lainnya (27.8%) menyatakan sangat mampu. Sedangkan responden yang menjawab kurang mampu sebanyak 8 orang (8.9%) dan sisanya menyatakan keberadaan LSM belum mampu mengakomodir kebutuhan

masyarakat. Kesimpulan dari hasil analisa di atas adalah kemampuan LSM sebagai pendamping pada implementasi pemberdayaan cukup mempunyai kemampuan untuk mencapai efisiensi, efektifitas, produktifitas dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat partisipan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.26
Kemampuan LSM Sebagai Pendamping Bagi Responden



Keterangan ;

-  ; Sangat mampu
-  ; Mampu
-  ; Kurang mampu
-  ; Tidak mampu

Sumber : Hasil Analisa

3.1.8. Kemampuan Manajerial LSM (X₈)

Tabel 3.27
Kemampuan Manajerial LSM

X₈

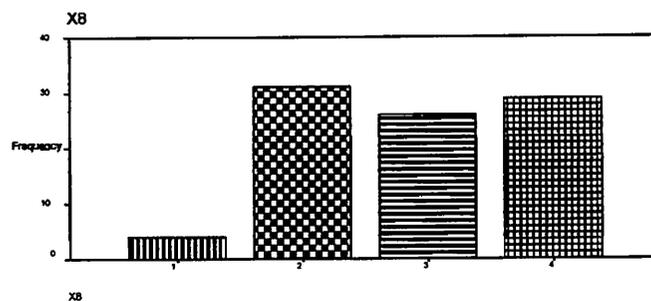
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	4	4.4	4.4	4.4
2	31	34.4	34.4	38.9
3	26	28.9	28.9	67.8
4	29	32.2	32.2	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menyatakan bahwa keberadaan LSM sudah mampu sebagai jembatan komunikasi antar pelaku, memberikan dorongan/motivasi dan semangat, intens dalam pendampingan/ tinggal dekat masyarakat, mampu membantu pencerahan sehingga tercipta dialog dan kerjasama yang sinergis yaitu sebesar 31 orang (34.4%) dan 26

orang responden lainnya (28.9%) menyatakan sangat mampu. Sedangkan responden yang menjawab kurang mampu sebanyak 29 orang (32.2%) dan sisanya menyatakan keberadaan LSM belum mampu menjalankan perannya sebagai jembatan komunikasi antar pelaku, dilihat dari belum begitu banyak akses terhadap program-program pemberdayaan yang bersumber pada donor lain. Kesimpulan dari analisa di atas menunjukkan bahwa kemampuan manajerial dari LSM tersebut cukup potensial terjadi penyimpangan karena LSM tidak cukup memberikan akses terhadap program-program pemberdayaan yang bersumber pada donor lain. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut : sebagai Ada aksesibilitas terhadap program-program pemberdayaan yang bersumber pada donor lain

Grafik 3.27
Tingkat Kinerja LSM



Keterangan ;

 ; Sangat mampu

 ; Mampu

 ; Kurang mampu

 ; Tidak mampu

Sumber : Hasil Analisa

3.1.9. Penguasaan Materi (X₉)

Tabel 3.28
Penguasaan Materi LSM

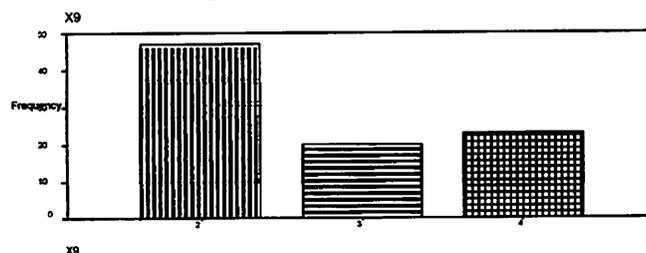
X₉

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	47	52.2	52.2	52.2
3	20	22.2	22.2	74.4
4	23	25.6	25.6	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menyatakan bahwa keberadaan LSM sudah mampu berperan sebagai fasilitator untuk memberikan, menyajikan informasi yang cukup jelas bagi masyarakat yaitu sebesar 47 orang (52.2%) dan 20 orang responden lainnya (22.2%) menyatakan kurang mampu. Sedangkan responden yang menjawab tidak mampu sebanyak 23 orang (25.6%) karena terkadang masyarakat masih cukup sulit memahami materi . Kemampuan LSM dalam penguasaan konsep dan implementasi tri daya (daya manusia, daya lingkungan dan daya ekonomi) cukup baik dilihat dari jumlah prosentase masyarakat partisipan lebih dari 50 % menyatakan mereka cukup paham dengan penyajian informasi dan materi-materi yang diberikan oleh LSM, sehingga dianggap kemampuan LSM sudah baik. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Tabel 3.28
Penguasaan Materi LSM



Keterangan ;

-  ; Mampu
-  ; Kurang mampu
-  ; Tidak mampu

Sumber : Hasil Analisa

3.1.10. Otonomi Masyarakat (X_{10})

3.1.10.1. Kemampuan Masyarakat Mengakses Informasi Menyangkut Berbagai Aspek Pembangunan

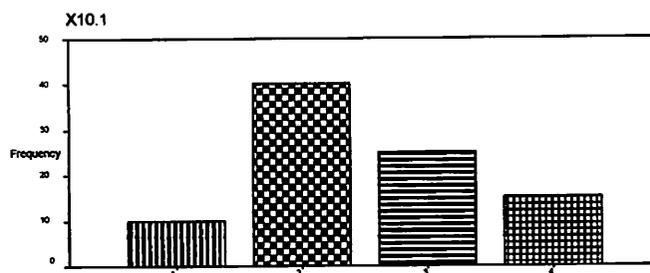
Tabel 3.29
Kemampuan Masyarakat Mengakses Informasi
X10.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	10	11.1	11.1	11.1
2	40	44.4	44.4	55.6
3	25	27.8	27.8	83.3
4	15	16.7	16.7	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menyatakan bahwa masyarakat sudah mampu mengakses informasi menyangkut berbagai aspek pembangunan yaitu sebesar 25 orang (27.8%) dan 10 orang responden lainnya (11.1%) menyatakan sangat mampu. Sedangkan responden yang menjawab kurang mampu sebanyak 40 orang (44.4%) dan sisanya menyatakan masyarakat tidak dapat mengembangkan kegiatan/program di luar agenda LSM karena masalah pendanaan. Parameter untuk mengukur variabel otonomi masyarakat dengan melihat kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi menyangkut berbagai aspek pembangunan, sehingga dari sini bisa diketahui bahwa masyarakat belum bisa menyampaikan gagasan tentang bagaimana cara untuk bisa mencapai keswadayaan / kemandirian karena masyarakat belum dapat mengembangkan kegiatan/program di luar agenda LSM karena masalah pendanaan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.29
Kemampuan Masyarakat Mengakses Informasi



X10.1

Keterangan ;

-  ; Sangat mampu
-  ; Mampu
-  ; Kurang mampu
-  ; Tidak mampu

Sumber : Hasil Analisa

3.1.10.2. Kemampuan Masyarakat Mengembangkan Modal Usaha, Mengakses Sumber Dana Lain, Melakukan Analisis Biaya Usaha Serta Mengembangkan Pemasaran Hasil produksinya

Tabel 3.30
Kemampuan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Ekonomi

X10.2

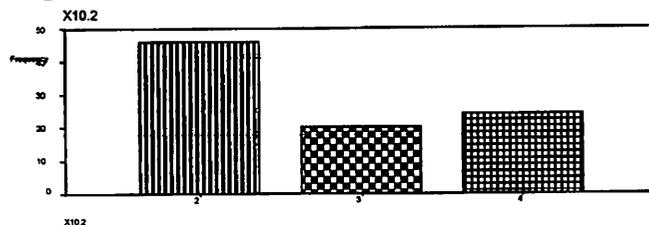
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	46	51.1	51.1	51.1
3	20	22.2	22.2	73.3
4	24	26.7	26.7	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menyatakan bahwa masyarakat mampu mengembangkan modal usaha, mengakses sumber dana lain, melakukan analisis biaya usaha serta mengembangkan pemasaran hasil produksinya yaitu sebesar 24 orang (26.7%) dan 20 orang responden lainnya (22.2%) menyatakan kurang mampu. Sedangkan responden yang menjawab tidak mampu sebanyak 46 orang (51.1%) menyatakan bahwa

masyarakat juga kebanyakan belum melihat keterkaitan antara usaha mereka dengan peluang pasar. Di samping itu ditunjang pula oleh hubungan masyarakat partisipan dengan pedagang karena adanya ikatan hutang piutang. Sampai saat ini fasilitas kredit dari lembaga keuangan formal masih belum menjangkau nelayan maupun petambak sehingga ketergantungan terhadap pedagang sangat tinggi. Dalam memberikan pinjaman, pedagang memberikan persyaratan yang sangat fleksibel, yaitu tidak membatasi waktu pinjaman maupun jaminan. Persyaratan yang diberikan hanyalah setiap hasil tangkapan harus dijual kepada mereka. Parameter untuk mengukur variabel otonomi masyarakat dengan melihat kemampuan masyarakat dalam mengembangkan modal usaha, mengakses sumber dana lain, melakukan analisis biaya usaha serta mengembangkan pemasaran hasil produksinya Dengan kata lain masyarakat belum bisa menyampaikan gagasan tentang bagaimana cara untuk bisa mencapai keswadayaan / kemandirian. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.30
Kemampuan Masyarakat Dalam Bidang Sosial Ekonomi



Keterangan ;

-  ; Tidak mampu
-  ; Kurang mampu
-  ; Mampu

Sumber : Hasil Analisa

3.1.11. Indikasi Penyimpangan Dari Tujuan Program Pemberdayaan (Y₁)

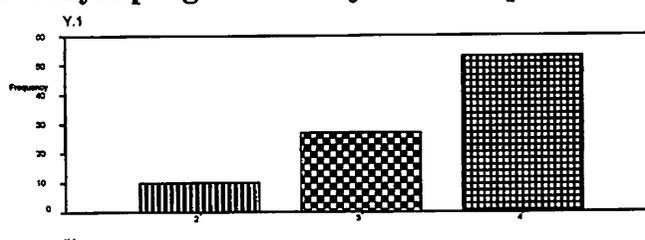
Tabel 3.31
Indikasi Penyimpangan Dari Tujuan Program Pemberdayaan
Y.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	10	11.1	11.1	11.1
3	27	30.0	30.0	41.1
4	53	58.9	58.9	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden sebesar 53 orang (58.9%) menyatakan tidak setuju apabila tujuan dari kegiatan pemberdayaan hanya menitik beratkan pada hasil akhirnya saja dan 10 orang responden lainnya (11.1%) menyatakan sangat setuju serta 27 orang (30.0%) responden lainnya menyatakan setuju. Kesimpulan dari analisa di atas adalah bahwa indikasi penyimpangan dari tujuan program pemberdayaan di atas kecil penyimpangannya. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.31
Indikasi Penyimpangan Dari Tujuan Konsep Pemberdayaan



Keterangan ;

-  ; Setuju
-  ; Kuramg setuju
-  ; Tidak setuju

Sumber : Hasil Analisa

3.1.12. Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Bantuan (Y₂)

Tabel 3.32
Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Bantuan Pemberdayaan

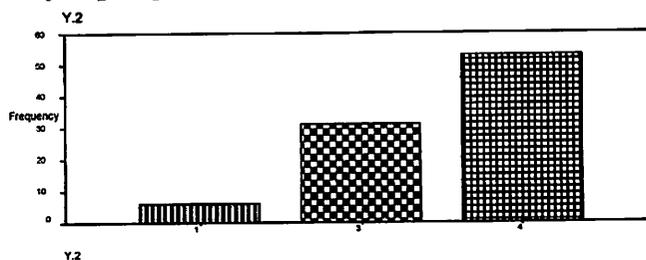
Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	6.7	6.7	6.7
	3	31	34.4	34.4	41.1
	4	53	58.9	58.9	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden sebesar 53 orang (58.9%) menyatakan tidak setuju bilamana sasaran yang dituju adalah bantuan-bantuan yang berupa insentif serta tidak bersifat menumbuhkan sikap sadar dan peduli masyarakat terhadap pemberdayaan, dan 6 orang responden lainnya (6.7%) menyatakan sangat setuju serta 31 orang (34.4%) responden lainnya menyatakan kurang setuju. Kesimpulan dari analisa di atas adalah bahwa indikasi penyimpangan dari kesesuaian bantuan program pemberdayaan di atas kecil penyimpangannya. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.32
Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Bantuan Pemberdayaan



Keterangan ;

 ; Setuju

 ; Kurang setuju

 ; Tidak setuju

Sumber : Hasil Analisa

3.1.13.Indikasi Penyimpangan Dari Kelengkapan Strategi Konsep Pemberdayaan (Y₃)

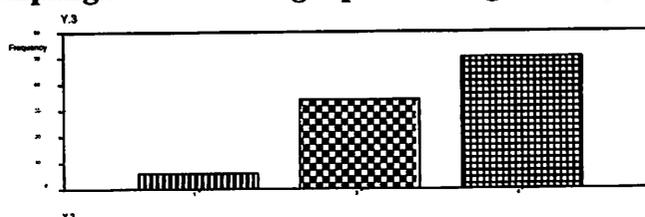
Tabel 3.33
Indikasi Penyimpangan Dari Kelengkapan Strategi Konsep Pemberdayaan
Y.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	6	6.7	6.7	6.7
3	34	37.8	37.8	44.4
4	50	55.6	55.6	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden sebesar 50 orang (55.6%) menyatakan tidak setuju bila strategi yang digunakan belum cukup memberikan pengaruh positif karena masyarakat belum memahami dan mengerti maksud dari kegiatan yang dilakukan, dan 6 orang responden lainnya (6.7%) menyatakan kurang setuju serta 34 orang (37.8%) responden lainnya menyatakan setuju. Kesimpulan dari analisa di atas adalah bahwa indikasi penyimpangan dari kelengkapan strategi dalam program pemberdayaan di atas kecil penyimpangannya.Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.33
Indikasi Penyimpangan Dari Kelengkapan Strategi Konsep Pemberdayaan



Keterangan ;

 ; Setuju

 ; Kurang setuju

 ; Tidak setuju

Sumber : Hasil Analisa

3.1.14. Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Asas (Y₄)

Tabel 3.34
Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Asas

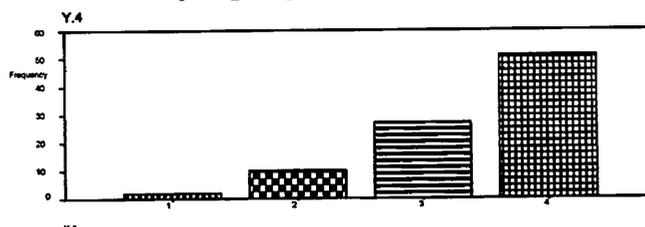
Y.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	2.2	2.2	2.2
2	10	11.1	11.1	13.3
3	27	30.0	30.0	43.3
4	51	56.7	56.7	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden sebesar 51 orang (58.7%) menyatakan tidak setuju apabila tidak ada asas persamaan hak dan kewajiban serta kemitraan dalam implementasi konsep pemberdayaan dan 27 orang responden lainnya (30%) menyatakan kurang setuju serta 10 orang (11.1%) responden lainnya menyatakan setuju dan sisanya 2 responden menyatakan sngat setuju. Kesimpulan dari analisa di atas adalah bahwa indikasi penyimpangan dari kesesuaian asas yang digunakan dalam program pemberdayaan di atas kecil penyimpangannya. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.34
Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Asas



Keterangan ;

-  ; Sangat setuju
-  ; Setuju
-  ; Kurang setuju
-  ; Tidak setuju

Sumber : Hasil Analisa

3.1.15. Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Prinsip (Y₅)

Tabel 3.35
Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Prinsip

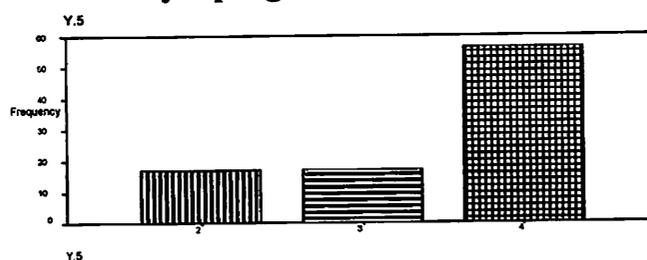
Y.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	17	18.9	18.9	18.9
3	17	18.9	18.9	37.8
4	56	62.2	62.2	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden sebesar 51 orang (58.7%) menyatakan tidak setuju apabila tidak ada asas persamaan hak dan kewajiban serta kemitraan dalam implementasi konsep pemberdayaan dan 27 orang responden lainnya (30%) menyatakan kurang setuju serta 10 orang (11.1%) responden lainnya menyatakan setuju dan sisanya 2 responden menyatakan sngat setuju. Kesimpulan dari analisa di atas adalah bahwa indikasi penyimpangan dari kesesuaian prinsip yang digunakan dalam program pemberdayaan di atas kecil penyimpangannya. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.35
Indikasi Penyimpangan Dari Kesesuaian Prinsip



Keterangan ;

 ; Setuju

 ; Kuramg setuju

 ; Tidak setuju

Sumber : Hasil Analisa

3.1.16. Indikasi Penyimpangan Dari Kelembagaan (Y₆)

Tabel 3.36
Indikasi Penyimpangan Dari Kelembagaan

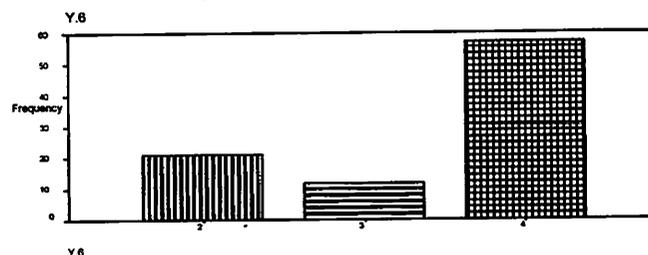
Y.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	21	23.3	23.3	23.3
3	12	13.3	13.3	36.7
4	57	63.3	63.3	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden sebesar 57 orang (63.3%) menyatakan tidak setuju apabila kelembagaan masyarakat dikatakan sudah cukup kompatibel dengan pranata sosial yang ada serta belum bisa mewedahi semua aspirasi dan mewujudkan integrasi serta keteraturan dalam masyarakat dan 12 orang responden lainnya (13.3%) menyatakan kurang setuju serta 21 orang (23.3%) responden lainnya menyatakan setuju. Kesimpulan dari analisa di atas adalah bahwa indikasi penyimpangan dari variabel kelembagaan yang digunakan dalam program pemberdayaan di atas potensial terjadi penyimpangan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.36
Indikasi Penyimpangan Dari Kelembagaan



Keterangan ;

 ; Setuju

 ; Kurang setuju

 ; Tidak setuju

Sumber : Hasil Analisa

3.1.17. Indikasi Penyimpangan Dari Peran Fasilitator / Agen Pembaharu (Y7)

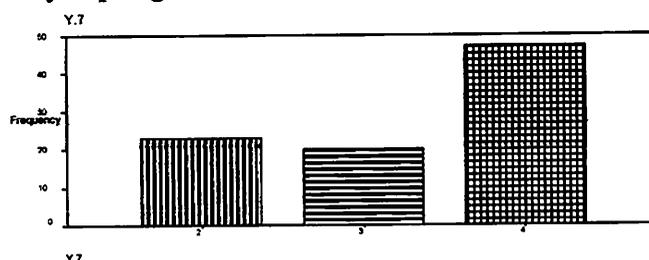
Tabel 3.37
Indikasi Penyimpangan Dari Peran Fasilitator / Agen Pembaharu
Y.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	23	25.6	25.6	25.6
3	20	22.2	22.2	47.8
4	47	52.2	52.2	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden sebesar 47 orang (52.2%) menyatakan tidak setuju apabila peran fasilitator dikatakan belum efektif karena tidak mampu menjembatani komunikasi antar pelaku, tidak mampu memberikan dorongan (motivasi) dan semangat, tidak intens dalam pendampingan atau tinggal dekat masyarakat, dan tidak bisa memberikan pencerahan sehingga tidak tercipta dialog dan kerjasama yang sinergis dan 20 orang responden lainnya (22.2%) menyatakan kurang setuju serta 23 orang (25.6%) responden lainnya menyatakan setuju. Kesimpulan dari analisa di atas adalah bahwa indikasi penyimpangan dari peran fasilitator yang digunakan dalam program pemberdayaan di atas kecil penyimpangannya. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.37
Indikasi Penyimpangan Dari Peran Fasilitator / Agen Pembaharu



Keterangan ;

 ; Setuju

 ; Kurang setuju

 ; Tidak setuju

Sumber : Hasil Analisa

3.1.18. Indikasi Penyimpangan Dari Penguasaan Materi (Y₈)

Tabel 3.38
Indikasi Penyimpangan Dari Penguasaan Materi

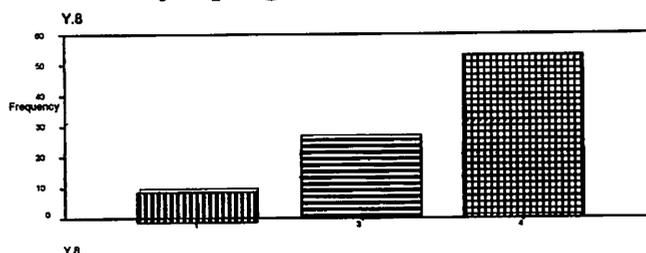
Y.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	10	11.1	11.1	11.1
3	27	30.0	30.0	41.1
4	53	58.9	58.9	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden sebesar 53 orang (58.9%) menyatakan tidak setuju apabila dikatakan belum ada penguasaan konsep dan implementasi tri daya (daya manusia, daya lingkungan dan daya ekonomi) oleh fasilitator dan 27 orang responden lainnya (30%) menyatakan kurang setuju serta 10 orang (11.1%) responden lainnya menyatakan sangat setuju. Kesimpulan dari analisa di atas adalah bahwa indikasi penyimpangan dari penguasaan subtansi materi yang digunakan dalam program pemberdayaan di atas kecil penyimpangannya. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.38
Indikasi Penyimpangan Dari Penguasaan Materi



Keterangan ;

 ; Setuju

 ; Kurang setuju

 ; Tidak setuju

Sumber : Hasil Analisa

3.1.19. Indikasi Penyimpangan Dari Otonomi Masyarakat (Y₉)

Tabel 3.39
Indikasi Penyimpangan Dari Otonomi Masyarakat

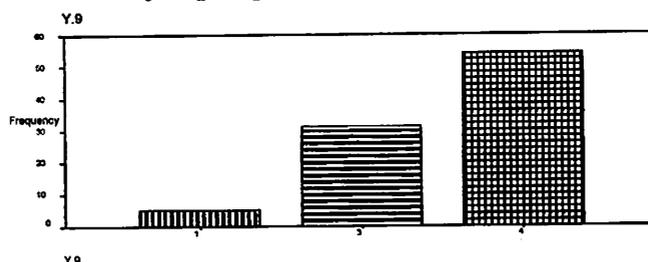
Y.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	5	5.6	5.6	5.6
3	31	34.4	34.4	40.0
4	54	60.0	60.0	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden sebesar 54 orang (60%) menyatakan tidak setuju apabila dikatakan penguatan kemandirian / otonomi masyarakat di bidang ekonomi, sudah cukup berkemampuan untuk mengembangkan modal usaha, baik individu, bersama / berkelompok, atau mengakses sumber dana lainnya dan belum cukup berkemampuan untuk melakukan analisis biaya usaha dengan baik serta belum cukup berkemampuan untuk mengembangkan pemasaran hasil produksinya paling tidak di tingkat lokal, serta belum cukup berkemampuan untuk mengembangkan pengertian tentang bentuk kemandirian secara personal maupun berkelompok. dan 31 orang responden lainnya (34.4%) menyatakan kurang setuju serta 5 orang (5.6%) responden sisa lainnya menyatakan setuju. Kesimpulan dari analisa di atas adalah bahwa indikasi penyimpangan dari otonomi masyarakat yang digunakan dalam program pemberdayaan di atas besar kemungkinan terjadi penyimpangan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 3.39
Indikasi Penyimpangan Dari Otonomi Masyarakat



Keterangan ;

-  ; Setuju
-  ; Kurang setuju
-  ; Tidak setuju

Sumber : Hasil Analisa

3.2. Analisa Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat

Sesuai dengan klasifikasi jumlah penduduk Desa Karangsong menurut tingkat pendidikan yang sudah dijabarkan pada sub bab sebelumnya lalu diperbandingkan lagi dengan karakteristik partisipan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka jelas terlihat bahwa kebanyakan masyarakat desa Karangsong lebih khusus lagi adalah partisipan yang menjadi sampel penelitian adalah lulusan SD. Dengan demikian kualitas sumberdaya manusia di Desa Karangsong bisa dikatakan rendah. Hal ini menjadi salah satu indikasi ketidakberdayaan masyarakat yang merujuk pada keterbatasan kemampuan individual secara akademis yang bisa mempengaruhi kepercayaan diri, kemampuan untuk memotivasi diri dan kemampuan untuk mengendalikan diri serta kesiapan mereka dalam menerima program pemberdayaan. Namun di sisi lain mayoritas masyarakat partisipan adalah masyarakat usia produktif yang cukup potensial baik keberadaan secara fisik maupun kesiapan psikis mereka untuk menerima kegiatan pemberdayaan.

Selain itu, dari klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian dan tingkat pendapatan serta tingkat pengeluaran masyarakat yang juga telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya kemudian diperbandingkan lagi dengan karakteristik partisipan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka dapat diketahui juga

bahwa mayoritas masyarakat desa Karangsong bermata pencaharian sebagai buruh perikanan atau kenelayan dengan tingkat pendapatan berkisar 250,000 - 499,000/bulan dan tingkat pengeluaran masyarakat kurang dari 500,000/bulan, ditambah lagi mayoritas masyarakat partisipan adalah berstatus menikah dan mempunyai kecenderungan tingkat kebutuhan hidup mereka lebih tinggi dibandingkan yang belum menikah, sehingga berpengaruh pada tingkat pendapatan dan pengeluaran mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi psikis mereka yakni keinginan mereka untuk memperbaiki hidup mereka lebih besar. Sekalipun masih mencukupi namun kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu bisa menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan pendapatan karena sebagian besar masyarakatnya adalah buruh petani tambak dan nelayan yang terbukti secara fisik mengalami abrasi pantai ataupun penurunan kualitas perairan sehingga benar-benar mengalami krisis karena adanya permasalahan lingkungan, yakni penurunan budidaya mangrove dan budidaya tambak udang karena pengaruh serangan hama, penyakit atau predator maupun gangguan manusia, baik terlihat langsung maupun dari informasi masyarakat. Padahal di sisi lain masyarakat menggantungkan hidupnya pada produktifitas perairan. Selain itu adanya tekanan yang sering menimpa mereka seperti datangnya awal musim ikan dan akhir musim ikan, yang menyebabkan mereka hanya menghasilkan ikan sedikit sering menimbulkan kesulitan dan kekurangan.

3.3. Analisa Potensi Sosial Budaya Masyarakat

Dalam kegiatan sosial budaya, partisipasi masyarakat sangat berperan didalamnya. Bahwa kegiatan dalam partisipasi merupakan kegiatan usaha bersama. Kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Karangsong ini cukup banyak, baik terorganisasi secara formal maupun tidak. Praktek-praktek partisipasi masyarakat dalam berorganisasi secara formal cukup berkembang, terlihat dari adanya kelembagaan formal yakni BPD (Badan Perwakilan Desa), 3 kelompok petambak yaitu ; kelopak, bina sejahtera dan rahayu serta 1 kelompok nelayan, yaitu pelagis. Sedangkan kelembagaan informal yang ada adalah kelembagaan pedagang – nelayan / pedagang – petambak. Karena kehidupan

masih mengandalkan dirinya pada bidang kenelayanan yang umumnya cukup baik, maka kesadaran akan tradisi juga nampak sekali tercermin dalam aktivitas kenelayanan. Selain itu kepatuhannya kepada perangkat desa dan tokoh desa masih sangat tinggi, sehingga perilaku saling hormat dan gotong royong dalam kegiatan desa juga berkembang dengan baik. Namun di sisi lain, kepatuhan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap tokoh desa dan perangkat desa justru membuat terjadi kecenderungan bahwa yang lebih didengar adalah tokoh-tokoh dalam masyarakat saja atau lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang vokal saja, sehingga menunjukkan suatu sikap cara pandang umum masyarakat yang bersangkutan dalam menilai peran mereka dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi kurang obyektif. Hal tersebut merupakan nilai budaya walaupun merupakan konsepsi yang abstrak, juga bisa mempengaruhi tindakan masyarakat partisipan secara langsung, bahkan juga bisa menyebabkan timbulnya pola-pola cara berpikir tertentu pada individu yang bersangkutan.

3.4. Analisa Bentuk Konsep Program Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan ini dijabarkan dalam bentuk rangkaian kegiatan yang melibatkan dan mendorong masyarakat kelompok sasaran menjadi mandiri melalui suatu proses yang panjang dengan target merubah paradigma masyarakat tentang makna mandiri yang sebenarnya yaitu ditekankan dengan pembinaan rasa tanggung jawab yang besar oleh masyarakat tentang kegiatan pemberdayaan mulai dari awal proses hingga akhir proses. Dalam hal ini Pihak Wetlands International memberikan bantuan dana bergulir terhadap masyarakat untuk pembiayaan seluruh kegiatan pemberdayaan dari awal hingga akhir hingga mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pihak Wetlands International, sehingga sasaran yang dituju mandiri atau bisa dilepas tanpa meminta kembali hasil dari masyarakat selaku obyek pemberdayaan yang telah dibantu.

Penjabaran mengenai rangkaian proses kegiatan ini dimulai dari sosialisasi, penyadaran masyarakat dan pendampingan kelompok hingga mandiri. Bisa disimpulkan bahwa hampir keseluruhan rangkaian proses kegiatan mulai dari penentuan tujuan, jenis bantuan, strategi, serta asas dan prinsip-prinsip yang

digunakan cukup sesuai dengan definisi operasional konsep pemberdayaan yang ada. Namun, sesuai dengan hasil analisa distribusi relatif yang telah dilakukan pada implementasinya terdapat beberapa ketidaksesuaian yang mengarah pada terjadinya penyimpangan implementasi program pemberdayaan, antara lain :

1. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber dilakukan cukup cermat sehingga dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan, namun belum cukup mempunyai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat. Bisa dilihat dari masyarakat tidak dapat mengembangkan kegiatan/program di luar agenda LSM karena masalah pendanaan. Kemampuan managerial pihak Wetlands disini belum cukup berkemampuan dalam memberikan akses terhadap program-program pemberdayaan yang bersumber pada donor lain
2. Ada kecenderungan bahwa yang lebih didengar adalah tokoh-tokoh dalam masyarakat saja atau lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang vokal saja, sehingga pencerminan asas dan prinsip persamaan hak dan kewajiban pun belum maksimal. Ini mengindikasikan bahwa ada penyimpangan dalam pencerminan kesesuaian asas dan prinsip yang digunakan program pemberdayaan masyarakat.
3. Keberadaan kelompok masyarakat belum mampu untuk melakukan sosial kontrol terhadap anggotanya karena pada prakteknya masih sering terjadi konflik-konflik antar kepentingan seputar manajemen finansial, praktek asas dan prinsip transparansi juga belum maksimal. Ini mengindikasikan bahwa kegiatan penguatan kapasitas kelompok yang dilakukan oleh Wetlands International belum cukup berhasil untuk pada akhirnya bisa membuat kelompok masyarakat mampu untuk melakukan sosial kontrol terhadap anggotanya sendiri.

3.5. Analisis Data

3.5.1. Hasil Analisa Korelasi

Berikut ini adalah keluaran hasil analisa korelasi yang berfungsi sebagai alat penguji dari hipotesa pertama yaitu membuktikan kebenaran adanya

digunakan cukup sesuai dengan definisi operasional konsep pemberdayaan yang ada. Namun, sesuai dengan hasil analisa distribusi relatif yang telah dilakukan pada implementasinya terdapat beberapa ketidaksesuaian yang mengarah pada terjadinya penyimpangan implementasi program pemberdayaan, antara lain :

1. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber dilakukan cukup cermat sehingga dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan, namun belum cukup mempunyai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat. Bisa dilihat dari masyarakat tidak dapat mengembangkan kegiatan/program di luar agenda LSM karena masalah pendanaan. Kemampuan managerial pihak Wetlands disini belum cukup berkemampuan dalam memberikan akses terhadap program-program pemberdayaan yang bersumber pada donor lain
2. Ada kecenderungan bahwa yang lebih didengar adalah tokoh-tokoh dalam masyarakat saja atau lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang vokal saja, sehingga pencerminan asas dan prinsip persamaan hak dan kewajiban pun belum maksimal. Ini mengindikasikan bahwa ada penyimpangan dalam pencerminan kesesuaian asas dan prinsip yang digunakan program pemberdayaan masyarakat.
3. Keberadaan kelompok masyarakat belum mampu untuk melakukan sosial kontrol terhadap anggotanya karena pada prakteknya masih sering terjadi konflik-konflik antar kepentingan seputar manajemen finansial, praktek asas dan prinsip transparansi juga belum maksimal. Ini mengindikasikan bahwa kegiatan penguatan kapasitas kelompok yang dilakukan oleh Wetlands International belum cukup berhasil untuk pada akhirnya bisa membuat kelompok masyarakat mampu untuk melakukan sosial kontrol terhadap anggotanya sendiri.

3.5. Analisis Data

3.5.1. Hasil Analisa Korelasi

Berikut ini adalah keluaran hasil analisa korelasi yang berfungsi sebagai alat penguji dari hipotesa pertama yaitu membuktikan kebenaran adanya

penyimpangan implementasi konsep pemberdayaan di Desa Karangsong. Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan signifikansinya bisa dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.31.
Hasil Analisa Korelasi

Variabel	r hitung	r tabel	Sig	Keterangan
X ₁ -Y	0.102	0.205	0.337	Tidak signifikan
X ₂ -Y	0.090	0.205	0.396	Tidak signifikan
X ₃ -Y	-0.505	0.205	0.000	Signifikan
X ₄ -Y	0.021	0.205	0.845	Tidak signifikan
X ₅ -Y	-0.047	0.205	0.661	Tidak signifikan
X ₆ -Y	-0.666	0.205	0.000	Signifikan
X ₇ -Y	-0.192	0.205	0.070	Tidak signifikan
X ₈ -Y	-0.484	0.205	0.000	Signifikan
X ₉ -Y	-0.595	0.205	0.000	Signifikan
X ₁₀ -Y	-0.759	0.205	0.000	Signifikan

Sumber : Hasil Analisa Korelasi

Berdasarkan table di atas, maka penjabaran dari hasil analisis korelasi adalah sebagai berikut :

1. Hasil analisis korelasi product moment diperoleh r hitung variabel X₁ dengan Y sebesar $0.102 < r \text{ tabel } (0.205)$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0.337 > 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara variabel X₁ dengan Y dan bertanda positif, ini berarti bila X₁ tinggi maka Y tetap demikian juga sebaliknya bila X₁ rendah maka Y juga tetap.
2. Hasil analisis korelasi product moment diperoleh r hitung variabel X₂ dengan Y sebesar $0.090 < r \text{ tabel } (0.205)$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0.396 > 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara variabel X₂ dengan Y dan bertanda positif, ini berarti bila X₂ tinggi maka Y tetap demikian juga sebaliknya bila X₂ rendah maka Y juga tetap.
3. Hasil analisis korelasi product moment diperoleh r hitung variabel X₃ dengan Y sebesar $(-) 0.505 > r \text{ tabel } (0.205)$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X₃ dengan Y dan bertanda negatif, ini berarti bila X₃ tinggi maka Y rendah demikian juga sebaliknya bila X₃ rendah maka Y tinggi.

4. Hasil analisis korelasi product moment diperoleh r hitung variabel X_4 dengan Y sebesar $0.021 < r \text{ tabel } (0.205)$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0.845 > 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara variabel X_4 dengan Y dan bertanda positif, ini berarti bila X_4 tinggi maka Y tetap demikian juga sebaliknya bila X_4 rendah maka Y juga tetap.
5. Hasil analisis korelasi product moment diperoleh r hitung variabel X_5 dengan Y sebesar $(-) 0.047 < r \text{ tabel } (0.205)$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0.661 > 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara variabel X_5 dengan Y dan bertanda negatif, ini berarti bila X_5 tinggi maka Y tetap demikian juga sebaliknya bila X_5 rendah maka Y juga tetap.
6. Hasil analisis korelasi product moment diperoleh r hitung variabel X_6 dengan Y sebesar $(-) 0.666 > r \text{ tabel } (0.205)$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X_6 dengan Y dan bertanda negatif, ini berarti bila X_6 tinggi maka Y rendah demikian juga sebaliknya bila X_6 rendah maka Y tinggi.
7. Hasil analisis korelasi product moment diperoleh r hitung variabel X_7 dengan Y sebesar $(-) 0.192 < r \text{ tabel } (0.205)$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0.070 > 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara variabel X_7 dengan Y dan bertanda negatif, ini berarti bila X_7 tinggi maka Y tetap demikian juga sebaliknya bila X_7 rendah maka Y juga tetap.
8. Hasil analisis korelasi product moment diperoleh r hitung variabel X_8 dengan Y sebesar $(-) 0.484 > r \text{ tabel } (0.205)$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X_8 dengan Y dan bertanda negatif, ini berarti bila X_8 tinggi maka Y rendah demikian juga sebaliknya bila X_8 rendah maka Y tinggi.
9. Hasil analisis korelasi product moment diperoleh r hitung variabel X_9 dengan Y sebesar $(-) 0.595 > r \text{ tabel } (0.205)$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X_9 dengan Y dan bertanda negatif, ini berarti bila X_9 tinggi maka Y rendah demikian juga sebaliknya bila X_9 rendah maka Y tinggi.

10. Hasil analisis korelasi product moment diperoleh r hitung variabel X_{10} dengan Y sebesar (-) $0.759 > r$ tabel (0.205) dengan tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X_{10} dengan Y dan bertanda negatif, ini berarti bila X_{10} tinggi maka Y rendah demikian juga sebaliknya bila X_{10} rendah maka Y tinggi.

3.5.2. Hasil Analisa Regresi Berganda

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas $X_1, X_2, \text{ dan } X_3 \dots X_{10}$ secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel terikat Y digunakan uji t dengan rumus :

$$t = \frac{b}{Sb}$$

Dimana :

T = t hitung

B = koefisien regresi

Sb = standar error

Untuk mengetahui besarnya nilai t hitung dan signifikansinya, maka bisa dilihat pada tabel 2.32. hasil analisis regresi berganda di bawah ini.

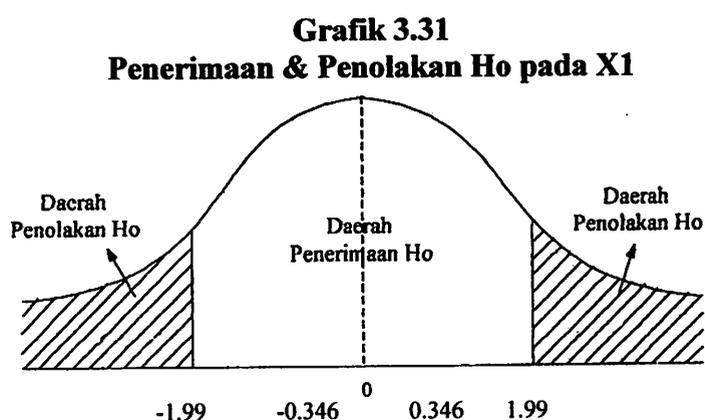
Tabel 3.32.
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	t hitung	t tabel	Sig	Keterangan
X_1	0.346	1.99	0.730	Tidak signifikan
X_2	0.195	1.99	0.846	Tidak signifikan
X_3	-1.195	1.99	0.236	Tidak signifikan
X_4	-0.052	1.99	0.959	Tidak signifikan
X_5	-0.434	1.99	0.665	Tidak signifikan
X_6	-2.529	1.99	0.013	Signifikan
X_7	-0.045	1.99	0.965	Tidak signifikan
X_8	0.062	1.99	0.950	Tidak signifikan
X_9	-0.402	1.99	0.688	Tidak signifikan
X_{10}	-4.550	1.99	0.000	Signifikan

Sumber : Hasil Analisa Regresi

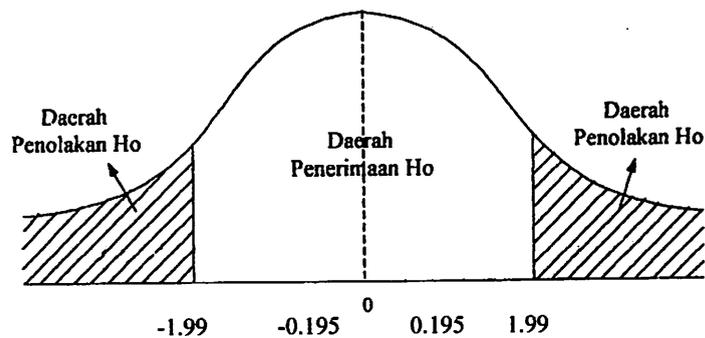
Berdasarkan table di atas, maka penjabaran dari hasil analisis korelasi adalah sebagai berikut :

1. Hasil uji t yang dibantu dengan program SPSS diperoleh nilai t hitung variabel bebas X_1 sebesar 0.346 dengan t tabel pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 89$ sebesar 1.99. Hal ini berarti t hitung (0.346) < t tabel (1.99) dengan tingkat signifikansi sebesar $0.730 > 0.05$ yang berarti pula H_a ditolak dan H_o diterima. Dengan kata lain bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas karakteristik partisipan (X_1) terhadap variabel terikat yakni penyimpangan implementasi program pemberdayaan (Y) Dapat disimpulkan bahwa bila naik turunnya X_1 tidak berpengaruh terhadap nilai Y . Grafik penerimaan dan penolakan H_o dapat dilihat sebagai berikut :



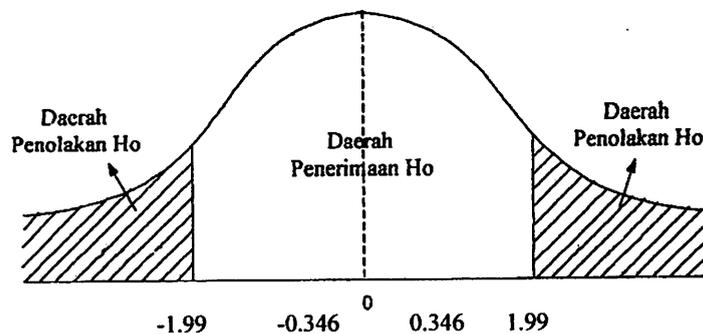
2. Hasil uji t yang dibantu dengan program SPSS diperoleh nilai t hitung variabel bebas X_2 sebesar 0.195 dengan t tabel pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 89$ sebesar 1.99. Hal ini berarti t hitung (0.195) < t tabel (1.99) dengan tingkat signifikansi sebesar $0.846 > 0.05$ yang berarti pula H_a ditolak dan H_o diterima. Dengan kata lain bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas orientasi tujuan yang terintegrasi (X_2) terhadap variabel terikat yakni penyimpangan implementasi program pemberdayaan (Y) Dapat disimpulkan bahwa bila naik turunnya X_2 tidak berpengaruh terhadap nilai Y . Grafik penerimaan dan penolakan H_o dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.32
Penerimaan & Penolakan Ho pada X1

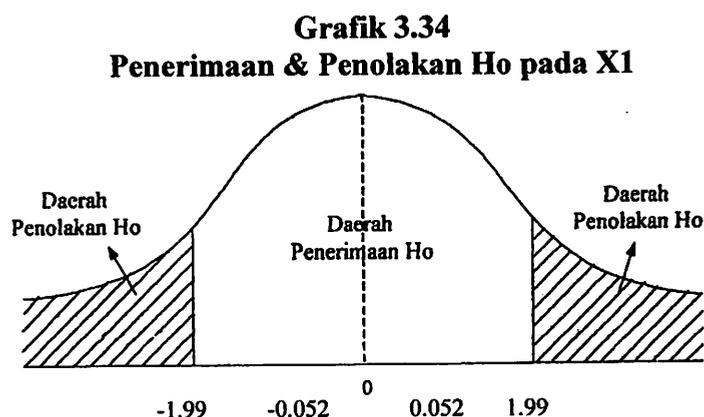


3. Hasil uji t yang dibantu dengan program SPSS diperoleh nilai t hitung variabel bebas X_3 sebesar 0.346 dengan t tabel pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 89$ sebesar 1.99. Hal ini berarti t hitung (-) (1.195) < t tabel (1.99) dengan tingkat signifikansi sebesar $0.236 > 0.05$ yang berarti pula H_a ditolak dan H_o diterima. Dengan kata lain bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas kesesuaian program bantuan (X_3) terhadap variabel terikat yakni penyimpangan implementasi program pemberdayaan (Y) Dapat disimpulkan bahwa bila naik turunnya X_3 tidak berpengaruh terhadap nilai Y. Grafik penerimaan dan penolakan H_o dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.33
Penerimaan & Penolakan Ho pada X1

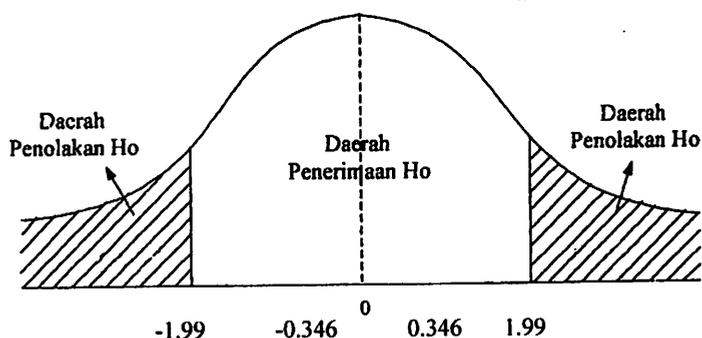


4. Hasil uji t yang dibantu dengan program SPSS diperoleh nilai t hitung variabel bebas X_4 sebesar 0.346 dengan t tabel pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 89$ sebesar 1.99. Hal ini berarti t hitung (-) (0.052) < t tabel (1.99) dengan tingkat signifikansi sebesar $0.959 > 0.05$ yang berarti pula H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan kata lain bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas kelengkapan strategi (X_4) terhadap variabel terikat yakni penyimpangan implementasi program pemberdayaan (Y) Dapat disimpulkan bahwa bila naik turunnya X_4 tidak berpengaruh terhadap nilai Y. Grafik penerimaan dan penolakan H_0 dapat dilihat sebagai berikut :



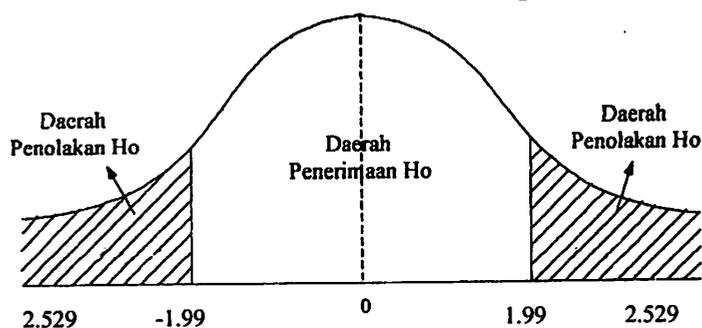
5. Hasil uji t yang dibantu dengan program SPSS diperoleh nilai t hitung variabel bebas X_5 sebesar 0.346 dengan t tabel pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 89$ sebesar 1.99. Hal ini berarti t hitung (0.346) < t tabel (1.99) dengan tingkat signifikansi sebesar $0.665 > 0.05$ yang berarti pula H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan kata lain bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas kelengkapan asas dan prinsip (X_5) terhadap variabel terikat yakni penyimpangan implementasi program pemberdayaan (Y) Dapat disimpulkan bahwa bila naik turunnya X_5 tidak berpengaruh terhadap nilai Y. Grafik penerimaan dan penolakan H_0 dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.35
Penerimaan & Penolakan Ho pada X1

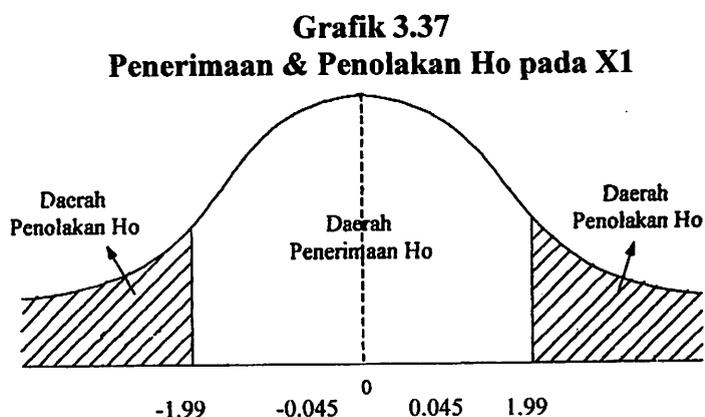


6. Hasil uji t yang dibantu dengan program SPSS diperoleh nilai t hitung variabel bebas X_6 sebesar -2.529 dengan t tabel pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 89$ sebesar 1.66. Hal ini berarti t hitung (-) 2.529 > t tabel (1.99) dengan tingkat signifikansi sebesar $0.013 < 0.05$ yang berarti pula H_a ditolak dan H_o diterima. Dengan kata lain bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas kelembagaan (X_6) terhadap variabel terikat variabel terikat yakni penyimpangan implementasi program pemberdayaan (Y). Dapat disimpulkan bahwa naik turunnya X_6 berpengaruh terhadap nilai Y. Grafik penerimaan dan penolakan H_o dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.36
Penerimaan & Penolakan Ho pada X1

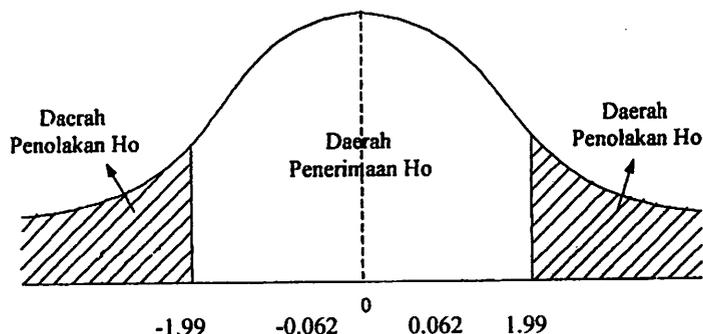


7. Hasil uji t yang dibantu dengan program SPSS diperoleh nilai t hitung variabel bebas X_7 sebesar 0.346 dengan t tabel pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 89$ sebesar 1.99. Hal ini berarti t hitung (-) (0.045) < t tabel (1.99) dengan tingkat signifikansi sebesar $0.965 > 0.05$ yang berarti pula H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan kata lain bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas kemampuan manajerial (X_7) terhadap variabel terikat yakni penyimpangan implementasi program pemberdayaan (Y) Dapat disimpulkan bahwa bila naik turunnya X_7 tidak berpengaruh terhadap nilai Y. Grafik penerimaan dan penolakan H_0 dapat dilihat sebagai berikut :



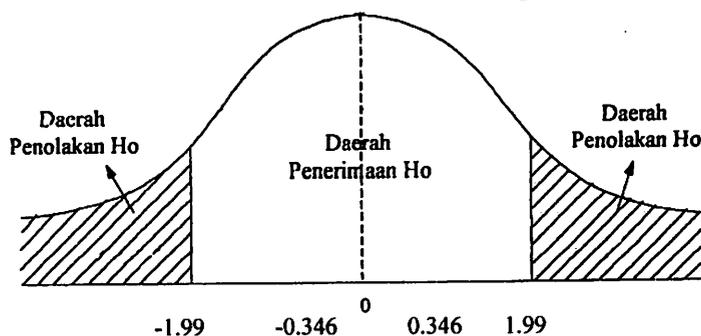
8. Hasil uji t yang dibantu dengan program SPSS diperoleh nilai t hitung variabel bebas X_8 sebesar 0.062 dengan t tabel pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 89$ sebesar 1.99. Hal ini berarti t hitung (0.062) < t tabel (1.99) dengan tingkat signifikansi sebesar $0.950 > 0.05$ yang berarti pula H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan kata lain bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas tingkat kinerja (X_8) terhadap variabel terikat yakni penyimpangan implementasi program pemberdayaan (Y) Dapat disimpulkan bahwa bila naik turunnya X_8 tidak berpengaruh terhadap nilai Y. Grafik penerimaan dan penolakan H_0 dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.38
Penerimaan & Penolakan Ho pada X1



9. Hasil uji t yang dibantu dengan program SPSS diperoleh nilai t hitung variabel bebas X_9 sebesar 0.346 dengan t tabel pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 89$ sebesar 1.99. Hal ini berarti $t \text{ hitung } (0.346) < t \text{ tabel } (1.99)$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0.730 > 0.05$ yang berarti pula H_a ditolak dan H_o diterima. Dengan kata lain bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas karakteristik partisipan (X_9) terhadap variabel terikat yakni penyimpangan implementasi program pemberdayaan (Y). Dapat disimpulkan bahwa bila naik turunnya X_9 tidak berpengaruh terhadap nilai Y . Grafik penerimaan dan penolakan H_o dapat dilihat sebagai berikut :

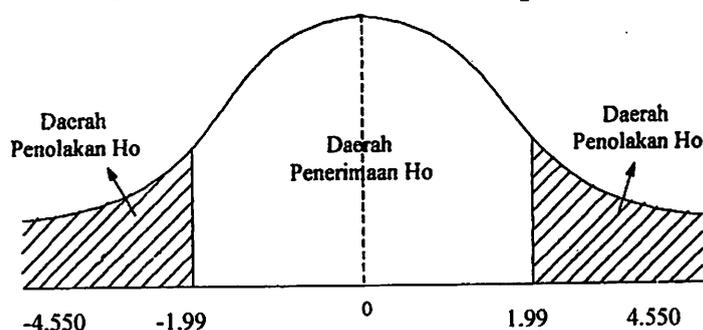
Grafik 3.39
Penerimaan & Penolakan Ho pada X1



10. Hasil uji t yang dibantu dengan program SPSS diperoleh nilai t hitung variabel bebas X_{10} sebesar -4.550 dengan t tabel pada $\alpha = 5\%$ dan $df = 89$ sebesar 1.66.

Hal ini berarti t hitung $(-4.550 > t$ tabel (1.99) dengan tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ yang berarti pula H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan kata lain bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas kelembagaan (X_{10}) terhadap variabel terikat variabel terikat yakni penyimpangan implementasi program pemberdayaan (Y). Dapat disimpulkan bahwa naik turunnya X_{10} berpengaruh terhadap nilai Y . Grafik penerimaan dan penolakan H_0 dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.40
Penerimaan & Penolakan H_0 pada X_1



DAFTAR PUSTAKA

Suharto Edi, Ph.D.: *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung : PT Refika Aditama, 2005)

Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan II, 2005)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990)

Masri Singarimbun & Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, – Rev. ed.-, 1989)

Rokhmin Dahuri, et. al., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996)

Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

Ringkasan Hasil Lokakarya Pada Seminar Nasional Perumahan dan Pemukiman Menyongsong Abad 21 (Jakarta: Kantor Menpera: 27-28 Oktober 1997)

Eko Budiharjo, *Tata Ruang dan Pola Perkembangan Indonesia* (Malang: Jurnal PWK, Juli 1992)

Sumodiningrat, Gunawan., *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 1999)

Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: CIDES, Cet. I, 1996)

Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta : Gava Media, cetakan pertama, 2004)

Sudaryono Sastrosasmita, *Pemberdayaan Desa-Kota Bagi Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan*, Jurnal PWK Vol.9, No.1/Januari 1998

UU.No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Mar'at Prof, Dr., *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*, Tahun 1981, Hal.107

Soekanto, Soerjono., *Sosiologi Suatu Pengantar*, Tahun 1990

**Rekap Hasil Kuisisioner
Masyarakat Desa Karangsong**

No.	Pertanyaan	Responden (90)	Prosentase
I	UMUM		
	Jenis kelamin :		
	▪ Laki – laki	54	60
	▪ Perempuan	36	40
	Status Perkawinan :		
	▪ Menikah	79	87.8
	▪ Belum Menikah	11	12.2
	Umur :		
	▪ < 20 tahun	2	2.2
	▪ 20 – 59	83	92.2
	▪ > 59 tahun	5	5.6
	Pekerjaan :		
	▪ Nelayan Pemilik Kapal	27	30
	▪ Nelayan Pemilik Tambak	18	20
	▪ Buruh Perikanan / Kenelayanan	45	50
	Pendidikan terakhir :		
	▪ SD	61	67.8
▪ SMP	11	12.2	
▪ SMU	6	6.7	
▪ PT	12	13.3	
Pendapatan masyarakat setiap bulan :			
▪ < 250 ribu	24	26.7	
▪ 250 ribu – 499 ribu	50	55.6	
▪ 500 ribu – 1 juta	10	11.1	
▪ > 1 juta	6	6.7	
II	KHUSUS		
	1. Menurut anda, apakah program pemberdayaan yang dilaksanakan yang terdiri dari banyak tahapan itu cukup efektif bagi anda?		
	a. Sangat efektif	53	58.9
	b. Efektif	27	30.0
	c. Kurang efektif	10	11.1
	d. Tidak efektif	-	-
	Alasan :		
	▪ Efektif karena tanpa proses, hasil akhir akan sulit dicapai		
	▪ Tidak efektif karena bantuan yang diberikan belum cukup memadai		
	2. Menurut anda, adanya target-target tertentu dalam tiap tahapan itu penting untuk dilaksanakan?		
	a. Sangat penting	10	11.1
b. Penting	40	44.4	
c. Kurang penting	26	28.9	
d. Tidak penting	14	15.6	
Alasan :			
▪ Tidak cukup penting karena bantuan modal yang ada belum cukup memadai sehingga menurut mereka bantuan belum memenuhi target.			

No.	Pertanyaan	Responden (90)	Prosentase
3.	Menurut anda, pentingkah pemberian bantuan dana / insentif untuk masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat? a. Sangat penting b. Penting c. Kurang penting d. Tidak penting Alasan : ▪ Penting karena bantuan yang paling diharapkan adalah bantuan modal karena selama ini masyarakat selalu terbentur masalah modal	6 53 31 -	6.7 58.9 34.4 -
4.	Pentingkah dibentuk kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan? a. Sangat penting b. Penting c. Kurang penting d. Tidak penting Alasan : ▪ Tidak cukup penting karena bantuan yang paling diharapkan adalah bantuan modal karena selama ini masyarakat selalu terbentur masalah modal	- 39 31 20	- 43.3 34.4 22.2
5.	Efektifkah adanya kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat? a. Sangat efektif b. Efektif c. Kurang efektif d. Tidak efektif Alasan : ▪ Menjadi tidak cukup penting karena bantuan yang paling diharapkan adalah bantuan modal karena selama ini masyarakat selalu terbentur masalah modal	6 50 34 -	6.7 55.6 37.8 -
6.	Sesuaiakah program-program pemberdayaan yang telah dilaksanakan untuk anda? a. Sangat sesuai b. Sesuai c. Kurang sesuai d. Tidak sesuai	- 47 20 23	- 52.2 22.2 25.6
7.	Apakah perlu dalam program pemberdayaan ada penetapan skala prioritas penanganan kebutuhan masyarakat yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama? a. Sangat perlu b. Perlu c. Kurang perlu d. Tidak perlu	2 51 27 10	2.2 56.7 30 11.1
8.	Pentingkah penentuan skala prioritas untuk penanganan kebutuhan masyarakat? a. Sangat penting b. Penting	8 42	8.9 46.7

No.	Pertanyaan	Responden (90)	Prosentase
	c. Kurang penting	15	16.7
	d. Tidak penting	25	27.8
9.	Perlukah kegiatan sosialisasi dan akses informasi dimasukkan dalam agenda program pemberdayaan?		
	a. Sangat perlu	-	-
	b. Perlu	56	62.2
	c. Kurang perlu	17	18.9
	d. Tidak perlu	17	18.9
10.	Perlukah kegiatan penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan atau kegiatan pembinaan lainnya dimasukkan dalam agenda program pemberdayaan?		
	a. Sangat perlu	17	18.9
	b. Perlu	42	16.7
	c. Kurang perlu	31	34.4
	d. Tidak perlu	-	-
11.	Perlukah kegiatan pendampingan masyarakat dimasukkan dalam agenda program pemberdayaan?		
	a. Sangat perlu	11	12.2
	b. Perlu	45	50
	c. Kurang perlu	34	37.8
	d. Tidak perlu	-	-
12.	Pahamkah anda terhadap kegiatan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan, pendampingan masyarakat itu dilaksanakan dalam program pemberdayaan?		
	a. Sangat perlu	14	15.6
	b. Perlu	30	33.3
	c. Kurang perlu	19	21.1
	d. Tidak perlu	27	30
13.	Apakah pencerminan asas persamaan hak dan kewajiban sesuai dengan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan?		
	a. Sangat sesuai	15	16.7
	b. Sesuai	37	41.1
	c. Kurang sesuai	23	25.6
	d. Tidak sesuai	15	16.7
14.	Apakah pencerminan asas kemitraan yang memposisikan masyarakat sebagai rekan, subyek sekaligus obyek, sesuai dengan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan?		
	a. Sangat sesuai	10	11.1
	b. Sesuai	32	35.6
	c. Kurang sesuai	25	27.8
	d. Tidak sesuai	23	25.6
	Alasan :		
	▪ Tidak sesuai karena kurangnya akses informasi untuk masuk ke sumber-sumber yang lain,		

No.	Pertanyaan	Responden (90)	Prosentase
	<p>15. Seringkah terjadi konflik antar kepentingan akibat kurangnya penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dijalankan ?</p> <p>a. Sangat sesuai</p> <p>b. Sesuai</p> <p>c. Kurang sesuai</p> <p>d. Tidak sesuai</p> <p>Alasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atas dasar seringnya terjadi konflik antar berbagai kepentingan seputar manajemen finansial yang kurang transparan dan pada akhirnya menghambat proses implementasi program pemberdayaan 	<p>-</p> <p>57</p> <p>12</p> <p>21</p>	<p>-</p> <p>63.3</p> <p>13.3</p> <p>23.3</p>
	<p>16. Apakah hasil yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan ini sesuai dengan prinsip keberlanjutan?</p> <p>a. Sangat sesuai</p> <p>b. Sesuai</p> <p>c. Kurang sesuai</p> <p>d. Tidak sesuai</p> <p>Alasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak sesuai karena bantuan modal belum memadai ▪ Masyarakat tidak dapat mengembangkan kegiatan/program di luar agenda LSM karena masalah pendanaan 	<p>2</p> <p>31</p> <p>29</p> <p>28</p>	<p>2.2</p> <p>34.4</p> <p>32.2</p> <p>31.1</p>
	<p>17. Apakah keberadaan kelembagaan masyarakat sudah cukup mampu mewedahi semua aspirasi, ide, atau gagasan anda?</p> <p>a. Sangat sesuai</p> <p>b. Sesuai</p> <p>c. Kurang sesuai</p> <p>d. Tidak sesuai</p> <p>Alasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan kelompok masyarakat belum mampu untuk mewedahi semua aspirasi, ide maupun gagasan masyarakat karena pada prakteknya masih terjadi kecenderungan bahwa yang mendominasi pada forum-forum kelompok masyarakat adalah orang-orang yang vocal saja ataupun tokoh-tokoh masyarakat saja 	<p>14</p> <p>30</p> <p>28</p> <p>18</p>	<p>15.6</p> <p>33.3</p> <p>31.1</p> <p>20</p>
	<p>18. Apakah kelompok-kelompok masyarakat sudah mampu melaksanakan system social control atau pengawasan terhadap tingkah laku anggotanya?</p> <p>a. Sangat sesuai</p> <p>b. Sesuai</p> <p>c. Kurang sesuai</p> <p>d. Tidak sesuai</p> <p>Alasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada prakteknya masih sering terjadi konflik-konflik antar kepentingan seputar manajemen finansial yang tidak transparan 	<p>14</p> <p>30</p> <p>28</p> <p>18</p>	<p>15.6</p> <p>33.3</p> <p>31.1</p> <p>20</p>
	<p>19. Apakah perlu ada aturan formal / informal yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan?</p>		

No.	Pertanyaan	Responden (90)	Prosentase
	a. Sangat perlu	17	18.9
	b. Perlu	33	36.7
	c. Kurang perlu	31	34.4
	d. Tidak perlu	9	10
20.	Apakah dalam hal ini peran LSM sebagai mitra masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat?		
	a. Sangat mampu	17	18.9
	b. Mampu	46	51.1
	c. Kurang mampu	9	10
	d. Tidak mampu	18	20
21.	Apakah peran LSM sebagai pendamping masyarakat cukup mampu membantu masyarakat secara intens?		
	a. Sangat mampu	8	8.9
	b. Mampu	35	38.9
	c. Kurang mampu	25	27.8
	d. Tidak mampu	22	24.4
22.	Apakah peran LSM sebagai jembatan komunikasi antar pelaku, memberikan dorongan/motivasi dan semangat, intens dalam pendampingan/ tinggal dekat masyarakat, mampu membantu pencerahan sehingga tercipta dialog dan kerjasama yang sinergis?		
	a. Sangat mampu	4	4.4
	b. Mampu	31	34.4
	c. Kurang mampu	26	28.9
	d. Tidak mampu	29	32.2
23.	Apakah materi serta kapasitas LSM sebagai fasilitator mampu memberikan, menyajikan informasi yang cukup jelas bagi anda?		
	a. Sangat mampu	-	-
	b. Mampu	47	52.2
	c. Kurang mampu	20	22.2
	d. Tidak mampu	23	25.6
	Alasan :		
	▪ Tidak mampu karena belum paham karena kurangnya informasi tentang materi-materi pemberdayaan		
24.	Apakah dengan adanya kegiatan masyarakat mampu mengembangkan modal usaha, mengakses sumber dana lain, mampu melakukan analisis biaya usaha serta mengembangkan pemasaran hasil produksinya?		
	a. Sangat mampu	10	11.1
	b. Mampu	40	44.4
	c. Kurang mampu	25	27.8
	d. Tidak mampu	15	16.7
	Alasan :		
	▪ Tidak mampu karena bantuan modal belum memadai		
	▪ Masyarakat tidak dapat mengembangkan kegiatan/program di luar agenda LSM karena masalah		

No.	Pertanyaan	Responden (90)	Prosentase
	<p>pendanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat juga kebanyakan belum melihat keterkaitan antara usaha mereka dengan peluang pasar. ▪ belum cukup mempunyai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat. 		
25.	<p>Pentingkah anda terlibat dalam formulasi kebijakan dengan melihat nilai kepentingan anda sebagai masyarakat terhadap program pemberdayaan?</p> <p>a. Sangat penting</p> <p>b. Penting</p> <p>c. Kurang penting</p> <p>d. Tidak penting</p>	<p>-</p> <p>46</p> <p>20</p> <p>24</p>	<p>-</p> <p>51.1</p> <p>22.2</p> <p>26.7</p>
26.	<p>Setujukah anda, apabila tujuan dari kegiatan pemberdayaan hanya menitik beratkan pada hasil akhirnya saja?</p> <p>a. Sangat setuju</p> <p>b. Setuju</p> <p>c. Kurang setuju</p> <p>d. Tidak setuju</p>	<p>-</p> <p>10</p> <p>27</p> <p>53</p>	<p>-</p> <p>11.1</p> <p>20</p> <p>58.9</p>
27.	<p>Setujukah anda, bilamana sasaran yang dituju adalah bantuan-bantuan yang berupa insentif serta tidak bersifat menumbuhkan sikap sadar dan peduli masyarakat terhadap pemberdayaan?</p> <p>a. Sangat setuju</p> <p>b. Setuju</p> <p>c. Kurang setuju</p> <p>d. Tidak setuju</p>	<p>6</p> <p>-</p> <p>31</p> <p>53</p>	<p>6.7</p> <p>-</p> <p>34.4</p> <p>58.9</p>
28.	<p>Setujukah anda pada pernyataan ini, strategi yang digunakan belum cukup memberikan pengaruh positif karena masyarakat belum memahami dan mengerti maksud dari kegiatan yang dilakukan?</p> <p>a. Sangat setuju</p> <p>b. Setuju</p> <p>c. Kurang setuju</p> <p>d. Tidak setuju</p>	<p>6</p> <p>-</p> <p>34</p> <p>50</p>	<p>6.7</p> <p>-</p> <p>37.8</p> <p>55.6</p>
29.	<p>Setujukah anda pada pernyataan ini, tidak ada asas persamaan hak dan kewajiban serta kemitraan dalam implementasi konsep pemberdayaan?</p> <p>a. Sangat penting</p> <p>b. Penting</p> <p>c. Kurang penting</p> <p>d. Tidak penting</p>	<p>2</p> <p>10</p> <p>27</p> <p>51</p>	<p>2.2</p> <p>11.1</p> <p>30</p> <p>56.7</p>
30.	<p>Setujukah anda pada pernyataan ini tidak ada prinsip sustainable dan transparancy dalam implementasi konsep pemberdayaan,?</p> <p>a. Sangat penting</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

No.	Pertanyaan	Responden (90)	Prosentase
	b. Penting	17	18.9
	c. Kurang penting	17	18.9
	d. Tidak penting	56	62.2
31.	Setujukah anda pada pernyataan ini, kelembagaan masyarakat sudah cukup kompatibel dengan pranata social yang ada serta belum bias mewedahi semua aspirasi dan mewujudkan integrasi serta keteraturan dalam masyarakat?		
	a. Sangat setuju	-	-
	b. Setuju	21	23.3
	c. Kurang setuju	12	13.3
	d. Tidak setuju	57	63.3
32.	Setujukah anda pada pernyataan ini, peran fasilitator yang ada kurang efektif karena tidak ammpu menjembatani komunikasi antar pelaku, tidak mampu memberkan dorongan (motivasi) dan semangat, tidak intens dalam pendampingan atau tinggal dekat dengan masyarakat dan tidak bias memberikan pencerahan sehingga tidak tercipta dialog dan kerjasama yang sinergis?		
	a. Sangat setuju	-	-
	b. Setuju	23	25.6
	c. Kurang setuju	20	22.2
	d. Tidak setuju	47	52.2
33.	Setujukah anda pada pernyataan ini, belum ada penguasaan konsep dan implementasi tri daya (daya manusia, daya lingkungan dan daya ekonomi) oleh fasilitator ?		
	a. Sangat setuju	10	11.1
	b. Setuju	-	-
	c. Kurang setuju	27	31
	d. Tidak setuju	53	58.9
34.	Setujukah anda pada pernyataan ini, penguatan kemandirian / otonomi masyarakat di bidang ekonomi, belum cukup berkemampuan untuk mengembangkan modal usaha, baik individu, bersama / berkelompok, atau mengakses sumber dana lainnya dan belum cukup berkemampuan untuk melakukan analisis biaya usaha dengan baik serta belum cukup berkemampuan untuk mengembangkan pemasaran hasil produksinya paling tidak di tingkat local, serta belum cukup berkemampuan untuk mengembangkan pengertian tentang bentuk kemandirian secara personal maupun berkelompok?		
	a. Sangat setuju	5	5.6
	b. Setuju	-	-
	c. Kurang setuju	31	34.4
	d. Tidak setuju	54	60

Sumber : Hasil Rekapitulasi

Correlations

Correlations

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	Y
X1 Pearson Correla Sig. (2-tailed) N	1.000 .673 90	-.045 .673 90	.016 .878 90	.104 .329 90	.160 .131 90	-.121 .258 90	-.029 .784 90	.101 .345 90	-.121 .257 90	-.084 .429 90	.102 .337 90
X2 Pearson Correla Sig. (2-tailed) N	-.045 .673 90	1.000 .673 90	-.421* .000 90	.129 .225 90	-.002 .987 90	-.034 .749 90	.095 .375 90	-.056 .602 90	.015 .887 90	-.044 .682 90	.090 .396 90
X3 Pearson Correla Sig. (2-tailed) N	.016 .878 90	-.421* .000 90	1.000 .421* 90	-.147 .166 90	.066 .539 90	.298* .004 90	.101 .342 90	.416* .000 90	.210* .047 90	.575* .000 90	-.505* .000 90
X4 Pearson Correla Sig. (2-tailed) N	.104 .329 90	.129 .225 90	-.421* .000 90	1.000 .166 90	.066 .537 90	.051 .633 90	-.005 .965 90	-.048 .655 90	.085 .424 90	-.053 .621 90	.021 .945 90
X5 Pearson Correla Sig. (2-tailed) N	.160 .131 90	-.002 .987 90	.086 .539 90	.086 .537 90	1.000 .066 90	.087 .633 90	.109 .307 90	.116 .277 90	-.043 .686 90	-.024 .825 90	-.047 .661 90
X6 Pearson Correla Sig. (2-tailed) N	-.121 .258 90	-.034 .749 90	.298* .004 90	.051 .633 90	.087 .412 90	1.000 .000 90	.040 .711 90	.385* .000 90	.822* .000 90	.550* .000 90	-.666* .000 90
X7 Pearson Correla Sig. (2-tailed) N	.029 .784 90	.095 .375 90	.095 .342 90	.109 .307 90	.109 .307 90	.040 .711 90	1.000 .000 90	.357* .001 90	.115 .282 90	.320* .002 90	-.192 .070 90
X8 Pearson Correla Sig. (2-tailed) N	.101 .345 90	-.056 .602 90	.416* .000 90	.066 .537 90	.087 .412 90	.385* .000 90	.357* .001 90	1.000 .000 90	.297* .004 90	.613* .000 90	-.484* .000 90
X9 Pearson Correla Sig. (2-tailed) N	-.044 .682 90	1.000 .673 90	-.047 .000 90	.129 .225 90	-.043 .686 90	.822* .000 90	.115 .282 90	.297* .004 90	1.000 .000 90	.531* .000 90	-.595* .000 90
X10 Pearson Correla Sig. (2-tailed) N	-.084 .429 90	-.044 .682 90	-.047 .000 90	-.053 .621 90	-.024 .825 90	.550* .000 90	.320* .002 90	.613* .000 90	.531* .000 90	1.000 .000 90	-.759* .000 90
Y Pearson Correla Sig. (2-tailed) N	.102 .337 90	.090 .396 90	-.505* .000 90	.021 .945 90	-.047 .661 90	-.666* .000 90	-.192 .070 90	-.484* .000 90	-.595* .000 90	-.759* .000 90	1.000 .000 90

***Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X10, X5, X2, X4, X1, X7, X9, X8, X3, X6		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.822 ^a	.675	.634	2.10

a. Predictors: (Constant), X10, X5, X2, X4, X1, X7, X9, X8, X3, X6

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	722.506	10	72.251	16.423	.000 ^a
	Residual	347.549	79	4.399		
	Total	1070.056	89			

a. Predictors: (Constant), X10, X5, X2, X4, X1, X7, X9, X8, X3, X6

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	45.352	4.307		10.531	.000
	X1	5.545E-02	.160	.023	.346	.730
	X2	3.429E-02	.175	.014	.195	.846
	X3	-.259	.217	-.110	-1.195	.236
	X4	-6.50E-03	.125	-.003	-.052	.959
	X5	-5.11E-02	.118	-.030	-.434	.665
	X6	-.677	.268	-.316	-2.529	.013
	X7	-1.04E-02	.234	-.003	-.045	.965
	X8	2.049E-02	.329	.005	.062	.950
	X9	-.198	.493	-.048	-.402	.688
	X10	-1.410	.310	-.497	-4.550	.000

a. Dependent Variable: Y